

Dr. H. Lukman Asha. M.Pd.I

Manajemen Pendidikan **MADRASAH**

DINAMIKA DAN STUDI PERBANDINGAN MADRASAH
DARI MASA KE MASA

Editor: Rhoni Rodin



Manajemen Pendidikan Madrasah

Dinamika dan Studi Perbandingan Madrasah
Dari Masa Ke Masa

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987
Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982
Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pasal 114 Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 115 Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial.

Dr. H. Lukman Asha. M.Pd.I

Manajemen Pendidikan Madrasah

Dinamika dan Studi Perbandingan Madrasah
Dari Masa Ke Masa

Editor: Rhoni Rodin



**MANAJEMEN PENDIDIKAN MADRASAH:
Dinamika dan Studi Perbandingan Madrasah
Dari Masa ke Masa**

© 2020, Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I

Cetakan Pertama, September 2020

ISBN: 978-602-5552-83-0

x + 174 hlm; 14,5 x 20,5 cm

Penulis: Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I

Editor: Rhoni Rodin

Layouter: Moh. Mursyid

Penata Sampul: Azyan Mitra Media

Diterbitkan oleh:



AZYAN MITRA MEDIA

Jl. Imogiri Timur Km.10

Brajan Rt.06 Wonokromo Pleret Bantul. DIY

Hp. 085641522841

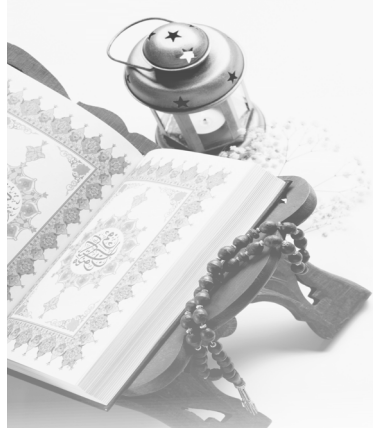
email: azyanpublishing@gmail.com

Website: azyanmitramedia.com

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Isi di luar tanggungjawab penerbit



PRAKATA

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta raya, karena-Nya kita bisa berkarya menulis dan membaca sehingga tahu hakikat hidup dan indahnya manajemen Allah dalam mengatur alam semesta. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Agung junjungan kita, Muhamad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Pembaca yang budiman, ditengah badai covid 19, menginspirasi penulis untuk menulis sebuah buku yang hadir di hadapan pembaca dengan judul “Manajemen Pendidikan Madrasah”. Dengan judul kecil “Dinamika dan studi perbandingan madrasah dari masa ke masa”. Buku ini sengaja disusun dengan sederhana, agar ringan dibawa, mudah dibaca dan dapat diamalkan oleh para mahasiswa khususnya dan segenap pembaca pada umumnya.

Buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi pegangan bagi pelajar, mahasiswa atau siapapun yang sedang menekuni, menggali dan mendalami tentang manajemen dan pendidikan, untuk tetap selalu ingat dan menyandarkan segala hal hanya kepada Allah semata, mengingat manajemen yang baik menghantarkan siklus yang bagus menuju tercapai tujuan yang diharapkan. Namun, tetap dibarengi ikhtiar lainnya.

Ikhtiar untuk merawat dan memelihara manajemen dan pendidikan atau apapun bentuk aktifitas serta pekerjaan keseharian adalah kewajiban dan upaya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, namun segala sesuatu yang akan terjadi hanyalah Allah semata yang maha mengaturnya.

Untuk itulah, kehadiran buku ini diharapkan menambah ilmu dan wawasan pembaca sehingga menjadi insan yang menganggap pentingnya suatu manajemen dan pendidikan.

Dalam buku ini disusun, beberapa bagian diantaranya yang memiliki berbagai manfaat dan faedah untuk pembaca.

Terakhir, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Tentunya masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini, oleh karena itu saran dan masukan amat sangat terbuka dan selalu diharapkan untuk menjadikan buku ini lebih baik lagi.

Ucapan terima kasih dihaturkan kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya buku ini, istri tercinta Hj. Lailati, S.Pd., MM, ananda; Mufti Alam Ada, SE, M.Sc., Dosen UAD Yogyakarta, M. Ilham Adepio, SH, mahasiswa Hukum Internasional Pascasarjana UGM, IIF Cahyo Tunte, mahasiswa UMY, menantu; Faiza Yusnaini Nahar, SE, M.Ed., dosen UMY, dan yang lebih khusus Bapak Rhoni Rodin, S.Pd.I, M.Hum, Semoga Allah mencatatnya sebagai tanaman yang selalu tumbuh dan dapat kita panen buahnya di akhirat nanti. Amin.

Curup, 10 Dzulhijjah 1441 H

31 Juli 2020 M

Penulis



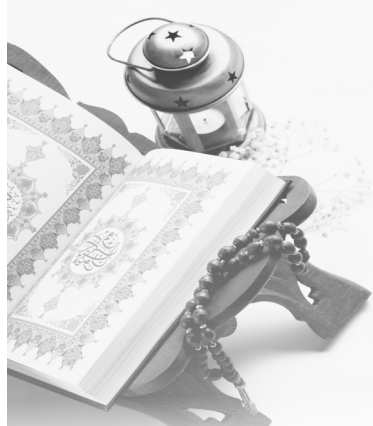
DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I - PENGANTAR STUDI MADRASAH.....	1
A. Prolog.....	1
B. Pengertian Studi Perbandingan Madrasah.....	3
BAB II - PERKEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM.....	7
A. Kuttab/Maktab	8
B. Halaqoh.....	12
C. Majelis	14
D. Masjid, Langgar, Rangkang, Surau.....	18
E. Khan.....	21
F. Ribath.....	21
G. Rumah Ulama.....	22
H. Madrasah	23
BAB III - MADRASAH DI INDONESIA	29
A. Sejarah Berdirinya Madrasah di Indonesia.....	29
1. Memahami Madrasah	29

2. Sejarah Berdirinya Madrasah di Indonesia...	30
B. Perkembangan Madrasah di Indoneia	32
1. Masa Penjajahan.....	32
2. Madrasah pada Masa Orde Lama	33
3. Madrasah pada Masa Orde Baru	35
4. Eksistensi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional	37
5. Jenis Pendidikan di Indonesia.....	38
6. Jenjang dan Bentuk Pendidikan Madrasah	40
 BAB IV - KURIKULUM DAN METODE PENGAJARAN MADRASAH	47
A. Kurikulum Madrasah.....	47
B. Metode Pengajaran di Madrasah	64
C. Kehidupan Siswa di Madrasah	67
 BAB 5 - MANAJEMEN ADMINISTRASI MADRASAH	68
A. Surat Dinas Sekolah Dan Buku Agenda.....	69
B. Buku Ekspedisi	70
C. Buku Catatan Rapat Sekolah (Notulen)	71
D. Buku Pengumuman	72
E. Kegiatan Manajemen yang Didindingkan	73
 BAB 6 - SISTEM KEUANGAN MADRASAH.....	74
A. Manajemen Keuangan Madrasah	74
B. Memahami Manajemen Keuangan.....	75
C. Tugas Manajer Keuangan	76

D. Proses Pengelolaan Keuangan di Madrasah	77
E. Sumber-Sumber Keuangan Madrasah	79
F. Penyusunan RAPBM	81
G. Pengelolaan Keuangan Madrasah yang Efektif	83
H. Pengelolaan Anggaran Madrasah.....	85
I. Pertanggungjawaban Keuangan Madrasah	86
 BAB 7 - PERBANDINGAN MADRASAH.....	 87
A. Insitusi Pendidikan Islam Pra Madrasah.....	88
B. Perbandingan Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Atas	99
C. Keunggulan dan Problema Madrasah Aliyah...	103
D. Perbandingan Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren	105
E. Perbedaan Pesantren, Madrasah dan Sekolah ..	112
 BAB 8 - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	 116
A. Pengertian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	116
B. Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	120
C. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan ...	121
D. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik	123
E. Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	124
 BAB IX - PESERTA DIDIK.....	 127
A. Prolog.....	127

B. Pengertian Peserta Didik.....	127
C. Pengertian Peserta Didik Menurut Beberapa Ahli.....	129
D. Karakteristik Peserta Didik.....	131
E. Peran Guru dalam Mengembangkan Potensi Peserta Didik	136
F. Proses Pendidikan	139
BAB X - SARANA PRASARANA MADRASAH.....	141
A. Memahami Sarana Prasarana.....	141
B. Pengertian Sarana dan Prasarana	142
C. Fungsi Sarana dan Prasarana	143
D. Cara Pemeliharaan Sekaligus Penyimpanan Sarana dan Prasarana.....	144
E. Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana	145
BAB XI - SOSIAL BUDAYA MADRASAH.....	150
A. Pengertian Lingkungan Sosial	150
B. Faktor-Faktor Lingkungan Sosial	151
C. Jenis-jenis Lingkungan Sosial	152
D. Memahami Sosial Budaya Madrasah.....	153
E. Desain Pengembangan Madrasah.....	158
F. Performa Madrasah yang Ideal.....	159
Daftar Pustaka.....	162
Indeks	169
Biografi Penulis.....	172



BAB I

PENGANTAR STUDI MADRASAH

A. Prolog

Dalam sejarah awal perkembangan Islam, sosok yang pertama kali memainkan peran dalam pendidikan Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Islam sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad merupakan upaya pembebasan manusia dari belenggu akidah sesat yang dianut oleh kelompok Quraisy dan upaya pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan suatu kelompok terhadap kelompok lain yang dipandang rendah status sosialnya.

Nabi Muhammad membangkitkan kesadaran manusia terhadap pentingnya pengembangan bidang keilmuan atau pendidikan. Memang perintah Allah kepada Nabi Muhammad adalah untuk membuka pintu gerbang pengetahuan bagi manusia dengan mengajari atau mendidik. Disamping itu beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan pesan-pesan Allah yang terkandung dalam Alquran.

Pendidikan memainkan peran sentral dalam Islam. Ilmu menjadi tulang punggung (*backbone*) ajaran Islam. Lebih dari 800 ayat Al-Quran menyebut, menyinggung atau membahas tentang pentingnya keilmuan. Pada masa awal pendidikan Islam tentu saja pendidikan formal yang sistematis belum terselenggara,

dan pendidikan formal baru muncul pada masa belakangan yakni ditandai dengan kebangkitan madrasah. Permulaan pendidikan Islam bisa ditemukan di Makkah pada zaman Rasulullah. Nabi Muhammad menyiarkan konsep perubahan radikal, hubungan dan sikap masyarakat Arab yang menjadi mapan sampai saat ini. Perubahan itu sejalan dengan ajaran Islam yang memerlukan kreatifitas baru secara kelembagaan untuk meneruskan kelangsungan dan perkembangan agama Islam. (Edi Yusrianto, 2008:52).

Tauhid merupakan salah satu nilai pokok dalam pendidikan masa itu, karena dengan menginternalisasikan nilai keimanan berdasarkan tauhid maka segala kepercayaan yang sesat itu dapat dibersihkan dari jiwa manusia. Seiring berjalannya waktu, sebelum pendidikan Islam menuju pada masa madrasah. Sejarah pendidikan Islam mengalami masa pada periode sebelum adanya madrasah, tumbuhnya madrasah dan perkembangan madrasah. Di mana pada waktu itu banyak berdiri *kuttab*, rumah, masjid, *halaqah*, perpustakaan, rumah ulama dan sebagainya.

Munculnya lembaga-lembaga pendidikan non-formal sebelum periode madrasah tersebut di atas memperlihatkan adanya kepedulian terhadap pentingnya pendidikan bagi warga masyarakat, juga menunjukkan adanya dinamika pendidikan Islam yang amat dinamis, serta menunjukkan sebuah model pendidikan yang demokratis, bebas terkendali, bahkan juga toleransi. Hal ini misalnya terlihat pada tata krama dan tradisi intelektual yang terjadi di halaqah. Dari sudut tata krama yang mengajarkan bahwa seseorang yang memandang tamu ke rumahnya harus menyediakan makanan dan minuman, maka ini dapat berarti bahwa halaqah-halaqah berlangsung di rumah-rumah tertentu berukuran kecil.

Pada buku ini akan menjelaskan tentang pengertian studi perbandingan madrasah, sejarah madrasah, madrasah di Indonesia, kurikulum madrasah, tenaga pendidik, peserta didik, manajemen madrasah, sarana dan prasarana madrasah dan sosial madrasah.

B. Pengertian Studi Perbandingan Madrasah

Studi yaitu pelajaran dengan menggunakan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan (Purwadarminta, 1996: 965). Studi dapat juga diartikan mempelajari sesuatu agar menjadi tahu tentang sesuatu. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perbandingan berasal dari kata banding yang berarti persamaan, selanjutnya membandingkan mempunyai arti mengadu dua hal untuk diketahui perbandingannya. Perbandingan diartikan sebagai selisih persamaan (Bambang Mahriyanto, 1999:57). Menurut Sjachran Basah perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Jadi di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas. Dalam persepektif ilmu hukum, perbandingan menjadi sesuatu yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain (Saepudin, 2010).

Menurut Suarjati Hartono, (1991: 26), pengertian perbandingan tidak ada definisi khusus baik dari segi undang-undang, literatur maupun pendapat para sarjana, namun perbandingan itu hanyalah merupakan suatu metode saja, sehingga dapat diambil dari ilmu sosial-sosial lainnya. Namun

terdapat dua paham tentang perbandingan hukum, yaitu ada yang menganggap sebagai metode penelitian belaka dan ada juga yang menganggap sebagai suatu bidang ilmu hukum yang mandiri. Dalam analisa perbandingan biasanya melalui tiga tahap yaitu: tahap pertama merupakan kegiatan diskriptif untuk mencari informasi, tahap kedua memilah-milah informasi berdasarkan klasifikasi tertentu, dan tahap ketiga menganalisa hasil pengklasifikasian itu untuk dilihat keteraturan dan hubungan antara berbagai variabel. Studi perbandingan bisa memberikan kepada kita perspektif tentang lembaga-lembaga, kebaikan dan keburukan dan apa yang menyebabkan lembaga-lembaga itu terbentuk (Wiryanto Aswir, 2013). Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa perbandingan adalah membandingkan dua hal/lembaga untuk diketahui perbedaan dan persamaan kedua lembaga melalui tahap-tahap tertentu.

Madrasah berasal dari kata “*darasa*” yang berarti belajar. Kata ini kemudian di-*tashrif* dalam bentuk *isim makan* (kata yang menunjuk pada tempat) menjadi *madrasah* yang berarti tempat belajar baik bagi murid yang level (TK, SD/MI, SMP/MTs/SMU/MA) rendah maupun level tinggi (Perguruan Tinggi). Makna lain dari “*darasa*” adalah terhapus, hilang bekasnya, menjadikan usang, melatih dan mempelajari (Luis Ma'luf, 1986: 187).

Berdasarkan arti madrasah tersebut, maka diketahui bahwa istilah madrasah merupakan tempat untuk mencerdaskan para peserta didik, menghilangkan ketidak-tahuan, atau memberantas kebodohan mereka serta melatih keterampilan mereka sesuai bakat, minat dan kemampuannya. Madrasah juga tidak hanya diartikan sebagai sekolah dalam arti sempit, tetapi juga bisa

dimaknai dengan rumah, istana, *kuttab*, masjid, perpustakaan, surau dan tempat-tempat lainnya. Bahkan seorang ibu dapat dikategorikan sebagai *al-madrasah al-ula* (madrasah pemula). Secara historis menurut Al-Maqrizi, madrasah tidak dikenal pada masa sahabat dan *tabi'in*. Ia diciptakan sesudah 400 tahun setelah Hijriyah. Dalam perkembangannya, pemakaian istilah “madrasah” secara definitif baru muncul pada abad ke 11 M. Penjelmaan istilah “madrasah” merupakan transformasi dari masjid ke madrasah.

Ada beberapa teori yang berkembang seputar transformasi ini, di antaranya Ahmad Syalabi yang berpandangan bahwa madrasah merupakan transformasi institusi pendidikan Islam dari masjid ke madrasah terjadi secara langsung sebagai konsekuensi logis dari semakin ramainya kegiatan yang dilaksanakan di masjid yang tidak hanya dalam kegiatan ibadah *mahdhah*, tetapi juga dalam bentuk ibadah *ijtima'iyah*. Sementara itu, meskipun ada yang beranggapan bahwa peralihan dari masjid ke madrasah itu terjadi secara tidak langsung.

Madrasah dikenal pertama kali didirikan pada tahun 1005 oleh dinasti Fatimiyah di Mesir. Saat itu, madrasah telah memiliki perpustakaan, guru dengan materi ajar yang berbeda dan siswa dengan fasilitas belajar yang tersedia. Pandangan lain menyebutkan bahwa Dinasti Saljuk yang dikenal dengan Nidzmul Mulk bin al-Thusi telah mendirikan pertama kali organisasi madrasah pada tahun 1067 M dengan dua type yaitu 1) *Scholastic* yang dibentuk untuk melahirkan pemimpin spiritual dan 2) *Earthly Knowledge* yang dibentuk untuk menghasilkan pegawai pemerintahan. Lebih jauh, Nidzmul Mulk juga mendirikan madrasah di luar kerajaan untuk menghasilkan ahli dalam berbagai bidang seperti sains, filsafat,

administrasi publik dan pemerintahan. Dengan jasa ini, beliau dianggap sebagai “bapak sistem pendidikan masyarakat Islam” (Luis Ma’luf, 1986).

Terjadi perbedaan pendapat tentang madrasah yang pertama berdiri di dunia Islam. Di antara *pandangan* tersebut adalah: 1) madrasah sebagai lembaga pendidikan formal telah dikenal adanya “*Madrasah Nidzamiyah*” di Bagdad yang didirikan oleh Nidzam al-Muluk seorang wazir dari dinasti Saljuk pada awal abad ke-11 M atau tahun 457 H; 2) menurut al-Jumbulati bahwa sebelum abad ke-10, madrasah yang pertama berdiri adalah madrasah *al-Bai-haqiah* di kota Nisapur yang didirikan oleh Abu Hasan al-Baihaqi (w. 414 H); 3) Menurut Richard Bulliet bahwa madrasah *Miyan Dahiyah* di Nisapur berdiri dua abad sebelum berdirinya madrasah Nizyamiyah di Bagdad yang mengajarkan fiqh malikiyah.

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang madrasah yang pertama berdiri di dunia Islam, namun madrasah Nidzam al-Muluk adalah madrasah yang paling populer di kalangan ahli sejarah dan masyarakat Islam. Menurut Mehdi, meskipun madrasah Nidzam al-Muluk bukan sebagai madrasah yang pertama didirikan, namun madrasah ini memiliki spirit ilmu pengetahuan yang tinggi, baik dari tujuan politik maupun agama. Dan yang paling menarik adalah proses pendirian madrasah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak yaitu pemerintah, ulama-ulama, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa madrasah Nidzamiyah ini didirikan atas kemauan dan keinginan bersama bukan keinginan sepihak (Alhasyimi, 1985: 200).



BAB II

PERKEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Harun al Rasyid (170-193 H). Karena beliau adalah ahli ilmu pengetahuan dan mempunyai kecerdasan serta didukung negara dalam kondisi aman dan tenang serta dalam masa pembangunan sehingga dunia Islam pada saat itu diwarnai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan pada masa itu memiliki tujuan keagamaan dan akhlak, tujuan kemasyarakatan, cinta ilmu pengetahuan dan tujuan kebendaan (Sams).

Pada masa kejayaan ini ditandai dengan berkembangnya berbagai lembaga pendidikan, baik formal yaitu berupa madrasah (sekolah) dan nonformal yang berupa *kutab*, *halaqah*, masjid, rumah-rumah ulama, majelis, *khan*, dan *ribath*.

Menurut ensiklopedia Indonesia, lembaga pendidikan yaitu suatu wadah pendidikan yang dikelola demi mencapai hasil pendidikan yang diinginkan. Badan pendidikan sesungguhnya termasuk pula dalam alat-alat pendidikan, jadi badan/lembaga pendidikan yaitu organisasi atau kelompok manusia yang karena sesuatu dan lain hal memikul tanggung jawab atas terlaksananya pendidikan agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik.

Secara terminologi lembaga pendidikan Islam adalah suatu wadah, atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Lembaga pendidikan itu mengandung makna konkrit berupa sarana dan prasarana dan juga pengertian yang abstrak, dengan adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu, serta penanggung jawab pendidikan itu sendiri. Jadi, Lembaga pendidikan Islam merupakan institusi, badan, yayasan yang dibentuk untuk keperluan pendidikan dan sarana untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam.

Pada umumnya lembaga pendidikan Islam sebelum masa periode madrasah atau disebut juga masa klasik, diklasifikasikan atas dasar muatan kurikulum yang diajarkan. Dalam hal ini kurikulumnya meliputi pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Atas dasar ini, lembaga pendidikan Islam di masa klasik menurut Charles Michael Stanton digolongkan ke dalam dua bentuk yaitu lembaga pendidikan formal dan non formal, dimana yang pertama mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan yang kedua mengajarkan pengetahuan umum, termasuk filsafat.

Adapun lembaga-lembaga pendidikan Islam sebelum masa periode madrasah adalah sebagai berikut (Zuhairini, 2008: 38):

A. Kuttab/Maktab

Menurut catatan sejarah, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab, khususnya Makkah telah mengenal adanya pendidikan rendah, yaitu *kuttab*. Kuttab/Maktab berasal dari kata dasar yang sama, yaitu *kutaba* yang artinya menulis. Sedangkan kuttab/maktab berarti tempat di mana dilangsungkan kegiatan tulis-menulis. Kebanyakan para ahli sejarah pendidikan Islam

sepakat bahwa keduanya merupakan istilah yang sama, dalam arti lembaga pendidikan Islam tingkat dasar yang mengajarkan membaca dan menulis kemudian meningkat pada pengajaran Alquran dan pengetahuan agama tingkat dasar. Kuttab merupakan tempat belajar yang mula-mula lahir di dunia Islam. Pada awalnya kuttab berfungsi sebagai tempat memberikan pelajaran menulis dan membaca bagi anak-anak. Kuttab dalam bentuk awalnya hanya berupa ruangan di rumah seorang guru.

Ahmad Syalabi mengemukakan bahwa sebagai lembaga pendidikan, kuttab mempunyai dua fungsi, *Pertama* Kuttab berfungsi sebagai tempat mengajar baca tulis dengan teks dasar puisi-puisi Arab dan sebagian besar gurunya adalah non muslim. Kuttab jenis pertama ini hanya merupakan lembaga pendidikan dasar yang mengajarkan baca tulis. Pada mulanya pendidikan Kuttab berlangsung di rumah-rumah para guru atau di pekarangan sekitar masjid. Materi yang diajarkan dalam baca tulis ini adalah puisi atau pepatah-pepatah Arab yang mengandung nilai-nilai tradisi yang baik. Adapun penggunaan Al-Qur'an sebagai teks dalam kuttab baru terjadi kemudian, ketika jumlah kaum muslimin yang menguasai al-Qur'an telah banyak, terutama setelah kegiatan kodifikasi pada masa kekhalifahan Ustman bin Affan.

Guru kuttab pada masa awal Islam kebanyakan dari kalangan nonmuslim, sebab muslim yang dapat membaca dan menulis jumlahnya masih sangat sedikit. Disamping itu mereka sibuk dengan pencatatan wahyu. Oleh karena itu, kebanyakan guru baca tulis adalah kaum zimmi dan para tawanan perang, seperti tawanan badar.

Kedua, kuttab sebagai tempat pendidikan yang mengajarkan al-Qur'an dasar-dasar keagamaan. Pengajaran teks Al-Qur'an pada jenis kuttab yang kedua ini setelah banyak ahli bacaan dan penghafal al-Qur'an. Guru yang mengajarkannya dari ummat Islam sendiri. Pada tingkat kedua ini siswa diajarkan pemahaman tentang bahasa Arab dan Aritmatika, sedangkan *Kuttab* yang didirikan oleh orang-orang yang lebih mapan kehidupannya maka materi tambahannya adalah menunggang kuda dan renang.

Sejak abad ke-8 M, kuttab mulai mengajarkan pengetahuan umum di samping ilmu agama. Hal ini terjadi akibat adanya persentuhan antara Islam dengan warisan budaya Helenisme sehingga membawa perubahan, yang tadinya kuttab adalah lembaga pendidikan tertutup sekarang menjadi lembaga pendidikan yang terbuka terhadap pengetahuan umum, termasuk filsafat.

Keistimewaan lembaga tradisional pertama dalam Islam ini, meskipun masih sangat sederhana, tetapi memberikan kontribusi bagi umat hingga berdirinya sistem madrasah pada abad-abad berikutnya. Pendidikan jenis kuttab ini pada mulanya diadakan di rumah-rumah guru (*mu'alim dan muaddib*). Setelah Nabi SAW dan para sahabat membangun masjid, barulah ada kuttab yang didirikan di samping masjid. Selain itu ada juga kuttab yang didirikan terpisah dari masjid. Masa belajar di Kuttab tidak ditentukan, bergantung kepada keadaan si anak. Anak yang cerdas dan rajin, akan lebih cepat menamatkan pelajarannya. Sebaliknya anak yang malas akan memakan waktu yang lama untuk menamatkan pelajarannya. Sistem pengajaran di kuttab

ketika itu tidak berkelas. Para murid biasanya duduk bersila dan berkeliling menghadap guru.

Pada awal pemerintahan Islam di Madinah, pengajar baca tulis di kuttab kebanyakan non muslim, karena sedikit sekali kaum muslim yang bisa menulis. Rasulullah pernah membebaskan para tawanan perang dengan syarat mengajari 10 orang muslim membaca dan menulis. Pada awalnya pengajaran baca-tulis tidak dinukil langsung dari Al-Qur'an tetapi dari puisi dan syair bijaksana orang-orang Arab. Setelah banyak kaum muslimin yang pandai menulis dan membaca, maka pengajaran baca tulis di kuttab pun tidak lagi puisi dan syair tetapi Al-Qur'an.

Pada mulanya kuttab (maktab) berfungsi sebagai tempat memberikan pelajaran menulis dan membaca bagi anak-anak, namun ketika ajaran Islam mulai berkembang, pelajaran ditekankan pada penghafalan Al-Qur'an. Menurut catatan sejarah, kuttab telah ada di negeri Arab sejak masa pra-Islam, walau belum begitu dikenal dan baru berkembang pesat setelah periode Bani Umayyah, namun seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, jumlah pemeluk Islam pun semakin bertambah. Hal ini menuntut dikembangkannya kuttab yang ada untuk mengimbangi laju pendidikan yang begitu pesat.

Pada perkembangan selanjutnya, selain kuttab-kuttab yang ada di masjid, terdapat pula kuttab-kuttab umum yang berbentuk madrasah, yakni telah mempergunakan gedung sendiri dan mampu menampung ribuan murid. Kuttab jenis ini mulai berkembang karena adanya pengajaran khusus bagi anak-anak keluarga kerajaan, para pembesar, dan pegawai Istana. Dan diantaranya yang mengembangkan pengajaran secara khusus ini

adalah Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi (w.714) yang pada mulanya menjadi *muaddib* bagi anak-anak Sulayman bin Na'im, Wazir Abd al-malik bin Marwan.

B. Halaqoh

Halaqah, artinya lingkaran. Secara istilah proses belajar mengajar dengan cara murid melingkari gurunya. Guru biasanya duduk di lantai dan menerangkan, membacakan atau memberikan komentar atas karyanya atau hasil pemikiran orang lain. Kegiatan *halaqah* ini biasa dilakukan di masjid dan di rumah. Kegiatan di halaqah ini tidak khusus untuk mengajarkan atau mendiskusikan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum, termasuk filsafat ([Http:// fauzanma-fitku in Jakarta. Blogspot. Com](http://fauzanma-fitku.in)).

Oleh karena itu, halaqah ini dikelompokkan ke dalam lembaga pendidikan yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan umum. Istilah halaqah (lingkaran) biasanya digunakan untuk menggambarkan sekelompok kecil muslim yang secara rutin mengkaji ajaran Islam. Jumlah peserta dalam kelompok kecil tersebut berkisar antara 3-12 orang. Mereka mengkaji Islam dengan kurikulum (*minhaj*) tertentu.

Lembaga pendidikan ini terbentuk karena kesadaran para sahabat Nabi Muhammad SAW mempelajari dan mengamalkan Islam secara bersama-sama (*amal jama'i*). Kesadaran itu muncul setelah mereka bersentuhan dan menerima dakwah dari orang-orang yang telah mengikuti halaqah terlebih dahulu, baik melalui forum-forum umum, seperti tabligh, seminar, pelatihan atau *dauroh*, maupun karena dakwah *interpersonal* (dakwah *fardiyah*).

Halaqah biasanya dipimpin oleh seorang *Murabbi*. Murobbi bekerjasama dengan peserta halaqah untuk mencapai tujuan halaqah, yaitu terbentuknya muslim yang Islami dan berkarakter *da'i* (*takwinul syakhshiyah Islamiyah wa da'iyah*). Dalam mencapai tujuan tersebut, murabbi berusaha agar peserta hadir secara rutin dalam pertemuan halaqah tanpa merasa jemu dan bosan. Kehadiran peserta secara rutin penting artinya dalam menjaga kekompakan halaqah agar tetap produktif untuk mencapai tujuannya.

Pada masanya, halaqah adalah sebuah *alternative* bagi sebuah pendidikan Islam yang cukup efektif untuk membentuk muslim yang memiliki kepribadian Islami. Hal ini dapat terlihat dari hasil pembinaannya yang berhasil membentuk sekian banyak muslim yang serius mengamalkan Islam. Jumlah mereka makin lama makin banyak seiring semakin bertambahnya jumlah halaqah yang terbentuk di berbagai kalangan.

Pada masa Islam sudah berkembang, dan semakin banyaknya orang-orang yang tertarik untuk menggali ilmu pengetahuan, maka orang-orang yang berilmu dikala itu secara besar hati memberikan atau membagi pengetahuan mereka kepada muslim lain yang ingin belajar. Keberadaan halaqah ini tidak hanya satu, tetapi terkadang dalam sebuah masjid ada beberapa halaqah. Halaqah memiliki peranan yang sangat penting untuk keberadaan umat Islam itu sendiri. Sebab dari sanalah terbentuknya kader-kader Islami melalui sistem pendidikan halaqah, maka di dalam tubuh umat akan lahir orang-orang yang senantiasa berdakwah kepada kebenaran.

C. Majelis

Istilah majelis telah dipakai dalam pendidikan sejak abad pertama Islam. Menurut akar katanya, istilah majelis tersusun dari gabungan dua kata: majlis yang berarti (tempat) sedangkan kita mendengar kata majelis sering diiringi dengan kata taklim yang berarti (pengajaran) yang berarti tempat pengajaran atau pengajian bagi orang-orang yang ingin mendalami ajaran-ajaran Islam sebagai sarana dakwah dan pengajaran agama (Zuhairini, 2008:77).

Mulanya majelis merujuk pada arti tempat-tempat pelaksanaan belajar mengajar. Pada perkembangan berikutnya di saat dunia pendidikan Islam mengalami zaman keemasan, majlis berarti sesi di mana aktivitas pengajaran atau diskusi berlangsung. Dan belakangan majlis diartikan sebagai sejumlah aktivitas pengajaran, sebagai contoh, majlis Al-Nabi, artinya majlis yang dilaksanakan oleh nabi, atau majlis Al-Syafi'i artinya majlis yang mengajarkan fiqh imam Syafi'i. Seiring dengan perkembangan pengetahuan dalam Islam, majlis digunakan sebagai kegiatan transfer ilmu pengetahuan sehingga majlis banyak ragamnya.

Lembaga pendidikan Islam dalam bentuk majlis sastra mulai populer berkembang secara formal sejak masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, tetapi keberadaannya telah dimulai sejak masa Khulafaur Rasyidin. Di lembaga ini, umat Islam belajar tentang berbagai syair, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Persia yang berhubungan dengan agama Islam dan kondisi kehidupan sosial-budaya masyarakat secara menyeluruh.

Pada masa Abbasiyah, selalu diadakan perdebatan dan diskusi tentang keahlian bersyair diantara sastrawan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk juga perlombaan di antara para seniman dan pujangga, khususnya dalam bidang kaligrafi Alquran dan arsitektur. Lembaga pendidikan ini menjadi salah satu corong pemerintah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang seni dan budaya umat Islam sehingga mampu menghasilkan karya seni dan budaya yang menakjubkan saat itu.

Majlis yang dimaksud adalah suatu majlis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Majlis ini bermula sejak zaman Khulafa Ar-rasyidin, yang biasanya memberikan fatwa dan musyawarah serta diskusi dengan para sahabat untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi pada masa itu, tempat pertemuan pada masa itu adalah masjid. Setelah pada masa khalifah Bani Umayyah tempat majlis tersebut dipindahkan ke Istana, dan hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu saja. Bahkan pada masa khalifah Abbasiyah, majlis sastra ini sangat menjadi kebanggaan, khalifah yang memang pada umumnya khalifah-khalifah Bani Abbas ini sangat menarik perhatian pada perkembangan ilmu pengetahuan.

Seiring perkembangan pengetahuan Islam, majlis menjadi banyak ragamnya. Menurut Munirudin Ahmed, Majelis dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam:

- 1) Majelis Hadis, dalam majlis ini terdapat dua macam, yaitu majlis permanen dan majlis yang diselenggarakan sewaktu-waktu. Majelis permanen biasanya dilakukan oleh

seorang ulama ahli hadis dalam jangka waktu yang sudah jelas atau sudah rutin dilaksanakan. Sedangkan majelis yang bersifat semi permanen diselenggarakan sewaktu-waktu, biasanya dilakukan sekali atau dua kali dalam waktu setahun oleh ulama yang bukan ahli dalam bidang hadis.

- 2) Majelis *Tadris*, yaitu majelis yang mengajarkan tentang tadris.
- 3) Majelis *Al-Munazharah*, merupakan sebuah majelis pertemuan perdebatan, bukan semacam lembaga pendidikan. Majelis ini dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya:
 - a. Majelis *Al Munazharah* yang diselenggarakan atas perintah khalifah.
 - b. Majelis *Al Munazharah* yang bersifat edukatif, yang dilakukan secara kontinu, dan biasanya dilaksanakan setelah proses belajar mengajar dan lebih mirip dengan metode tanya jawab atau diskusi.
 - c. Majelis *Al Munazharah* yang bersifat spontan atau diselenggarakan secara tidak sengaja. Misalnya bertemunya dua orang ulama di tengah jalan, kemudian terjadi tukar pendapat, sehingga tanpa disengaja terjadi majelis ini.
 - d. Majelis *Al Munazharah* yang bersifat forum terbuka antara beberapa ulama. Majelis ini biasanya terdiri dari perkumpulan beberapa ulama. Yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan menentukan siapa yang dapat menajutahkan lawannya dengan mengemukakan argument yang luas.

- e. Majelis *Al-Muzakarah*, majelis ini bisa dikatakan sebagai majelis yang dihasilkan sebagai sebuah inovasi dari para murid. Awalnya, ulama-ulama hadis mendiskusikan hadis di tempat terbuka. Para ulama mengizinkan para murid untuk bertanya atau memberi saran mengenai topik yang ingin dibahas. Kemudian lama-kelamaan menjadi sebuah lembaga. Inti materi yang dibahas dari majelis ini adalah tentang hadis, seperti membahas sanad hadis, membahas hadis dalam bidang yang lebih spesifik, pembahasan pengelompokan hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi ataupun hadis yang diriwayatkan oleh para ulama. Kemudian ada juga yang membahas tentang hadis yang *dhaif*, rangkaian perawi hadis, dan yang terakhir membahas segi musnad.
- 4) Majelis *Asy-Syu'ara*, sesuai dengan namanya *Syu'ara* yang berarti syair. Majelis ini adalah majelis yang mengkhususkan untuk belajar syair yang bertujuan untuk belajar bahasa. Memang menurut beberapa pendapat (penyusun) tiada yang dapat dibanggakan pada syair-syair yang dibuat, tetapi di mata orang-orang Arab, syair memiliki nilai tersendiri.
- 5) Majelis *Adab*, bagi bangsa Arab adab mencakup tiga pembahasan, yaitu puisi, silsilah dan laporan bersejarah bagi orang-orang terkenal. Majelis ini membahas tentang ketiga hal di atas, walaupun terkesan seperti perbincangan daripada tempat belajar.
- 6) Majelis *Al-Fatwa*, majelis ini bisa dikatakan sebagai majelis fiqih, karena di dalamnya mengajarkan ilmu fiqih. Majelis ini bertujuan untuk mencari kesepakatan dari beberapa

masalah yang dibahas, kemudian kesepakatan tersebut difatwakan yang diperkuat dengan syariat atau hukum.

Rasulullah ketika menyampaikan dakwah kepada para sahabatnya sering membentuk majelis-majelis. Majelis tersebut biasanya memang bisa bertempat dimana saja, terkadang Rasulullah melakukannya setelah selesai melaksanakan shalat, atau di tempat yang berbeda. Terkadang majelis tersebut terbentuk secara spontanitas, contohnya ketika Rasulullah sedang duduk kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau tentang suatu hal, lalu Rasulullah menerangkan masalah tersebut, kemudian dari penerangan tersebut muncullah pertanyaan baru dari para sahabat. Proses tersebut bisa dikatakan sebuah majelis. Karena terjadi proses transfer ilmu antara Rasulullah dengan para Sahabat.

Selain itu ada faktor yang memotivasi para sahabat untuk membentuk dan menghadiri majelis ilmu. Yaitu dimana di suatu tempat ada majelis ilmu, maka para Malaikat akan mendo'akan orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut untuk memohonkan ampun kepada Allah. Sehingga timbulah semangat para sahabat untuk selalu berada di majelis dan berusaha untuk melestarikannya. Hal ini terbukti dengan keberadaannya majelis ilmu hingga zaman sekarang.

D. Masjid, Langgar, Rangkang, Surau

Kata masjid berasal dari bahasa Arab, *sajada* (*fi'il madi*) *yusajidu* (*mudhari'*) masjid/sajdan (*masdar*), artinya tempat sujud. Secara harfiah, masjid adalah "tempat untuk bersujud".

Namun, dalam arti terminologi, masjid diartikan sebagai tempat khusus untuk melakukan aktivitas ibadah dalam arti yang luas. Dalam bahasa Indonesia, masjid diartikan rumah tempat bersembahyang bagi orang Islam.

Masjid memegang peran penting dalam pendidikan Islam, karena masjid atau surau merupakan sarana yang pokok dan mutlak keperluannya bagi perkembangan masyarakat Islam. Masjid, surau dan langgar dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia sebelum adanya pesantren. Pendidikan di surau atau langgar adalah pendidikan tingkat dasar yang biasa disebut sebagai pengajian al-Qur'an. Kemudian pendidikan dan pengajaran tingkat lanjutan yang disebut pengajian kitab diselenggarakan di masjid.

Pembangunan Masjid tersebut bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan umat Islam. Di samping itu, masjid juga memiliki multifungsi, diantaranya: (a) sebagai tempat beribadah, (b) tempat kaum muslimin beri'tikaf, menempah bathin sehingga selalu terpelihara. (c) sebagai pusat kegiatan dan informasi berbagai masalah kehidupan kaum muslimin, (d) sebagai tempat kegiatan sosial politik, (e) sebagai tempat bermusyawarah, (f) tempat mengadili perkara, (g) tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat (h) tempat menghimpun dana, menyimpan dan membagikannya (i) tempat menyampaikan penerangan agama dan informasi-informasi lainnya dan (j) masjid dijadikan sebagai pusat dan lembaga pendidikan Islam (Zuhairini, 2008: 90).

Saat ini fungsi masjid mulai menyempit, tidak sebagaimana pada zaman Nabi SAW. Hal itu terjadi karena lembaga-

lembaga sosial keagamaan semakin memadat, sehingga masjid terkesan sebagai tempat ibadah shalat saja. Pada mulanya, masjid merupakan sentral kebudayaan masyarakat Islam, pusat organisasi kemasyarakatan, pusat pendidikan, dan pusat pemukiman, serta sebagai tempat ibadah dan *I'tikaf*.

Proses yang mengantarkan masjid sebagai pusat dan pengetahuan adalah karena di masjid tempat awal pertama mempelajari ilmu agama yang baru lahir dan mengenal dasar-dasar, hukum-hukum, dan tujuannya. Masjid yang pertama kali dibangun adalah masjid Quba, yaitu setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Seluruh kegiatan umat difokuskan di masjid termasuk pendidikan. Majelis pendidikan yang dilakukan Rasulullah bersama sahabat di masjid dilakukan dengan sistem halaqah. Dalam perkembangannya, di kalangan umat Islam tumbuh semangat untuk menuntut ilmu dan memotivasi mereka mengantarkan anak-anaknya untuk memperoleh pendidikan di masjid sebagai lembaga pendidikan menengah setelah kuttab. Kurikulum pendidikan di masjid biasanya merupakan tumpuan pemerintah untuk memperoleh pejabat-pejabat pemerintah, seperti kadi, khatib, dan imam masjid.

Pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan masjid pada era awal kurang mendapat perhatian dari penguasa pada saat itu, karena penguasa telah memusatkan perhatian pada proses penyebaran agama dan proses perluasan wilayah. Dengan semakin luas wilayah kekuasaan Islam, telah memperkaya perkembangan lembaga ini, melalui asimilasi dan persentuhan budaya Islam dengan budaya lokal.

E. Khan

Khan, merupakan institusi yang berfungsi sebagai asrama pelajar dan tempat penyelenggaraan pengajaran agama. Khan biasanya difungsikan sebagai penyimpanan barang-barang dalam jumlah besar atau sebagai sarana komersial yang memiliki banyak tokoh seperti khan al-Narsi yang berlokasi di alun-alun Karkh di Baghdad. Selain itu, khan juga berfungsi sebagai asrama untuk murid-murid dari luar kota yang hendak belajar hukum Islam di suatu masjid, seperti khan yang dibangun oleh Di'lij ibn Ahmad ibn Di'lij pada akhir abad ke-10 M di Suwaiqat Ghalib dekat maqam Suraij. Di samping fungsi di atas khan juga digunakan sebagai sarana untuk privat (<http://muhammadalisunan.blogspot.com>).

F. Ribath

Secara harfiah, *al-ribath* artinya ikatan. Sedangkan dalam arti yang umum, al-Ribath adalah tempat untuk melakukan latihan, bimbingan dan pengajaran bagi calon sufi. Ribath adalah tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mengkonsentrasikan diri untuk semata-mata ibadah. Namun pada kelanjutannya banyak ribath yang digunakan sebagai kegiatan keilmuan yang dipimpin oleh seorang *syekh* yang terkenal dengan ilmu dan kesalehannya. Berbagai aturan yang terdapat dalam al-ribath sebagaimana tersebut, banyak yang digunakan oleh lembaga pendidikan sekarang dengan sedikit modifikasi dan penyesuaian. Istilah, murid, *mursyid*, *ibtidaiyah*, *mustawasithah*, *aliyah* dan ijasah misalnya diambil dari istilah yang terdapat al-ribath.

G. Rumah Ulama

Tipe lembaga pendidikan ini termasuk kategori yang paling tua, bahkan yang lebih dahulu keberadaannya sebelum halaqah di masjid Rasulullah SAW dan para sahabat menjadikan rumahnya sebagai markas gerakan pendidikan yang terfokus pada aktivitas pengajaran aqidah dan pesan-pesan Allah SWT dalam al-Quran untuk disampaikan kepada masyarakat. Ketika wahyu pertama diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka untuk menjelaskan dan mengajarkan kepada para sahabat, Nabi SAW mengambil rumah Al-Arqam bin Abi Arqam sebagai tempatnya, disamping menyampaikan ceramah pada berbagai tempat.

Pada masa awal Islam, proses pendidikan Islam dilaksanakan secara informal, maksudnya proses pendidikan itu berlangsung di rumah-rumah. Dan di rumah itulah Nabi Muhammad SAW menyampaikan dan menanamkan dasar-dasar agama serta mengajarkan Al-qur'an kepada mereka. Hal ini berlangsung kurang lebih tiga tahun. Namun sistem pendidikan pada lembaga ini masih berbentuk halaqah belum memiliki kurikulum. Sedangkan sistem dan materi-materi pendidikan yang akan disampaikan diserahkan sepenuhnya kepada Nabi SAW. Pada hakikatnya lembaga pendidikan di rumah ini telah diterapkan sebelum Kuttub dan makktab, dan pada waktu itu rumah yang pertama dijadikan tempat pertemuan untuk menyampaikan ajaran agama adalah rumah Al-Arqam bin Abi Arqam (Zuhairini, 2008: 91).

Pada perkembangan selanjutnya rumah para ulama' terkenal yang menjadi tempat kegiatan belajar dan mengajar adalah

rumah Ibnu Sinah, Al-Ghazali, rumah Ali Ibnu Muhammad, rumah Al-Fasihih, rumah Ya'kub Ibnu Killis, rumah Wazir Khalifah Al-Aziz billah Al-Fatimi, Rumah Abu Muhammad Ibnu Hattim Al Razi Al Hafiz dan rumah Abi Sulaiman Al Sajastani.

Rumah-rumah para ulama' di atas dijadikan sebagai tempat pusat pembelajaran pada waktu itu dengan pertimbangan bahwa (a) rumah sebenarnya dapat digunakan untuk membicarakan hal-hal yang bersifat khusus (b) Situasi guru yang mengajar agak terbatas, misalnya terlalu sibuk, lelah, umur sudah tua dan lain-lain (c) Anggapan bahwa mendatangi guru untuk belajar lebih baik dari pada guru mendatangi muridnya untuk mengajar. Selanjutnya Ahmad Syalabi, mengemukakan bahwa dipergunakannya rumah-rumah ulama dan para ahli tersebut adalah karena terpaksa dalam keadaan darurat.

Rumah-rumah ulama, biasa digunakan untuk melakukan transmisi keilmuan, baik agama maupun ilmu umum dan kemungkinan lain perdebatan ilmiah. Para ulama di zaman klasik banyak yang mempergunakan rumahnya secara ikhlas untuk kegiatan belajar mengajar dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini umumnya disebabkan karena ulama yang bersangkutan tidak memungkinkan memberikan pelajaran di masjid, sedangkan para pelajar banyak yang berminat untuk mempelajari ilmu darinya (<http://edukasi.kompasiana.com>).

H. Madrasah

Madrasah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berasal dari kata *darasa* yang berarti belajar. Jadi madrasah adalah

tempat belajar bagi siswa atau mahasiswa (umat Islam). Dalam sejarah pendidikan Islam, makna dari madrasah tersebut memegang peran penting sebagai institusi belajar umat Islam selama pertumbuhan dan perkembangannya, sebab pemakaian madrasah secara definitif baru muncul pada abad ke-11. George Makdis (1981) menjelaskan bahwa madrasah merupakan transformasi institusi pendidikan Islam dari masjid ke madrasah terjadi secara tidak langsung melalui tiga tahap yaitu tahap masjid, tahap masjid-khan dan tahap madrasah.

Dalam perkembangan selanjutnya, madrasah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Adapun sekolah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis pada ilmu pengetahuan pada umumnya. Madrasah sebagai lembaga pendidikan merupakan fenomena yang merata di seluruh negara, baik pada negara-negara Islam, maupun negara lainnya yang di dalamnya terdapat komunitas masyarakat Islam.

Madrasah sebagai salah satu institusi pendidikan Islam merupakan pondasi sekaligus *prototipe* sistem pendidikan Islam saat ini. Madrasah Nizam al-Mulk, misalnya adalah madrasah yang paling populer di kalangan ahli sejarah dan kalangan masyarakat Islam. Didirikan oleh Nizam al-Muluk, seorang perdana Menteri Dinasti Salajikah pada masa pemerintahan Sultan Alp-Arshan dan Sultan Maliksyah pada tahun ke-5 H/II M yang diresmikan tahun 459 H/1067 M, di Nisabur (Haidar Putra Daulay, 2007: 94).

Dengan demikian, eksistensi madrasah pada era awal memiliki sejarah yang panjang selama perjalanan peradaban

Islam, dan berkontribusi terhadap lahirnya tradisi intelektual Islam. Ia merupakan transformasi institusi pendidikan Islam sebelumnya, seperti kuttab, rumah, masjid dan ribath. Meskipun tradisi keilmuan secara langsung tidak di institusi madrasah. dikarenakan madrasah langsung *dihandle*, oleh pemerintah, namun melalui institusi ini telah menumbuhkan kecintaan dan gairah pada intelektual Islam terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dibuktikan dari karya-karya mereka dan berbagai bidang ilmu baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan (*sains*).

Istilah madrasah pada masa klasik berbeda pada masa sekarang. Pada masa klasik madrasah disamakan dengan Universitas. Namun pada masa sekarang, madrasah merupakan fenomena baru dari lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang kehadirannya pada awal abad ke-20. Lembaga pendidikan madrasah, sejak tumbuhnya merupakan lembaga pendidikan yang mandiri, tanpa bantuan atau bimbingan dari pemerintah kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka barulah madrasah dan pesantren mulai mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam hal ini pembinaan dan tuntunan, wewenang diserahkan ke Kementerian Agama.

Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor I tahun 1952. Menurut ketentuan ini yang dinamakan madrasah ialah tempat pendidikan yang telah diatur sebagai sekolah dan memuat pendidikan serta ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pelajaran.

Jadi dapat dipahami dari beberapa pengertian di atas, bahwa madrasah adalah wadah atau tempat yang diatur untuk belajar ilmu pengetahuan agama Islam yang paling utama dan ilmu

pengetahuan keahlian lainnya. Sebelum Indonesia merdeka madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam merupakan lembaga pendidikan yang mandiri, setelah Indonesia merdeka barulah mendapatkan perhatian pemerintah. Dalam perkembangannya, madrasah berada dalam naungan Kementerian Agama.

Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam setidaknya mempunyai empat latar belakang, yaitu:

- a. Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam.
- b. Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah.
- c. Adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada Barat sebagai sistem pendidikan mereka.
- d. Sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi.

Berdasarkan catatan singkat tersebut dapat dikemukakan beberapa hal yang melatar belakangi lahirnya madrasah di Timur Tengah sebagai berikut.

- a. Madrasah lahir sejalan dengan meningkatnya bidang kajian ilmu agama Islam yang tidak mungkin lagi diajarkan di masjid.
- b. Madrasah lahir sebagai lembaga pendidikan yang mempelajari ilmu agama Islam secara lebih luas dan

mendalam dibandingkan dengan lembaga pendidikan al-kuttab yang mempelajari ilmu agama Islam secara terbatas dan tidak mendalam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor I tahun 1952, jenjang pendidikan madrasah tersusun sebagai berikut:

- a. Madrasah rendah atau sekarang lazim dikenal sebagai Madrasah Ibtidaiyah, ialah madrasah yang memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam yang menjadi pokok pelajarannya, lama pendidikan 6 tahun.
- b. Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama (*Madrasah Tsanawiyah*) ialah madrasah yang menerima murid-murid tamatan madrasah rendah atau sederajat, serta memberikan pendidikan dalam ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok pengajarannya, lama pendidikan 3 tahun.
- c. Madrasah Lanjutan Atas (*Madrasah Aliyah*) ialah madrasah yang menerima murid-murid tamatan madrasah lanjutan pertama atau yang sederajat memberikan pendidikan dalam ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok pengajarannya, lama belajar 3 tahun.

Pada tahun 1975, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Hal ini dilatar belakangi bahwa siswa-siswa madrasah sebagaimana halnya tiap-tiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pengajaran yang sama, sehingga

lulusan madrasah, yang menghendaki melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi dapat terealisasi. Adapun SKB 3 Menteri tersebut menetapkan:

- a. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan nilai ijazah sekolah umum yang setingkat.
- b. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas.
- c. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.



BAB III

MADRASAH DI INDONESIA

A. Sejarah Berdirinya Madrasah di Indonesia

1. Memahami Madrasah

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kata madrasah diambil dari akar kata *darasa* yang berarti belajar. Madrasah adalah isim makan dari kata *darasa* sehingga berarti tempat untuk belajar. Istilah madrasah sering diidentikkan dengan istilah sekolah atau semacam bentuk perguruan yang dijalankan oleh sekelompok atau institusi umat Islam (Hanafy, Muh. Sain, 2009: 174). Dalam bahasa Indonesia madrasah disebut dengan sekolah yang berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pengajaran (Hamid, Abdulloh dan Putu Sudira).

Madrasah mengandung arti tempat atau wahana anak mengenyam proses pembelajaran. Maksudnya adalah, di madrasah inilah anak menjalani proses belajar secara terarah, terpimpin, dan terkendali. Dengan demikian, secara teknis madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah. Hanya dalam lingkup kultural, madrasah ini mempunyai konotasi spesifik, yakni sebagai lembaga pendidikan yang dalam proses pembelajaran

dan pendidikannya menitikberatkan pada persoalan agama. Kata madrasah, yang secara harfiah identik dengan sekolah agama, lambat laun sesuai dengan perjalanan peradaban bangsa mengalami perubahan dalam materi pelajaran yang diberikan kepada peserta didiknya. Madrasah dalam kegiatan pembelajarannya mulai menambah dengan mata pelajaran umum yang tidak melepaskan diri dari makna asalnya yang sesuai dengan ikatan budayanya, yakni budaya Islam.

2. Sejarah Berdirinya Madrasah di Indonesia

Di Indonesia, madrasah merupakan fenomena modern yang dimulai sekitar awal abad ke-20. Tidak ada kejelasan hubungan madrasah abad ke 11-12 di Timur Tengah dengan hadirnya madrasah di Indonesia pada awal abad ke-20. Sejarah pertumbuhan madrasah di Indonesia, jika dikembalikan pada situasi awal abad ke-20, dianggap memiliki latar belakang sejarahnya sendiri, walaupun sangat dimungkinkan ia merupakan konsekuensi dari pengaruh intensif pembaharuan pendidikan Islam di Timur Tengah masa modern.

Kehadiran madrasah dipandang menjadi salah satu indikator penting bagi perkembangan positif kemajuan prestasi budaya umat Islam, mengingat realitas pendidikan, sebagaimana terlihat pada fenomena madrasah yang sedemikian maju saat itu, adalah cerminan dari keunggulan capaian keilmuan, intelektual dan kultural umat Islam.

Madrasah adalah saksi perjuangan pendidikan yang tak kenal henti. Pada jaman penjajahan Belanda madrasah didirikan untuk semua warga. Sejarah mencatat, Madrasah pertama kali berdiri di Sumatera pada tahun 1908 yaitu Madrasah *Adabiyah*,

yang dimotori oleh Abdullah Ahmad. Kemudian pada tahun 1918 berdiri *Diniyah School* oleh M. Mahmud Yunus sebagai lanjutan dari Madrasah school. Madrasah *Tawalib* didirikan Syekh Abdul Karim Amrullah di Padang Panjang pada tanggal 15 Januari 1919, sebagai hasil dari pertemuan para pelajar Muslim Padang Panjang dan Parabek, yang tujuan awalnya untuk memperdalam ilmu dan mengembangkan agama Islam. Lalu, Madrasah Nurul Iman didirikan H. Abdul Somad di Jambi.

Madrasah berkembang di Jawa mulai tahun 1912. Ada model madrasah pesantren NU dalam bentuk Madrasah *Awaliyah*, *Ibtidaiyah*, *Tsanawiyah*, *Muallimin Wustha*, dan *Muallimin Ulya* (mulai 1919), ada madrasah yang mengapresiasi sistem pendidikan Belanda plus, seperti Muhammadiyah (1912) yang mendirikan *Madrasah Ibtidaiyah*, *Tsanawiyah*, *Muallimin*, *Mubalighin*, dan *Madrasah Diniyah*. Ada juga model *Al-Irsyad* (1913) yang mendirikan *Madrasah Tajhiziyah*, *Muallimin* dan *Tahassus*, atau model Madrasah PUI di Jabar yang mengembangkan madrasah pertanian. Itulah penjelasan singkat tentang sejarah madrasah di Indonesia.

Ada dua faktor yang melatar belakangi lahir dan tumbuhnya madrasah di Indonesia, yakni faktor adanya respon terhadap politik kolonial Belanda dan faktor munculnya pembaharuan pemikiran keagamaan, yakni dengan munculnya gerakan pembaruan yang dimotori oleh tokoh intelektual muslim di berbagai daerah dan organisasi sosial keagamaan. Berkat dukungan politik pemerintah Indonesia dan dengan dikeluarkannya keputusan bersama menteri serta Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional, maka semakin memperkuat posisi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Secara rinci, faktor yang melatar belakangi tumbuhnya madrasah meliputi:

1. Sebagai manifestasi dari realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam.
2. Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah.
3. Adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada Barat sebagai sistem pendidikan mereka.
4. Sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan dari hasil akulturasi (<https://brainly.co.id>).

B. Perkembangan Madrasah di Indonesia

1. Masa Penjajahan

Pada masa pemerintah kolonial Belanda, madrasah memulai proses pertumbuhannya atas dasar semangat pembaharuan di kalangan umat Islam. Pertumbuhan madrasah sekaligus menunjukkan adanya pola respon umat Islam yang lebih progresif, tidak semata-mata bersifat defensif terhadap pendidikan Hindia Belanda. Kebijakan pemerintah Hindia

Belanda sendiri terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Dalam banyak kasus sering terjadi guru-guru agama dipersalahkan ketika menghadapi gerakan kristenisasi dengan alasan ketertiban dan keamanan (Maksum, 1999:113).

Madrasah pada masa Hindia Belanda mulai tumbuh meskipun memperoleh pengakuan yang setengah-setengah dari pemerintah Belanda. Tetapi pada umumnya madrasah-madrasah itu, baik di Minang kabau, Jawa dan Kalimantan, berdiri semata-mata karena kreasi tokoh dan organisasi tertentu tanpa dukungan dan legitimasi dari pemerintah Hindia Belanda.

Kebijakan yang kurang menguntungkan terhadap pendidikan Islam masih berlanjut pada masa penjajahan Jepang, meskipun terdapat beberapa modifikasi. Berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan Jepang membiarkan dibukanya kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup pada masa sebelumnya. Namun demikian, pemerintah Jepang tetap mewaspadaai bahwa madrasah-madrasah itu memiliki potensi perlawanan yang membahayakan bagi pendidikan Jepang di Indonesia (Maksum, 1999:114).

2. Madrasah pada Masa Orde Lama

Memasuki awal orde lama, pemerintah membentuk Departemen Agama (Kementerian Agama sekarang) yang resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usaha Kementerian Agama dalam bidang pendidikan

Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah. Disamping pada pengembangan madrasah itu sendiri.

Perkembangan madrasah pada masa orde lama sejak awal kemerdekaan sangat terkait dengan peran Kementerian Agama yang resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946, dalam perkembangan selanjutnya Kementerian Agama menyeragamkan nama, jenis dan tingkatan madrasah sebagaimana yang ada sekarang. Madrasah ini terbagi menjadi dua kelompok. **Pertama**, madrasah yang menyelenggarakan pelajaran agama 30% sebagai pelajaran dasar dan pelajaran umum 70%. **Kedua**, madrasah yang menyelenggarakan pelajaran agama Islam murni yang disebut dengan Madrasah Diniyah.

Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1950 Jo No. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah dalam pasal 2 ditegaskan bahwa Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama. Dan dalam pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan agama di sekolah bukan mata pelajaran wajib dan bergantung pada persetujuan orang tua siswa. Dengan rekomendasi ini, madrasah tetap berada di luar sistem pendidikan nasional, tetapi sudah merupakan langkah pengakuan akan eksistensi madrasah dalam kerangka pendidikan nasional.

Pada tanggal 3 Desember 1960 keluar ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang “garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana, tahapan pertama tahun 1961-1969” ketetapan ini menyebutkan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah

mulai di sekolah rakyat sampai Universitas-Universitas Negeri, dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid atau murid dewasa menyatakan keberatannya. Namun demikian, dalam kaitannya dengan madrasah ketetapan ini telah memberi perhatian meskipun tidak terlalu berarti, dengan merekomendasikan agar madrasah hendaknya berdiri sendiri sebagai badan otonom dibawah pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Madrasah pada Masa Orde Baru

Pada masa orde baru pemerintah mulai memikirkan kemungkinan mengintegrasikan madrasah ke dalam pendidikan nasional. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/4/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah ditetapkan bahwa standar pendidikan madrasah sama dengan sekolah umum, ijazahnya mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum dan lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas dan siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Lulusan Madrasah Aliyah dapat melanjutkan kuliah ke Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Agama.

Pemerintah Orde Baru melakukan langkah konkrit berupa penyusunan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam konteks ini, penegasan *definitif* tentang madrasah diberikan melalui keputusan-keputusan yang lebih operasional dan dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah tanpa menghilangkan karakter

keagamaannya. Melalui upaya ini dapat dikatakan bahwa Madrasah berkembang secara terpadu dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Pada masa Orde Baru madrasah mulai dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat kelas rendah sampai masyarakat menengah keatas. Sedangkan pertumbuhan jenjangnya menjadi 5 (lima) jenjang pendidikan yang secara berturut-turut sebagai berikut :

1. *Raudatul Athfal (Bustanul Athfal)*

Raudatul Athfal merupakan istilah yang digunakan untuk pendidikan bagi anak-anak usia dini yang bercirikan Agama Islam. Walau demikian, ada istilah lain yang sering juga digunakan yaitu *Bustanul Athfal* (BA). RA dan BA merupakan dua istilah yang berkembang di masyarakat dalam dunia pendidikan bagi anak-anak usia dini sebelum memasuki Sekolah Dasar. RA / BA adalah Taman Kanak-kanak berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan Departemen Agama (A. Malik Fajar, 1999: 68).

2. *Madrasah Ibtidaiyah*

Madrasah Ibtidaiyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran rendah serta menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum.

3. *Madrasah Tsanawiyah*

Madrasah Tsanawiyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah pertama dan menjadikan mata pelajaran agama Islam

sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum.

4. *Madrasah Aliyah*

Madrasah Aliyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah ke atas dan menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum. Dewasa ini Madrasah Aliyah memiliki jurusan-jurusan yaitu Ilmu Agama, Fisika, Biologi, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Budaya.

4. Eksistensi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional

Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah, maka strategi pengelolaan madrasah semakin mengalami kemajuan.

Berdasarkan SKB tiga Menteri tersebut, pada madrasah telah terjadi fenomena baru, yaitu dimasukkannya mata pelajaran umum dengan prosentase yang cukup tinggi, yaitu 70 % di samping mata pelajaran agama Islam. Selain itu, madrasah ditetapkan menjadi tiga tingkat, yaitu MI (*Madrasah Ibtidaiyah*) yang setingkat dengan SD, MTs (*Madrasah Tsanawiyah*) yang setingkat dengan SMP, dan MA (*Madrasah Aliyah*) yang setingkat dengan SMA. Sejak saat itu, ijazah madrasah diakui sederajat dengan sekolah umum yang setingkat.

SKB 3 Menteri tersebut merupakan legalisasi dari tuntutan zaman, sebab madrasah dituntut untuk mengikuti berbagai perkembangan sosial dan beradaptasi dengan pola hidup masyarakat. Hal inilah yang melatar belakangi sehingga madrasah-madrasah yang ada menstandarkan kurikulumnya dengan sekolah umum. Apalagi setelah terbukanya kesempatan penerangan bagi madrasah swasta, atau sekurang-kurangnya memfilialkannya dengan madrasah negeri (Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati, 2001:44).

Pada tahun 1984, terbit SKB antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama Nomor 9299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah. SKB tahun 1984 ini merupakan tindak lanjut dari SKB 3 Menteri pada tahun 1975. Tujuannya tidak hanya mensejajarkan antara sekolah umum dengan madrasah dalam penjenjangan dan mutu pendidikan, tetapi juga diupayakan penyeragaman dan pembakuan dalam struktur program dan kurikulum (Djumhur, I dan Danasuparta, 1974:121).

Sebagai konsekuensi dari status keberadaan madrasah tersebut, di satu pihak madrasah memikul tanggung jawab sebagai lembaga pendidikan umum yang sama dengan sekolah umum. Sementara itu, pada sisi lain, madrasah memiliki tanggung jawab sebagai lembaga pendidikan Islam. Dengan posisi seperti itu, maka tanggung jawab madrasah jauh lebih besar dan berat dibandingkan dengan sekolah umum yang sederajat.

5. Jenis Pendidikan di Indonesia

Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud), dahulu bernama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Depdiknas). Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan tiga tahun di sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Hamalik Oemar, 1990:87).

Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam tiga jalur utama, yaitu formal, nonformal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam empat jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Berbicara tentang jenis-jenis pendidikan di Indonesia dapat diketahui sebagai berikut:

1. Pendidikan Umum. Pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Pendidikan Kejuruan. Pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu.
3. Pendidikan Akademik. Pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu

pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu (program sarjana dan pasca sarjana).

4. Pendidikan Profesi. Pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
5. Pendidikan Khusus. Pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
6. Pendidikan Keagamaan. Pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Contohnya: Pesantren, MI, MTs, MA, MAK, Sekolah Tinggi Agama.
7. Pendidikan Khusus. Pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif. Contohnya: Sekolah Luar Biasa (http://www.depdiknas.go.id/statistik/thn04-05/TK_0405.html).

6. Jenjang dan Bentuk Pendidikan Madrasah

a. Macam-macam Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 14, jenjang pendidikan formal terdiri atas:

1. Pra-sekolah. Dari kelahiran sampai usia 3 tahun, kanak-kanak Indonesia pada umumnya tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal. Dari usia 3 sampai 4 atau 5 tahun, mereka memasuki taman kanak-kanak. Pendidikan ini tidak wajib bagi warga Negara Indonesia, tujuan pokoknya adalah untuk mempersiapkan anak didik memasuki sekolah dasar.
2. Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Setelah tamat dari sekolah dasar para siswa dapat memilih untuk masuk SMP atau MTs selama tiga tahun.
4. Sekolah Menengah Atas. Di Indonesia pada tingkatan ini terdapat tiga jenis sekolah, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA).
5. Perguruan Tinggi. Di Indonesia perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu: Negeri dan Swasta. Keduanya dipandu oleh Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Terdapat beberapa jenis lembaga pendidikan tinggi, misalnya: Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Politeknik, dan Akademi. Ada beberapa tingkatan gelar yang dapat diraih di Pendidikan tinggi yaitu: Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4), Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3).

Jenis Tingkatan	Gelar
D3	Ahli Madya
D4	Sarjana
S1	Sarjana
S2	Magister
S3	Doktor

b. Bentuk-Bentuk Pendidikan

Kegiatan pendidikan pada umumnya berlangsung di dalam suatu bentuk pendidikan. Bentuk-bentuk pendidikan merupakan suatu tempat atau lingkungan di mana anak dapat menerima sesuatu yang berada di luar diri mereka. Dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak dan lingkungan, ada yang sengaja diadakan (usaha sadar) ada yang tidak diusahakan (tidak usaha sadar) dari orang dewasa yang normatif disebut pendidikan. Sedangkan yang lainnya disebut pengaruh lingkungan yang sengaja diciptakan untuk mempengaruhi anak digolongkan ke dalam tiga bentuk yaitu:

1) Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak lahir sampai mati di dalam keluarga, dalam pekerjaan atau pergaulan sehari-hari dan yang menjadi penanggung jawab penyelenggara pendidikan adalah orang tua.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pendidikan yang dilaksanakan dalam keluarga diarahkan kepada pembentukan pembiasaan anak dengan diberi contoh dalam cerminan hidup sehari-hari dari orang tua, bagaimana cara mengucap, bertindak tanduk, bergaul dan sebagainya.

2) Pendidikan formal

Lembaga pendidikan formal adalah sekolah merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Artinya sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang disertai kewajiban memberi pendidikan, yang terikat pada tata aturan formal berprogram dan bertarget atau bersasaran yang jelas, serta memiliki struktur kepemimpinan penyelenggaraan atau pengelolaan yang resmi.

3) Pendidikan Nonformal

Pendidikan non formal adalah bentuk pendidikan yang berlangsung di dalam masyarakat. Masyarakat juga merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan pendidikan anak, karena bagaimanapun anak tidak dipisahkan dari lingkungan masyarakatnya.

Secara fungsional struktural, masyarakat ikut mempengaruhi terbentuknya sikap sosial para anggotanya, melalui berbagai pengalaman yang berulang kali. Mengingat pengalaman yang beraneka ragam, maka sikap sosial anggotanya beraneka ragam pula (http://www.depdiknas.go.id/statistik/thn04-05/SD_0405.html).

c. Jalur Pendidikan

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal (UU No. 20 tahun 2003).

1) Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini (TK/RA), pendidikan dasar (SD/MI), pendidikan menengah (SMP/MTs dan SMA/MA), dan pendidikan tinggi (Universitas). Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta. Ciri-ciri Pendidikan Formal antara lain:

- a. Tempat pembelajaran di gedung sekolah.
- b. Ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta didik.
- c. Kurikulumnya jelas.
- d. Materi pembelajaran bersifat akademis.
- e. Proses pendidikannya memakan waktu yang lama.
- f. Ada ujian formal.
- g. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah atau swasta.
- h. Tenaga pengajar memiliki klasifikasi tertentu.
- i. Diselenggarakan dengan administrasi yang seragam.

2) Pendidikan Non Formal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Seperti Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kelompok Belajar, Sanggar, dan lain-lain. Ciri-ciri Pendidikan Non-Formal antara lain:

- a) Tempat pembelajarannya bisa di luar gedung.
- b) Kadang tidak ada persyaratan khusus.
- c) Umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas.
- d) Adanya program tertentu yang khusus hendak ditangani.
- e) Bersifat praktis dan khusus.
- f) Pendidikannya berlangsung singkat.
- g) Terkadang ada ujian.
- h) Dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta.

3) Pendidikan Informal

Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Seperti: Pendidikan Agama, Budi Pekerti, Etika, Sopan Santun,

Moral dan Sosialisasi. Ciri-ciri Pendidikan Informal antara lain:

- a) Tempat pembelajaran bisa di mana saja.
- b) Tidak ada persyaratan.
- c) Tidak berjenjang.
- d) Tidak ada program yang direncanakan secara formal.
- e) Tidak ada materi tertentu yang harus tersaji secara formal.
- f) Tidak ada ujian.

Tidak ada lembaga sebagai penyelenggara (Shaleh, Abdul Rachman, 2000:25).



BAB IV

KURIKULUM DAN METODE PENGAJARAN MADRASAH

A. Kurikulum Madrasah

Kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran di sekolah atau akademi yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai sesuatu tingkatan atau ijazah. Selain itu kurikulum juga merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar, baik dalam kelas maupun di luar sekolah. Menurut Lee and Lee, *Curriculum is the strategy which we use in adapting this cultural geritage to the purpose of the school*. Sedangkan menurut Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Departemen Agama, 2005: 475).

Kurikulum merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka mempengaruhi siswa dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan. Termasuk didalamnya kegiatan belajar mengajar, strategi dalam proses belajar mengajar,

cara mengevaluasi program pengembangan pengajaran dan sebagainya. Dengan demikian, kurikulum merupakan pedoman dalam menyampaikan materi pelajaran yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pendidikan itu sendiri.

Kurikulum selalu dipengaruhi dan ditentukan oleh gagasan yang melatarbelakangi tentang manusia dan pendidikan. Kurikulum akan dipengaruhi oleh gagasan penyusun kurikulum tentang makna pendidikan yang dipikirkannya. Dalam penyusunan kurikulum tersebut harus dimuat tujuan yang harus dicapai, uraian materi secara ringkas, teknik/metode yang mungkin dipakai, alat dan sumber, kelas, lamanya waktu yang diperlukan/jam dan sebagainya yang biasanya termuat dalam satu model penyusunan program yang disebut Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP).

Menurut peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 6 ayat 1 tentang Standar Nasional Pendidikan, kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; b) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; c) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; d) kelompok mata pelajaran estetika; e) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan (Nuridin, 2005: 33).

Menurut Nuridin, ada tiga hal pokok yang menjadi landasan dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan kurikulum, yakni: (a) landasan Filosofis, (b) landasan Sosial dan Budaya, dan (c) landasan Psikologis. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada uraian berikut ini:

- a) Landasan Filosofis. Filsafat dapat diartikan sebagai cara berpikir yang mengkaji tentang objek secara mendalam melalui tiga pokok persoalan, yakni: hakikat benar salah (logika), hakikat baik buruk (*etika*), dan hakikat indah jelek (*estetika*) dan hakikat pandangan hidup manusia mencakup ketiga hal tersebut. Kaitannya dengan kurikulum dari ketiga pandangan tersebut sangat diperlukan terutama dalam menetapkan arah dan tujuan pendidikan. Dengan pengertian lain bahwa kemana arah pendidikan itu tergantung dari cara pandang hidup manusia atau yang lebih luasnya lagi cara pandang dari suatu bangsa. Setiap bangsa atau Negara mempunyai tatanan dan pandangan hidup masing-masing dan berbeda-beda sesuai dengan ideologi yang dianut. Pendidikan sebagai upaya dalam membina manusia (anak didik) tidak terlepas dari pandangan hidup, oleh karena itu segala upaya yang dilakukan oleh pendidik kepada anak didiknya harus mampu menjadi manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berbudi luhur, berkepribadian, berdisiplin, kerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani (Nurdin, 2005: 37).
- b) Landasan Sosial Budaya. Pendidikan sebagai proses budaya adalah upaya membina dan mengembangkan daya cipta, karsa dan rasa manusia menuju peradaban manusia yang lebih luas dan tinggi yaitu manusia yang berbudaya. Kurikulum pendidikan sudah sewajarnya pula disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini, bahkan harus dapat mengantisipasi kondisi-kondisi yang bakal terjadi pada masa yang akan datang. Untuk itu pula guru dituntut untuk dapat membina dan melaksanakan kurikulum, agar apa

yang diberikan kepada anak didiknya berguna dan relevan dengan kehidupan dalam masyarakat (Nurdin, 2005: 98).

- c) Landasan Psikologis. Pada dasarnya pendidikan tidak terlepas kaitannya dengan unsur-unsur psikologi, sebab pendidikan adalah menyangkut perilaku manusia itu sendiri. Mendidik berarti mengubah tingkah laku anak menjadi kedewasaan. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar selalu dikaitkan dengan teori-teori perubahan tingkah laku anak. Beberapa teori belajar antara lain: *behaviorisme*, psikologi daya, perkembangan *kognitif*, teori lapangan, teori kepribadian.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa memahami dan mempelajari teori belajar merupakan faktor penting yang harus dipelajari dan dikuasai oleh guru dalam rangka pelaksanaan pengajaran, karena sebaik apapun kurikulum yang diciptakan, namun jika guru tersebut tidak mampu menguasai psikologi dari anak didiknya maka akan sulit terjadi komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, guru harus memiliki strategi belajar mengajar yang tepat untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: (a) berpusat pada potensi,

perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, (b) beragam dan terpadu, (c) tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan (d) relevan dengan kebutuhan kehidupan, (e) menyeluruh dan berkesinambungan, (f) belajar sepanjang hayat, (g) seimbang antara kepentingan Nasional dan Daerah.

Adapun pelaksanaan kurikulum setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip yaitu: *Pertama*, pelaksanaan didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan. *Kedua*, kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. *Ketiga*, pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan dan kondisi peserta didik dengan memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ketuhanan, keindividualan, kesosialan, dan moral. *Keempat*, kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani*, *ing*

madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada. Kelima, kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. *Keenam*, kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian yang optimal. *Ketujuh*, kurikulum yang mencakup seluruh komponen-komponen mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

Sekarang pelaksanaan kurikulum di madrasah disamping melaksanakan kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), madrasah juga menerapkan kurikulum 2013, sebab salah satu tuntutan dan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan pada saat ini dan kedepan adalah pendidikan hendaknya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang utuh, yaitu kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang terintegrasi. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan memperkuat proses pembelajaran dan penilaian autentik untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dalam struktur kurikulum MTs terdapat penambahan jam belajar perminggu dari semula 32, 32, dan 32 mejadi 38, 38, dan 38 untuk masing-masing kelas VII, VIII, dan IX. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di MTs adalah tetap, yaitu 40 menit.

Ditinjau dari peraturan Menteri Agama RI no 90 tahun 2013 Bab V pasal 25 mengenai kurikulum yang menyatakan bahwa:

1. Struktur kurikulum MTs terdiri atas muatan:
 - a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olah raga; i. keterampilan/kejuruan; dan j. muatan lokal.
2. Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diorganisasikan dalam 1 (satu) atau lebih mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan (Abdul majid, 2014: 112).

Menurut Kunandar, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Menurut Muhaimin, seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Seseorang dikatakan profesional bilamana pada dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya. Disamping itu guru tidak hanya dituntut untuk profesional begitu saja, namun pemerintah juga mengalokasikan dalam APBN dan/atau APBD untuk tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru

yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama (Kunandar, 2007: 54).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XI Pasal 39 ayat (2) bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan perguruan tinggi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang guru bukan sekedar pemberi ilmu pengetahuan pada murid-muridnya di depan kelas, namun merupakan seorang guru yang dapat menjadikan murid-muridnya mampu merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang dihadapi. Kualifikasi guru turut menentukan keberhasilan pendidikan, oleh karena itu rendahnya kualifikasi tenaga pengajar atau guru dapat menunjukkan bahwa masih rendahnya mutu pendidikan. Rendahnya kualifikasi tenaga pengajar akan berdampak pada kualitas siswa yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya mutu para lulusan. Hal ini tentunya akan menghambat keberhasilan pembangunan Nasional, karena keberhasilan pembangunan Nasional tergantung dari keberhasilan dalam mengelola pendidikan Nasional. Oleh karena itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pada pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa seorang pendidik (guru) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai

agen pembelajaran yang sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa profesionalisme seorang guru dapat diukur melalui kualifikasi dan kompetensinya sebagai tenaga pendidik. Alat pengukurnya bagi guru adalah sertifikasi profesional yang dimiliki tenaga pendidik melalui sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Jadi, ketiga komponen tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ketiga komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kualifikasi akademik

Kualifikasi akademik guru dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal dapat diperoleh melalui program studi keguruan baik jenjang diploma maupun sarjana. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 29 ayat 4 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa seorang tenaga pendidik pada sekolah menengah harus memiliki kualifikasi akademi yaitu minimum Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1), latar belakang pendidikan tinggi dengan program yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, memiliki sertifikasi profesi guru untuk SMP/MTs yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Adapun kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan merupakan kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan oleh Perguruan Tinggi. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah

dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

2) Standar kompetensi guru

Menurut Kunandar, kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Kompetensi guru yang dimaksud disini yaitu kompetensi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan yang tercantum dalam pasal 28 ayat (3), meliputi: 1) Kompetensi pedagogik; 2) Kompetensi kepribadian; 3) kompetensi professional; dan 4) kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. **Kompetensi Pedagogik.** Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang tenaga pendidik yang diharapkan mampu memberikan informasi kepada anak didiknya. Kompetensi tersebut membutuhkan keahlian serta kemampuan sebagai tenaga pendidik. Kompetensi pedagogik yang dimiliki seorang guru sesuai dengan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 adalah: (a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual, (b) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, (c) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu, (d) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, (e) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, (f) memfasilitasi pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki,

(g) berkomunikasi secara efektif, simpatik dan santun dengan peserta didik, (h) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, (i) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, (j) melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

- b. **Kompetensi kepribadian.** Seorang guru dituntut memiliki kepribadian yang baik. Baik dalam bertutur kata maupun santun dalam bersikap. Oleh karena itu, guru merupakan contoh tauladan lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat yang sosoknya digugu dan ditiru, dipercaya dan dijadikan panutan. Selain itu, seorang guru juga harus memiliki kepribadian yang menyenangkan sehingga siswa yang diajarkan merasa tertarik dengan kepribadian tersebut. Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan Permendiknas Nomor 16 tahun 2007, yaitu (a) bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan Nasional Indonesia, (b) menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (c) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, (d) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri, (e) menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
- c. **Kompetensi profesional.** Guru merupakan jabatan profesi yang membutuhkan profesionalisme seorang guru, maka selayaknya seorang guru dalam melaksanakan tugasnya harus benar-benar merupakan panggilan jiwa yang mampu mengabdikan diri pada dunia pendidikan untuk waktu yang lama bahkan seumur hidup, memiliki

pengetahuan dan kecakapan/keahlian, memiliki kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif, memiliki kode etik atau norma-norma sebagai pegangan atau pedoman sebagai seorang pendidik. Profesionalisme yang dibutuhkan oleh seorang guru dalam mendidik siswa adalah kemampuan untuk merangsang potensi anak didik dan mengajarkan supaya mau belajar. Guru hanya memberikan peluang agar potensi itu dikemukakan dan dikembangkan. Dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 untuk hal-hal yang erat kaitannya dengan professional, seorang guru harus mampu: (1) menguasai bahan/materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, (2) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, (3) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, (4) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Salah satu indikator keberhasilan guru dalam pelaksanaan tugas adalah kemampuan seorang guru untuk menjabarkan, memperluas, menciptakan relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Nurdin menyatakan bahwa profesi sebagai seorang guru dituntut untuk dapat mengembangkan tugas secara professional, untuk itu seorang guru minimal harus memiliki:

Petama, menguasai silabus atau GBPP serta petunjuk pelaksanaannya. Seorang guru harus memahami aspek-aspek dari materi yang disampaikannya, yaitu: (1) tujuan yang ingin dicapai, (2) isi/materi bahan pelajaran dari setiap pokok bahasan/topik pembelajaran, (3) alokasi waktu untuk setiap topik pembelajaran/bahan pelajaran, dan (4) alat dan sumber belajar yang akan digunakan.

Kedua, seorang guru harus mampu menyusun program pembelajaran, dalam hal ini guru harus terampil dalam mengemas dan menyusun serta merumuskan bahan pengajaran itu ke dalam Satuan Acara Pembelajaran (SAP), yang dimulai dari merumuskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai sampai pada teknik evaluasi yang akan digunakan untuk menilai hasil belajar siswa.

Ketiga, seorang guru harus mampu mengelola proses belajar mengajar yaitu mampu mengimplementasikan kurikulum dengan mengaktualisasikan SAP dalam proses belajar mengajar di kelas kepada peserta didik.

Keempat, seorang guru harus jeli dalam menilai hasil belajar siswa, yaitu mengevaluasi sejauh mana siswa dapat menguasai pelajaran dalam proses belajar mengajar yang telah disampaikan kepada siswa.

- d. **Kompetensi sosial.** Kompetensi sosial dibutuhkan bagi seorang yang memiliki profesi sebagai seorang guru karena interaksinya kepada masyarakat di lingkungannya yaitu baik dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, sekolah maupun dengan orang tua murid. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu beradaptasi dengan lingkungan

sosialnya karena merupakan sosok yang ditiru; selain itu kontak sosial terhadap orang tua murid juga dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan belajar siswa di rumah. Adapun kompetensi sosial seorang guru, meliputi: (a) bersifat inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi, (b) berkomunikasi secara efektif, simpatik dan santun sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat, (c) beradaptasi di tempat bertugas di seluruh Wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya, (d) berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

3. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan yang diikuti oleh guru yang telah memiliki kualifikasi akademik yang telah ditetapkan yaitu Sarjana (S-1) atau Diploma empat (D-IV) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebagai penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Sertifikasi ini dilakukan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikasi pendidik dengan penilaian dalam bentuk portofolio, yaitu pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang menggambarkan kualifikasi bidangnya.

a) Standard Struktur Kurikulum

Kurikulum madrasah telah banyak mengalami perubahan mengikuti perkembangan kurikulum nasional yang sebagian telah melaksanakan kurikulum 2013 sesuai KMA 165 tahun 2014, dan sebagian masih menggunakan sistem Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP 2006), sebagai mana surat edaran Kementerian Agama yang diterbitkan Dirjen Pendidikan Islam no. SE/DJ.I/PP.00.6/1/2015 tentang Kurikulum Madrasah.

Sesuai dengan KMA Nomor 207 tahun 2014 bahwa Pelaksanaan Kurikulum Madrasah pada jenjang MI, MTs dan MA mulai periode semester 2 (dua) Tahun Pelajaran 2014/2015 secara umum menggunakan standar KTSP untuk mata pelajaran (Mapel) umum. Adapun untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab tetap menggunakan standar K13 sesuai dengan KMA 165 tahun 2014. Kombinasi KTSP dengan K13 (Khusus PAI dan Bahasa Arab) dimaksud berdampak terhadap penyesuaian alokasi jam tatap muka (JTM) per mata pelajaran khususnya PAI dan Bahasa Arab dan total alokasi JTM per minggu pada setiap tingkat di semua jenjang Madrasah. Penyesuaian dimaksud sebagaimana pada Lampiran Struktur Kurikulum Madrasah (KTSP) yang telah disesuaikan tersebut digunakan sebagai dasar konfigurasi sistem di Layanan SIMPATIKA (Modul Isian Jadwal Kelas) dalam hal menentukan Jumlah Tatap Muka (JTM) setiap Mata Pelajaran dan batasan maksimal total JTM yang berlaku pada setiap tingkat rombel/ kelas di seluruh jenjang MI, MTS, dan MA. Adapun untuk Tabel Struktur Kurikulum 2013 (K13) tetap sesuai dengan KMA Nomor 165 tahun 2014.

b) Pelaksanaan KTSP dan K13

Dengan diterbitkannya KMA Nomor 207 tahun 2014 maka seluruh Madrasah (MI, MTs, MA) diwajibkan menggunakan KTSP mulai semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015 kecuali bagi Madrasah yang telah ditetapkan oleh SK Dirjen Nomor 481 dan Nomor 5114 dapat menggunakan K13. Proses verifikasi dan validasi Madrasah pelaksana K13 sepenuhnya dilaksanakan oleh Admin Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) di wilayah Provinsi masing masing.

c) Struktur Kurikulum Jenjang MTs basis KTSP KMA 207

Komponen	Alokasi Waktu KTSP 2008			Alokasi waktu KTSP KMA 207		
	VII	VIII	IX	VII	VIII	IX
A. Mata Pelajaran	2	2	2	2	2	2
1. Pendidikan Agama Islam	2	2	2	2	2	2
a. Al Quran Hadis	2	2	2	2	2	2
b. Akidah Akhlak	2	2	2	2	2	2
c. Fiqih	2	2	2	2	2	2
d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4	4	4	4
4. Bahasa Arab	2	2	2	3	3	3
5. Bahasa Inggris	4	4	4	4	4	4

6. Matematika	4	4	4	4	4	4
7. Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4	4	4	4
8. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4	4	4	4
9. Seni Budaya	2	2	2	2	2	2
10. Pendidikan Jasmani	2	2	2	2	2	2
11. Keterampilan/TIK	2	2	2	2	2	2
B. Muatan Lokal *)	2	2	2	2	2	2
C. Pengembangan Diri **)	2	2	2	2	2	2
Jumlah Asal	40	40	40			
Jumlah Terbaru				41	41	41

*) Muatan Lokal dihitung sebagai Mata Pelajaran.

***) Pengembangan Diri tidak dihitung sebagai Mata Pelajaran.

Keterangan:

- 1) Berdasarkan struktur KTSP KMA 207 untuk tingkat 7, 8, dan 9 seluruhnya berbasis Mapel (tidak berlaku basis Tematik).
- 2) Khusus Bahasa Arab dihitung 3 JTM disemua tingkat sesuai dengan standar K13 basis KMA 165 tahun 2014 untuk jenjang MTs.
- 3) Pengembangan Diri tidak diperhitungkan sebagai Mata Pelajaran. Sehingga Total Jam Tatap Muka basis Mata Pelajaran per minggu dalam satu rombel diperhitungkan dengan penyesuaian, sbb:
 - a. Tingkat 7 = 41 JTM

- b. Tingkat 8 = 41 JTM
 - c. Tingkat 9 = 41 JTM
- 4) Sistem akan mendeteksi batasan maksimal JTM per Mapel pada saat proses isian Jadwal Kelas berlangsung dan mendeteksi ulang batasan maksimal JTM per minggu dalam satu kelas/rombel saat proses cetak S25a (Dirjen Pendis, 2019).

B. Metode Pengajaran di Madrasah

Secara umum materi Pendidikan dalam Madrasah Diniyah, mempunyai pembahasan yang sama dalam setiap kelas dan jenjang, hanya saja kedalaman materinya yang berbeda-beda. Bahan-bahan yang diajarkan dalam pendidikan Madrasah Diniyah ini menggunakan literatur kitab kuning. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara-cara yang dipergunakan untuk menyampaikan ajaran sampai ke tujuan. Pemahaman terhadap materi pelajaran yang akan disampaikan terhadap siswa, akan lebih mudah dicapai dengan menggunakan metode pembelajaran. Berikut ini beberapa metode pembelajaran di Madrasah Diniyah adalah sebagai berikut:

1. Metode Sorogan

Metode sorogan ini merupakan bagian yang paling sulit dari keseluruhan metode pendidikan Islam tradisional, sebab metode ini menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin pribadi dari siswa. Namun metode sorogan memang terbukti sangat efektif sebagai taraf pertama bagi seorang siswa yang bercita-cita menjadi seorang alim. Metode ini memungkinkan seorang guru mengawasi, menilai, dan membimbing secara maksimal kemampuan seorang siswa dalam menguasai bahasa Arab.

Karena dalam metode ini siswa secara bergantian membaca satu persatu dihadapan ustadz (Zamakhsari Dhofier, 2001: 28).

2. Metode *Wetonan/Bandongan*

Istilah *wetonan* ini berasal dari kata *wektu* (bahasa Jawa) yang berarti waktu, sebab pembelajaran tersebut diberikan pada waktu-waktu tertentu. Metode *wetonan* ini merupakan metode kuliah, dimana para siswa mengikuti pelajaran dengan duduk dihadapan ustadz yang menerangkan pelajaran secara kuliah, siswa menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan padanya. Istilah *wetonan* ini di Jawa Barat disebut dengan *bandongan* (Departemen Agama: 39).

3. Metode Musyawarah (*Bahtsul Masa'il*)

Metode musyawarah atau dalam istilah lain *bahtsul masa'il*, merupakan metode pembelajaran yang lebih mirip dengan metode diskusi atau seminar. Beberapa orang siswa dengan jumlah tertentu membentuk halaqah yang dipimpin langsung oleh ustadz, atau mungkin juga siswa senior, untuk membahas atau mengkaji suatu persoalan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, para siswa dengan bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau pendapatnya.

Dengan demikian, metode ini lebih menitik beratkan pada kemampuan perseorangan di dalam menganalisis dan memecahkan suatu persoalan, dengan argumen logika yang mengacu pada kitab-kitab tertentu. Musyawarah dilakukan juga untuk membahas materi-materi tertentu dari sebuah kitab yang dianggap rumit untuk memahaminya.

4. Metode Ceramah

Metode ceramah, yaitu guru memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu tertentu/waktunya terbatas dan tempat tertentu pula. Dilaksanakan dengan bahasa lisan untuk memberikan pengertian terhadap suatu masalah, karena itu cara tersebut sering juga disebut dengan metode kuliah, sebab ada persamaan guru mengajar dengan seorang dosen/maha guru memberikan kuliah kepada mahasiswa-mahasiswanya (Zakiah Daradjat, 2004: 289).

5. Metode Hafalan (*muhafazah*)

Metode hafalan ialah kegiatan belajar siswa dengan cara menghafal suatu teks tertentu dibawah bimbingan dan pengawasan ustadz. Para siswa diberi tugas untuk menghafal bacaan-bacaan dalam jangka waktu tertentu. Hafalan yang dimiliki siswa ini kemudian dihafalkan dihadapan ustadz secara periodik atau insidental tergantung kepada petunjuk ustadz yang bersangkutan. Materi pembelajaran dengan metode hafalan umumnya berkenaan dengan Al-Qur'an, *nadham-nadham* untuk *nahwu*, *shorof*, *tajwid* ataupun teks-teks *nahwu shorof* dan *fiqih*.

6. Metode Demonstrasi/Praktek Ibadah

Metode ini, adalah cara pembelajaran yang dilakukan dengan memperagakan (mendemonstrasikan) suatu keterampilan dalam hal pelaksanaan ibadah tertentu, yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok dibawah petunjuk dan bimbingan ustadz.

C. Kehidupan Siswa di Madrasah

Untuk kehidupan siswa di dalam sekolah madrasah tentunya tidak jauh berbeda dengan anak sekolah yang ada di sekolah umum lainnya, seperti bermain, belajar, olahraga seni dan pengembangan diri, namun barang tentu dalam sekolah madrasah ada beberapa yang menjadi pembeda dari sekolah lain pada umumnya diantaranya:

- a. Siswa berpakaian tertutup (*Syar'i*).
- b. Siswa lebih banyak beramal soleh seperti ber *Infaq*, zakat dan berpuasa.
- c. Lebih banyak menghafal Alquran dan Hadis.
- d. Tingkah laku selalu jadi sorotan dan patokan.
- e. Tata cara dan pola kehidupan berkiblat pada sunah Rasul.

BAB V

MANAJEMEN ADMINISTRASI MADRASAH



Dewasa ini manajemen perkantoran sudah diajarkan di dunia pendidikan dengan berbagai macam pelatihan khususnya pada bagian ketatausahaan. Karena ketatausahaan merupakan bagian yang menangani langsung mengenai data dan informasi sekolah. Jika dalam dunia perkantoran data/informasi yang ditangani atau dikelola mengenai data/informasi perusahaan, maka dalam dunia pendidikan data/informasi yang ditangani adalah mengenai data sekolah.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan Travel Haji dan Umroh, data yang ditangani dan dikelola adalah kelengkapan adminidtrasi calon jama'ah yang akan berangkat haji atau umroh seperti kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan juga Akta Kelahiran. Data-data ini nantinya akan digunakan untuk pembuatan paspor, visa dan juga arsip perusahaan. Dalam dunia pendidikan, data yang dikelola seperti surat dinas sekolah dan agenda, buku ekspedisi, buku catatan rapat sekolah, dan lain sebagainya (Suryosubroto, 2010: 104).

A. Surat Dinas Sekolah Dan Buku Agenda

Semua surat menyurat yang dilakukan dalam rangka kepentingan kehidupan dan realisasi program sekolah dapat kita sebut surat dinas. Baik surat masuk maupun surat keluar harus diinventarisasi dan didokumentasikan (dicatat) disertai arsip-arsipnya. Pencatatan surat-surat biasa menggunakan buku agenda yang perlu dibedakan antara agenda surat masuk dan surat keluar. Hal-hal yang perlu dicatat dalam agenda surat masuk ialah:

- a. Nomor urut surat,
- b. Tanggal diterima,
- c. Tanggal dan nomor surat yang diterima,
- d. Pihak pengirim/instansi,
- e. Pokok isi surat,
- f. Keterangan

Sedangkan dalam agenda surat keluar yang perlu dicatat ialah:

- a. Nomor urut surat keluar,
- b. Tanggal diterima,
- c. Alamat surat/kepada siapa,
- d. Pokok isi surat,
- e. Keterangan.

Surat dinas perlu disimpan dengan baik (diarsipkan). Cara penyimpanan dapat menggunakan map-map tertentu yang dibedakan atas pokok persoalannya, misalnya: map surat kepegawaian, map surat perlengkapan, map surat hubungan dengan masyarakat, dan lain-lain (Suryosubroto, 2010: 105).

Di dalam dunia perkantoran surat dinas ini penting untuk disimpan, atau di arsipkan. Hal ini dapat dilihat dari map-map besar (*Bindex*) berwarna hitam yang tersusun di atas lemari dengan kategorinya masing-masing. Hal ini dilakukan karena bisa saja suatu saat surat dinas ini akan diperlukan kembali baik sebagai bukti atau sebagai konfirmasi atau pun sebagai informasi kembali.

B. Buku Ekspedisi

Buku ekspedisi ialah untuk pembuktian bahwa suatu surat yang dikirimkan sudah sampai kepada alamatnya atau orang (petugas) yang disertai tanggung jawab. Yang perlu dicatat dalam buku ekspidisi adalah:

- a. Nomor surat,
- b. Alamat yang dituju,
- c. Tanggal penerimaan,
- d. Tanda tangan dan nama terang penerima.

Contoh Format Buku Ekspedisi

Nomor surat	Alamat Surat	Tanggal & No Surat	Tanggal Terima	Tanda Tangan Nama Terang Penerima

Buku ekspedisi dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman. Jika terjadi kesalahan maka tidak susah untuk mengambil kembali ataupun mengirim ulang.

C. Buku Catatan Rapat Sekolah (Notulen)

Rapat sekolah yang biasa disebut rapat dewan guru atau rapat guru perlu dicatat baik prosesnya maupun hasil atau keputusan yang diambil. Keputusan rapat adalah landasan berpijak dalam melaksanakan segala sesuatu di sekolah itu. Menurut sifatnya rapat itu mungkin bersifat rutin dan mungkin insidental. Pencatatan proses dan keputusan rapat menggunakan sebuah buku yang disebut buku notulen (buku catatan rapat).

Didalam dunia perkantoran biasanya yang menuliskan hasil rapat disebut dengan sekretaris. Tetapi dalam rapat sekolah, sekretaris ini disebut sebagai notulis yaitu orang yang menulis hasil rapat di dalam buku catatan rapat sekolah (notulen). Buku notulen ini berfungsi untuk melakukan review dari hasil rapat, baik mengenai program yang akan dilangsungkan maupun program untuk dievaluasi. Buku ini juga bisa menjadi bukti informasi untuk disampaikan kepada manajer di sekolah (kepala sekolah) jika tidak dapat hadir dalam rapat.

Contoh Format Buku Notulen

Rapat :

Hari/ Tanggal :

Hadir : orang

Tidak Hadir : 1.....

2.....

Pemimpin Rapat :

Acara Rapat : 1.....

2.....

Pembicara Rapat I :

Pembicara Rapat II :Dst. nya.

Keputusan Rapat : 1.

2.dst.

Kota, ... tgl. ...bln.... thn.

Mengetahui : Notulis,

Kepala Sekolah

.....

.....

D. Buku Pengumuman

Buku pengumuman ini dimaksudkan untuk media penyampaian informasi (pemberitahuan) yang terutama ditunjukkan kepada para guru. Tentu saja informasi ini datangny dari kepala sekolah. Adapun isi pengumuman

bermacam-macam yang pada pokoknya selalu menyangkut masalah pembinaan sekolah.

E. Kegiatan Manajemen yang didindingkan

Yang dimaksud dengan kegiatan ini adalah kegiatan pencatatan/pendataan yang kemudian hasil pencatatan tersebut dipasang atau ditempel pada dinding baik dinding kelas maupun dinding kantor guru atau kantor tata usaha sekolah. Kegiatan ini dikenal dengan manajemen didindingkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada siapapun yang melihat ketika masuk ke dalam ruangan. Pencatatan yang ditempel di dinding ini merupakan benda fisik yang sengaja dirancang atau bisa disamakan dengan infrastruktur. Menurut Hakkun Elmunsyah, Infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam suatu sistem untuk menyediakan pelayanan publik yang penting, seperti sebagai akses informasi dalam pendidikan.

BAB VI

SISTEM KEUANGAN MADRASAH



A. Manajemen Keuangan Madrasah

Manajemen keuangan madrasah sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan madrasah. Ada beragam sumber dana yang dimiliki oleh madrasah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang professional dan jujur. Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan menganut asas pemisahan antara tugas dan fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Manajer keuangan madrasah berkewajiban untuk menentukan keuangan madrasah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur madrasah serta penggunaan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan madrasah. Seorang manajer keuangan harus mempunyai pikiran yang kreatif dan dinamis, mempunyai kemampuan *strategic planning*, *strategic management* dan *strategic thinking*, memahami proses pengelolaan keuangan di madrasah, sumber-sumber keuangan madrasah, penyusunan rencana pendapatan dan belanja madrasah (RPMB), pengelolaan anggaran madrasah dan pertanggungjawaban keuangan madrasah (Mulyasa, 2007: 20).

B. Memahami Manajemen Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manajemen artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan adalah sumber daya yang diterima yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Manajemen keuangan dimaksudkan sebagai suatu manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Menurut Jones (1985), manajemen keuangan meliputi:

1. Perencanaan *financial*, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa efek samping yang merugikan.
2. Pelaksanaan (*implemmentation involves accounting*), yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat.
3. Evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan (Mulyasa, 2007: 23-24).

Menurut Maisyaroh, manajemen keuangan berarti suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan.

Menurut Departemen pendidikan nasional bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, dengan demikian manajemen keuangan madrasah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan madrasah mulai

dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan madrasah (Suryosubroto, 2004: 203).

C. Tugas Manajer Keuangan

Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi Otorisator, Ordonator, dan Bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

Kepala Madrasah, sebagai manajer berfungsi sebagai Otorisator dan dilimpahi fungsi Ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi Bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan Bendaharawan, di samping mempunyai fungsi-fungsi Bendaharawan, juga dilimpahi fungsi Ordonator untuk menguji hak atas pembayaran. Manajer keuangan madrasah berkewajiban untuk menentukan keuangan madrasah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur madrasah serta penggunaan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan madrasah.

Seorang manajer keuangan harus mempunyai pikiran yang kreatif dan dinamis. Hal ini penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang manajer keuangan berhubungan dengan masalah keuangan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan madrasah. Adapun yang harus dimiliki oleh seorang manajer keuangan yaitu strategi keuangan. Strategi tersebut antara lain:

1). *Stratategic Planning*. Berpedoman dengan keterkaitan antara tekanan internal dan kebutuhan eksternal yang datang dari luar. Terkandung unsur analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan, ekonomi dan financial.

2). *Strategic Management*. Upaya mengelolah proses perubahan, seperti: perencanaan, strategis, struktur organisasi, kontrol, strategis dan kebutuhan primer.

3). *Strategic Thinking*. Sebagai kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil secara berkesinambungan.

D. Proses Pengelolaan Keuangan di Madrasah

Komponen keuangan madrasah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan madrasah memerlukan biaya.

Dalam tataran pengelolaan Vincen P Costa, memperlihatkan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan penyampaian umpan balik.

Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan dan beberapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya.

Kegiatan pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya. Kegiatan pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan dilakukan oleh siapa. Kegiatan umpan balik merumuskan kesimpulan dan saran-saran untuk kesinambungan terselenggarakannya Manajemen Operasional Madrasah.

Muchdarsyah Sinungan menekankan pada penyusunan rencana (*planning*) di dalam setiap penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan erat dengan pola perencanaan anggaran, yang didasarkan pertimbangan kondisi keuangan, *line of business*, keadaan para nasabah/konsumen, organisasi pengelola, dan skill para pejabat pengelola. Proses pengelolaan keuangan di madrasah meliputi:

- a. Perencanaan anggaran,
- b. Strategi mencari sumber dana madrasah,
- c. Penggunaan keuangan madrasah,
- d. Pengawasan dan evaluasi anggaran,
- e. Pertanggungjawaban.

Pemasukan dan pengeluaran keuangan madrasah diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah

(RAPBM). Ada beberapa hal yang berhubungan dengan penyusunan RAPBM, antara lain:

- a) Penerimaan,
- b) Penggunaan,
- c) Pertanggungjawaban (Suryosubroto, 2004: 205).

E. Sumber-Sumber Keuangan Madrasah

1) Dana dari Pemerintah

Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dialokasikan kepada semua madrasah Negeri untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dana rutin. Besarnya dana yang dialokasikan di dalam DIPA biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa kelas I, II dan III. Mata anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan Pemerintah di dalam DIPA. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin (DIPA) harus benar-benar sesuai dengan mata anggaran tersebut.

Selain DIPA, pemerintah sekarang juga memberikan dana Bantuan Operasional sekolah/Madrasah (BOS). Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional madrasah.

2) Dana dari Orang Tua Siswa

Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran Komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat Komite madrasah. Pada umumnya dana Komite terdiri atas:

- 1) Dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di madrasah,
- 2) Dana insidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu kali selama tiga tahun menjadi siswa (pembayarannya dapat diangsur),
- 3) Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun.

3) Dana dari Masyarakat

Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota masyarakat madrasah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu madrasah. Sumbangan sukarela yang diberikan tersebut merupakan wujud dari kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantu kemajuan pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta.

4) Dana dari Alumni

Bantuan dari para Alumni untuk membantu peningkatan mutu madrasah tidak selalu dalam bentuk uang (misalnya buku-buku, alat dan perlengkapan belajar). Namun dana yang dihimpun oleh madrasah dari para alumni merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari mereka yang merasa terpanggil untuk turut mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan demi kemajuan dan pengembangan madrasah. Dana

ini ada yang diterima langsung dari alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara reuni atau lustrum madrasah.

5) Dana dari Peserta Kegiatan

Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler, seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris atau keterampilan lainnya.

6) Dana dari Kegiatan Wirausaha Madrasah

Ada beberapa madrasah yang mengadakan kegiatan usaha untuk mendapatkan dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha madrasah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh staf madrasah atau para siswa misalnya koperasi, kantin madrasah, bazaar tahunan, wartel, usaha fotokopi, dan lain-lain (Vincent P Costa, 2000: 45).

F. Penyusunan RAPBM

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) harus berdasarkan pada rencana pengembangan madrasah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBM meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan madrasah, pemeliharaan, buku, meja dan kursi. Penyusunan RAPBM tersebut harus melibatkan kepala madrasah, guru, komite madrasah, staf TU dan komunitas madrasah. RAPBM perlu disusun pada setiap tahun ajaran madrasah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa

memenuhi kebutuhan madrasah secara optimal. Prinsip penyusunan RAPBM, antara lain:

- a. RAPBM harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan.
- b. RAPBM harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas, dan dipajang di tempat terbuka di madrasah.
- c. Dalam menyusun RAPBM, madrasah sebaiknya secara saksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan madrasah. Proses Penyusunan RAPBM meliputi:
 - 1) Menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan madrasah,
 - 2) Menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai bidang yang luas cakupannya,
 - 3) Menyelesaikan analisis kebutuhan,
 - 4) Memprioritaskan kebutuhan,
 - 5) Mengonsultasikan rencana aksi yang ditunjukkan/ dipaparkan dalam rencana pengembangan madrasah,
 - 6) Mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan,
 - 7) Menggambarkan rincian (waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan, dan sebagainya),

dan mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan hingga evaluasi.

G. Pengelolaan Keuangan Madrasah yang Efektif

Pengelolaan akan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) untuk satu tahun pelajaran, para kepala madrasah bersama semua pemegang peran di madrasah pada umumnya menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Merancang suatu program madrasah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan.
- b. Melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang.
- c. Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun.
- d. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan.
- e. Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan.
- f. Menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap madrasah.
- g. Pengesahan dokumen RAPBM oleh instansi yang berwenang.

Dengan tersedianya dokumen tertulis mengenai RAPBM tersebut Kepala Madrasah dapat mengkomunikasikannya secara terbuka kepada semua pihak yang memerlukan. Sumber dana yang tersedia di dalam RAPBM dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan manajemen operasional madrasah pada tahun pelajaran yang bersangkutan. Pada umumnya pengeluaran dana yang dihimpun oleh madrasah mencakup lima kategori pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan, rehabilitasi dan pengadaan sarana/prasarana pendidikan.
- 2) Peningkatan kegiatan dan proses belajar mengajar.
- 3) Peningkatan kegiatan pembinaan kesehatan.
- 4) Dukungan biaya kegiatan madrasah dan peningkatan personil.
- 5) Kegiatan rumah tangga madrasah.

Dana yang tersedia di dalam RAPBM dapat sekaligus mencakup kegiatan untuk pengembangan madrasah. Namun demikian dana untuk keperluan pengembangan madrasah dapat disediakan secara khusus, sebagai tambahan dari RAPBM yang telah disusun. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah diprogramkan madrasah dalam satu tahun pelajaran, diperlukan tersedianya sejumlah dana tertentu pula. Berapa besarnya dana yang diperlukan oleh madrasah agar tujuan itu dapat dicapai telah dihitung secara cermat oleh setiap madrasah melalui penyusunan RAPBM. Apabila jumlah dana yang diperlukan pada satu tahun pelajaran dibagi dengan jumlah semua siswa kelas I, II dan III di madrasah itu, maka akan ditemukan Satuan Harga Per Siswa (SHPS). Jumlah dana yang diperlukan oleh

setiap madrasah sangat beragam. Jumlah siswa pada setiap madrasah pun berbeda-beda. Oleh karena itu SHPS pada masing-masing madrasah dengan sendirinya akan berbeda pula. Meskipun demikian sebenarnya harus ada suatu patokan SHPS minimal agar suatu mutu pendidikan tertentu dapat dicapai secara nasional.

H. Pengelolaan Anggaran Madrasah

Pengelola anggaran madrasah biasanya adalah kepala madrasah, tetapi bisa juga guru berpengalaman (senior) atau anggota komite madrasah. Di madrasah-madrasah yang lebih besar, mungkin ada pihak lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sebagian anggaran. Secara khusus, pengendalian anggaran terdiri dari serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan bahwa:

- a. Dana dibelanjakan sesuai rencana,
- b. Ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak,
- c. Pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia,
- d. Dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan.

Hasil analisis kebutuhan secara logis diklasifikasikan ke dalam kelompok staf, materi kurikulum, barang, jasa, pemeliharaan bangunan, dan anggaran lainnya. Pengelola anggaran madrasah diharapkan membelanjakan uang sesuai alokasi dana yang direncanakan. Setiap perubahan anggaran

harus disetujui oleh komite madrasah bila memang harus ada perubahan dalam tahun berjalan.

I. Pertanggungjawaban Keuangan Madrasah

Kepala madrasah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan madrasah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala madrasah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah maka akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah (Sulthon, 2006: 67).



BAB VII

PERBANDINGAN MADRASAH

Kajian tentang madrasah dalam dunia Islam, merupakan hal yang tidak pernah ada akhirnya. Bahkan beberapa tahun terakhir ini, madrasah mencuri perhatian dunia Barat yang ditandai dengan meningkatnya ketertarikan Barat termasuk Amerika Serikat untuk mengkaji eksistensi madrasah pasca peristiwa 11 september 2001 di USA. Setelah tragedi 11 September di USA tersebut, beberapa tulisan di media cetak dan elektronik mengindentikkan madrasah dengan “*dens of terror*”, “*Jihad Universities*” dan “*Jihad factories*” atau istilah lain seperti “militansi Islam, radikalisme dan anti Amerika. Negara-negara muslim sebagai basis madrasah menjadi sorotan utama pasca peristiwa itu. Di antara Negara-negara muslim yang dimaksud adalah Pakistan, Bangladesh, bahkan Indonesia.

Terlepas dari tuduhan di atas, sebuah kenyataan yang harus diakui bahwa institusi madrasah di berbagai negara muslim memang merupakan institusi pendidikan Islam yang mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakatnya (Nashruddin, 2015: 66). Hal ini ditandai dengan dua hal utama penting yaitu:

Pertama, Perkembangan ilmu. Madrasah dalam perkembangannya selalu menyesuaikan dengan perkembangan

ilmu pengetahuan. Pada masa awal, ilmu-ilmu yang diajarkan di madrasah sangat dominan *al-'ilm al-naqliyah* yaitu ilmu yang berkaitan dengan Alquran seperti *tafsir, qiraat, hadis, ushul fiqh* dan lain-lain. Dalam perkembangan berikutnya, terutama pada masa *khilafah Abbasiyah*, madrasah telah mengajarkan *ilm al-'Aqliyah* seperti filsafat, matematika, kedokteran dan lain-lain.

Kedua, perkembangan kebutuhan. Pada masa awal, kebutuhan utama umat Islam adalah dakwah Islam, maka sasaran madrasah lebih mengutamakan kepada pendidikan orang dewasa. Ketika penganut Islam semakin banyak, maka sasaran institusi inipun disesuaikan (Suwito, 2005: 201).

A. Insitusi Pendidikan Islam Pra Madrasah

Pengungkapan institusi pendidikan Islam pra-madrasah menjadi penting untuk menciptakan pemahaman tentang madrasah secara holistik. Bagaimanapun, sejarah berdiri madrasah merupakan transformasi dari institusi sebelumnya. Berdirinya institusi pendidikan Islam, termasuk madrasah merupakan alat dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa madrasah muncul sejalan dengan perjalanan perkembangan Islam sejak masa Rasulullah hingga saat ini.

Institusi pertama yang digunakan sebagai tempat kegiatan belajar membaca, menulis, dan menghafal Alquran sebelum berdirinya madrasah adalah *dar al-arqam* yang merupakan rumah sahabat Nabi yang letaknya di luar Makkah. Setelah Hijrah ke Madinah, kegiatan pendidikan dipusatkan di masjid Nabawi. Menurut Syalabi dan Mehdi, selain masjid, beberapa

istilah yang digunakan dalam sistem pendidikan pada periode pertama dan kedua adalah *maktab*, sekolah istana, sekolah kedai buku, *shuffah*, *halaqah*, *khan*, *ribath*, rumah sakit, toko buku, perpustakaan dan lain-lain (Maksum: 51).

Hasan Abd al-'Ali menyebutkan lima sistem pendidikan (*madaris al-tarbiyah*) dengan klasifikasi sebagai berikut: 1) sistem pendidikan mu'tazilah yang menggunakan *al-masajid*, *al-maktabat*, *hawanit*, *al-warraqin*, dan *al-muntadiyat* sebagai institusi pendidikannya. 2) sistem pendidikan *Ikhwan al-shafa* yang menggunakan *dar al-hikmah*, *al-masajid* dan pertemuan rahasia sebagai institusi pendidikannya. 3) sistem pendidikan bercorak fiqh yang menggunakan *al-katatib*, *al-madaris* dan *al-masajid* sebagai institusi pendidikannya. 4) sistem pendidikan bercorak filsafat yang menggunakan *dar al-hikmah*, *al-muntadiyat*, *hawani* dan *warraqin* sebagai institusinya. 5) sistem pendidikan yang bercorak tasawuf yang menggunakan *al-zawa*, *al-ribat*, *al-masaidan halaqat al-dzikir* sebagai institusi pendidikannya (Suwito: 200).

Dari berbagai institusi di atas, Ahmad Syalabi dalam bukunya yang berjudul *Al-tarbiyah Islamiyah, Nazumaha, Falsafatuha wa Tarikhuha* membagi menjadi dua kelompok yaitu; institusi sebelum madrasah dan institusi sesudah madrasah. Madrasah yang dimaksud di sini adalah madrasah yang didirikan oleh *Nizam al-Mulk* pada tahun 456 H (Suwito: 201).

1. Madrasah Ibtidaiyah

Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang

pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (Asrohah Harun, 2001: 38).

Dalam perkembangannya madrasah berlangsung sangat cepat. Pada pertengahan tahun 1960-an, terdapat 13.057 Madrasah Ibtidaiyah (MI), pendidikan setingkat sekolah dasar (SD) pada sistem pendidikan umum. Paling tidak terdapat 1.927.777 siswa yang mendaftarkan diri di MI. Pada pendidikan tingkat lanjutan pertama atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) terdapat 776 madrasah dengan 87.932 siswa. Sedangkan di tingkat berikutnya atau Madrasah Aliyah (MA) terdapat 16 madrasah dengan 1.881 siswa. Jumlah peserta pendidikan ini merupakan angka yang luar biasa bagi sejarah pendidikan di Indonesia.

Di tahun 1966, pemerintah mengizinkan madrasah swasta berubah statusnya menjadi madrasah negeri. Alhasil, ada 123 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 182 Madrasah Tsanawiyah (MTs.), dan 42 Madrasah Aliyah (MA) yang menjadi madrasah negeri. Konsekuensi, manajemen madrasah secara total bergeser dari masyarakat ke pemerintah. Meskipun demikian, sekitar 90 persen madrasah masih dikelola masyarakat setempat dengan bentuk yayasan. Secara legal, madrasah sudah terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sekarang telah digantikan dengan

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Perkembangan madrasah kemudian berlangsung cepat.

Di tingkat MI, siswanya mencapai 11 persen dari total siswa tingkat dasar. Di tahun 2019/2020, terdapat 25.579 MI dan sekitar 93,3 persennya diselenggarakan oleh pihak swasta. Melihat kenyataan tersebut sudah tidak diragukan lagi bahwa Madrasah dalam hal ini Madrasah setingkat Ibtidaiyah (MI) memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan. Apalagi dilihat secara historis, Madrasah memiliki pengalaman yang luar biasa dalam membina dan mengembangkan masyarakat. Bahkan, Madrasah mampu meningkatkan perannya secara mandiri dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat di sekelilingnya.

Proses pengembangan dunia Madrasah dalam hal ini Madrasah setingkat Ibtidaiyah (MI) selain menjadi tanggung jawab internal Madrasah, juga harus didukung oleh perhatian yang serius dari proses pembangunan pemerintah. Meningkatkan dan mengembangkan peran serta Madrasah dalam proses pembangunan merupakan langkah strategis dalam membangun masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Terlebih, dalam kondisi yang tengah mengalami krisis (*degradasi*) moral. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral, harus menjadi pelopor sekaligus inspirator pembangkit moral bangsa. Sehingga, pembangunan tidak menjadi hampa melainkan lebih bernilai dan bermakna.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaan

Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebenarnya memiliki tempat yang istimewa. Namun, kenyataan ini belum disadari oleh mayoritas masyarakat muslim, karena kelahiran Undang-Undang ini masih amat belia dan belum sebanding dengan usia perkembangan Madrasah di Indonesia. Keistimewaan Madrasah dalam sistem pendidikan nasional dapat kita lihat dari ketentuan dan penjelasan pasal-pasal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketentuan ini tentu saja sudah berlaku dan diimplementasikan di Madrasah. Madrasah sudah sejak lama menjadi lembaga yang membentuk watak dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia (Indonesia, 2003).

Secara khusus, ketentuan tentang pendidikan keagamaan ini dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan: (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi

mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/ atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan Diniyah, Madrasah, dan bentuk lain yang sejenis. Bahkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Standar Kompetensi Lulusan dijelaskan pada pasal 26 bahwa Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Dalam kaitan tersebut di atas, keberadaan Madrasah Ibtiaiyah (MI) menjadi sangat strategis dalam hal pembinaan Akhlak mulia karena sejak awal Madrasah Ibtiaiyah (MI) telah concern dalam pembinaan Akhlak dan moral para peserta didiknya (Indonesia, 2003).

2. Madrasah Tsanawiyah

Madrasah memiliki sejarah panjang sebagai lembaga pendidikan di dunia Islam khususnya Indonesia (Abdurrahman Mas'Ud, 2004: 78). Dengan adanya peraturan pemerintah terhadap sistem pendidikan nasional, maka lembaga pendidikan Islam dituntut untuk menjalankan fungsinya agar dapat melaksanakan dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diproyeksikan untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Khususnya

dalam mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa, maka pendidikan Islam dan pendidikan keagamaan memiliki kontribusi penting dalam sistem pendidikan nasional.

Sejak Indonesia merdeka, telah terjadi proses perkembangan madrasah kepada tiga fase, *pertama*, madrasah pada periode ini adalah dibatasi dengan pengertian yang tertulis pada peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1946 dan peraturan Menteri Nomor 7 tahun 1950 yaitu madrasah mengandung makna: a) tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajaran, b) pondok pesantren yang memberikan pendidikan setingkat dengan madrasah (Abdurrahman Mas'Ud, 2004: 80).

Berkaitan dengan kesamaan status, pada saat ini kebijakan baru pemerintah menetapkan keberadaan madrasah dipandang sebagai sekolah umum yang bercirikan agama Islam dengan tanggungjawab mencakup; (1) sebagai lembaga pencerdasan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia, (2) sebagai lembaga pelestarian budaya keIslaman bagi masyarakat Indonesia, (3) lembaga pelopor bagi peningkatan kualitas masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia.

Kehadiran Madrasah Tsanawiyah sebagai lembaga pendidikan Islam setidaknya mempunyai empat latar belakang, yaitu (1) sebagai manivestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam, (2) usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesempatan

kerja dan memperoleh ijazah, (3) adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada Barat sebagai sistem pendidikan mereka dan, (4) sebagai upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi (Haidar Putra Daulay, 2004: 66).

Madrasah Tsanawiyah sebagai lembaga pendidikan umum perlu dikembangkan peran dan fungsinya agar pembinaan peserta didik dapat berlangsung optimal, tentu dengan manajemen dan kepemimpinan madrasah yang baik. Dimana untuk memanej lembaga pendidikan Madrasah Tsanawiyah meliputi pemberdayaan personil madrasah, perbaikan kurikulum, pembinaan pribadi, keterampilan dan disiplin siswa, serta mengembangkan sarana dan prasarana yang diupayakan serta optimalisasi melalui upaya membangun hubungan baik dengan masyarakat akan terwujud manakala pemimpin madrasah berorientasi pada peningkatan kualitas.

3. Pondok Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua. Pesantren difungsikan sebagai suatu lembaga yang dipergunakan untuk penyebaran agama dan tempat mempelajari pendidikan agama Islam. Pesantren juga bergerak di bidang usaha pembinaan tenaga-tenaga bagi pengembangan agama. Kemampuan pondok pesantren bukan hanya pembinaan pribadi muslim, melainkan dalam usaha mengadakan perubahan sosial. Pengaruh pondok pesantren tidak saja terlihat pada kehidupan santri dan alumni, melainkan juga meliputi kehidupan masyarakat sekitarnya. Pesantren juga menjadi bagian integral sistem pendidikan,

berarti merupakan pendidikan keagamaan Islam yang juga diatur dalam sistem pendidikan nasional.

Lembaga pendidikan Pondok Pesantren adalah salah satu dari sekian sistem pendidikan yang ada di Indonesia dengan ciri yang khas dan unik, juga dianggap sebagai sistem pendidikan paling tua di Indonesia yang telah diakui kualitasnya dilihat dari segi kemampuannya dalam mencetak kader-kader bangsa yang handal dan mumpuni, baik dalam bidang agama sebagaimana lazimnya ataupun dalam pentas kepemimpinan nasional (Haidar Putra Daulay, 2004: 68).

Menilik asal mula keberadaan Pesantren di Indonesia, sebagian kalangan ahli mengasumsikan bahwa pesantren adalah pola pendidikan Islam yang diadopsi dari pola pendidikan zaman sebelum kedatangan Islam yang di kenal dengan istilah *cantrik*, dimana pola pendidikan ini telah diIslamkan oleh para *da'i* Islam di awal kedatangannya.

Menurut pandangan sebagian masyarakat asumsi tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Hal tersebut bila ditelusuri melalui komparasi kedua sistem tersebut (sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan zaman pra Islam) dimana materi pengajaran dalam cantrik lebih mengedepankan pada pelatihan fisik yang dalam istilah kunonya biasa disebut ilmu "*kanuragan*" (<http://id.m.wikipedia.org>). Sedangkan materi yang diajarkan dalam pesantren pada umumnya lebih bersifat ilmu pengetahuan keagamaan. Kenyataan tersebut memberi gambaran yang jelas bahwa ada titik perbedaan yang jauh antara pola pendidikan cantrik dan pola pendidikan pesantren (Harjanto, 2005: 35).

4. Madrasah Aliyah

Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia pada awalnya bermaksud berdagang dengan saudagar-saudagar dari Nusantara, tetapi demi memenuhi kepentingan dan melihat kesempatan yang ada secara berangsur-angsur tapi pasti Belanda mulai menancapkan kukunya di Indonesia, mengatur kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia dan menjajahnya.

Dunia pendidikan di Indonesia tidak luput dari campur tangan dan tekanan Belanda. Bentuk campur tangan dan tekanan yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pendidikan model barat dengan kesempatan sangat terbatas bagi pribumi, pembatasan ruang gerak guru-guru pelajaran agama Islam dan mengabaikan hasil didikan lembaga pendidikan Islam yang ada pada waktu itu. Lulusan atau keluaran lembaga pendidikan Islam masih dianggap buta huruf yang tentu saja tidak bisa menjadi pegawai dan dicurigai sebagai orang-orang cenderung akan melawan kepada pemerintah Belanda (Hasbullah, 2001: 42).

Pendidikan kolonial sangat berbeda dengan sistem pendidikan tradisional Islam, bukan saja metode, tapi juga dari segi isi dan tujuan. Pendidikan pemerintah Belanda hanya mengajarkan pengetahuan dan keterampilan duniawi. Sedangkan pendidikan tradisional Islam hanya di bidang agama dalam pengertian sempit.

Sebenarnya tujuan pemerintah Belanda menyelenggarakan pendidikan rakyat bukan untuk mencerdaskan rakyat di daerah jajahannya, tapi lebih cenderung untuk memperkuat posisinya di Nusantara ini. Melalui pendidikan ini diharapkan dapat menanamkan ide-ide penjajahan agar tidak menimbulkan perlawanan terhadap Belanda. Juga diharap menghasilkan tenaga

yang dapat dipekerjakan pemerintah Belanda dengan upah yang kecil.

Sementara itu pendidikan tradisional Islam Indonesia melalui pesantren dan surau agaknya identik dengan pengajian kitab-kitab ahli mazhab tertentu dan mengabaikan ”pembelajaran Al-Qur’an dan Hadis.” Lebih dari itu bidang-bidang studi non keagamaan (memang tidak tersedia dalam kitab-klasik) tidak diajarkan sama sekali (Hasbullah, 2001: 45).

Eksistensi pendidikan tradisional Islam di Nusantara ditantang oleh kehadiran lembaga-lembaga pendidikan Barat yang sekuler. Respon awal tantangan ini lebih bersifat isolatif, dimana pendidikan Islam lebih mengasingkan diri dari pengaruh pendidikan modern, kecuali beberapa daerah khususnya Minangkabau karena pembaharuan Islam telah mulai awal abad ke 19, tapi kemudian secara pasti madrasah-madrasah tumbuh di berbagai wilayah di Indonesia.

Tumbuh dan berkembangnya madrasah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan tumbuh dan berkembangnya ide-ide pembaharuan pemikiran para ulama dari beberapa daerah di Indonesia. Sejarah juga mencatat bahwa orang-orang Indonesia yang mengenyam sekolah Belanda mengenal model pendidikan Barat yang berbentuk klasikal dan mata pelajaran ilmu pengetahuan umum melahirkan intelektual baru khususnya dalam bidang pendidikan (Maksum, 1999: 89).

Dari keterangan di atas menarik untuk dicatat bahwa salah satu karakteristik madrasah yang cukup penting di Indonesia pada awal pertumbuhannya ialah bahwa di dalamnya tidak ada konflik atau upaya mempertentangkan ilmu-ilmu agama dengan

ilmu-ilmu umum. Atas dasar itu lahir dan berkembanglah Madrasah Aliyah di Indonesia.

B. Perbandingan Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Atas

Madrasah di Indonesia secara historis juga memiliki karakter yang sangat populis (merakyat), berbeda dengan madrasah pada masa klasik Islam. Madrasah di Indonesia mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Madrasah Aliyah sama tingkatannya dengan Sekolah Menengah Umum.

Madrasah Aliyah (MA) adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Menengah Atas, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Pendidikan MA ditempuh dalam waktu tiga tahun, mulai dari Kelas 10 sampai Kelas 12 (Mulkan, Munir, 2007: 61).

Pada tahun kedua (yakni Kelas 11), seperti halnya siswa SMA, siswa MA memilih salah satu dari empat jurusan yang ada, yaitu Ilmu Alam, Ilmu Sosial, Ilmu-ilmu Keagamaan Islam, dan Bahasa. Pada akhir tahun ketiga (yakni Kelas 12), siswa diwajibkan mengikuti Ujian Nasional (dahulu Ebtanas) yang mempengaruhi kelulusan siswa. Lulusan MA dapat melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Agama (Islam) atau Perguruan Tinggi Umum atau langsung bekerja. MA sebagaimana SMA, ada MA umum yang sering dinamakan MA dan MA kejuruan (di SMA disebut SMK) misalnya Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) dan Madrasah Aliyah Program Keterampilan (MAPK).

Pelajar MA umumnya berusia 16-18 tahun. SMA/MA tidak termasuk program wajib belajar pemerintah, sebagaimana siswa Sekolah Dasar (atau sederajat) 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat) 3 tahun.

Tujuan Madrasah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Sekolah Menengah Atas (disingkat SMA), adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat). Sekolah Menengah Atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari Kelas 10 sampai Kelas 12. Pada tahun ajaran 1994/1995 hingga 2003/2004, sekolah ini disebut *Sekolah Menengah Umum* (SMU) (Mulkan, Munir, 2007: 65).

Pada tahun kedua (yakni Kelas 11), siswa SMA dapat memilih salah satu dari 3 jurusan yang ada, yaitu Sains, Sosial, dan Bahasa. Pada akhir tahun ketiga (yakni Kelas 12), siswa diwajibkan mengikuti Ujian Nasional (dahulu Ebtanas) yang mempengaruhi kelulusan siswa. Lulusan Sekolah Menengah Atas dapat melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Umum atau ke Perguruan Tinggi Agama atau langsung bekerja.

Pelajar SMA umumnya berusia 15-18 tahun. SMA tidak termasuk program wajib belajar pemerintah yakni Sekolah Dasar (atau sederajat) 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat) 3 tahun meskipun sejak tahun 2005 telah mulai diberlakukan program wajib belajar 12 tahun yang

mengikutsertakan SMA di beberapa daerah, contohnya Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

Kurikulum sekolah dan madrasah kalau merujuk pada Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi dan Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 Standar Kompetensi Lulusan, maka tidak ada perbedaannya, hanya saja kurikulum madrasah juga harus memperhatikan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor: DJ.II.1/PP.OO/ED/681/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang pelaksanaan Standar Pelaksanaan Standar Isi, yang di dalamnya juga ditetapkan struktur kurikulum madrasah. Sebagai contoh kurikulum untuk sekolah dan madrasah.

Tabel
Struktur kurikulum SMA/MA kelas

Komponen		Smt I	Smt II
A.	1. Pendidikan Agama Islam	2	2
	2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2
	3. Bahasa Indonesia	4	4
	4. Bahasa Inggris	4	4
	5. Matematika	4	4
	6. Fisika	2	2
	7. Biologi	2	2
	8. Kimia	2	2
	9. Sejarah	1	1
	10. Geografi	1	1
	11. Ekonomi	2	2
	12. Sosisologi	2	2

	13. Seni Budaya	2	2
	14. Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan	2	2
	15. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2
	16. Keterampilan/Bahasa Asing	2	2
B	Muatan Lokal	2	2
C	Pengembangan Diri	2	2
	Jumlah	38	38

Sumber: Permendiknas No. 22 Tahun 2006

Tabel
Struktur kurikulum MA kelas X

Komponen		Smt I	Smt II
A.	1. Pendidikan Agama Islam	4	4
	2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2
	3. Bahasa Indonesia	4	4
	4. Bahasa Inggris	4	4
	5. Bahasa Arab	2	2
	6. Matematika	4	4
	7. Fisika	2	2
	8. Biologi	2	2
	9. Kimia	2	2
	10. Sejarah	1	1
	11. Geografi	1	1
	12. Ekonomi	2	2

	13. Sosisologi	2	2
	14. Seni Budaya	2	2
	15. Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan	2	2
	16. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2
	17. Keterampilan/Bahasa Asing	2	2
B	Muatan Loka	2	2
C	Pengembangan Diri	2	2
	Jumlah	42	42

Sumber: Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.II.1/PP.OO/ED/681/2006

C. Keunggulan dan Problema Madrasah Aliyah

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pada awalnya Madrasah adalah pendidikan yang mempunyai "dua misi" yaitu sebagai lembaga pendidikan agama dan sebagai pendidikan umum dan hal ini tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaan. Sebagai lembaga pendidikan agama paling tidak ada tiga hal yang menjadi titik fokus MA, yaitu:

1. Menanamkan keimanan kepada peserta didik. Iman menjadi hal yang sangat urgen dalam kehidupan seorang muslim dan akan menjadi landasan semua perbuatan yang lain, sehingga penanaman keimanan menjadi sangat penting.
2. Praktikum ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah*. Ibadah merupakan bagian terpenting setelah keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi setiap orang tua yang

mengamanahkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan agama Islam, sangat berharap adanya pemahaman yang bertambah tentang ibadah dan bertambah semangat dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Akhlak karimah. Sudut pandang yang masih melekat di masyarakat secara umum bahwa anak yang mengenyam pendidikan agama (baca MA) adalah anak yang terpelajar, pandai dan berakhlak baik. Akhlak yang baik merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dari sebuah pendidikan (Daulay, Haidar Putra, 2001: 47).

Tetapi tataran pelaksanaan selanjutnya pendidikan yang dilakukan di MA menimbulkan berbagai persoalan, diantaranya:

1. Pendidikan MA yang merupakan lembaga pendidikan menengah sebagai harapan bagi para orang tua yang tidak memasukkan anaknya di pesantren, setidaknya hasil yang diharapkan tidak jauh dari pendidikan pesantren. Akan tetapi pada kenyataannya sangat jauh dari harapan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang tidak berbeda dengan sekolah menengah atas (SMA) seperti waktu belajar, disiplin siswa dan tata tertib sekolah.
2. Tertib ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah yang diharapkan tertanam dan terealisasi lebih baik dalam perilaku ibadah sehari-hari dan sifat sosial lebih tinggi jika dibandingkan dengan siswa SMA yang mempelajari agama di ruang kelas hanya dua jam pelajaran saja. Namun hal itu tidak terlihat perbedaan yang besar antara siswa MA dan SMA.

3. Pendidikan MA, masih berorientasi pada mensukseskan kurikulum semata. Pada kurikulum umum, pendidikan yang dilakukan MA belum mampu mengalahkan keunggulan SMA. Hal itu dapat terlihat pada olimpiade mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, ekonomi dan sebagainya. Sedangkan di sisi pembentukan akhlak sebagai komponen penting dalam kehidupan beragama belum menampilkan hasil yang menonjol bila dibandingkan dengan sekolah umum.

Melihat persoalan di atas jalan keluar yang mungkin dapat dilakukan oleh MA adalah membuat suasana dan lingkungan yang Islami sehingga pelajaran agama tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi merupakan praktek dalam kehidupan sehari-hari (Daulay, Haidar Putra, 2001: 48).

D. Perbandingan Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren

1) Sejarah Awal Terbentuknya Pondok Pesantren

Kata pesantren berasal dari kata "*pe-santri-an*". Awalan *pe* dan akhiran *an* yang diletakan pada kata *santri* ini bisa menyisaratkan dua arti. Pertama. Pesantren bisa bermakna tempat santri, sama seperti pemukiman (tempat mukim), pelarian (tempat pelarian diri), peristirahatan (tempat beristirahat), pemondokan (tempat mondok), dan lain-lain (Hasbullah, 1995: 67).

Kedua, kata pesantren juga bisa bermakna proses menjadikan santri, sama seperti kata pencalonan (proses menjadikan calon), pemanfaatan (proses memanfaatkan sesuatu), pendalaman (proses memperdalam sesuatu) dan lain sebagainya (Meutia, 2012).

Pembangunan suatu pesantren didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga pendidikan lanjutan. Namun demikian, faktor guru yang memenuhi persyaratan keilmuan yang diperlukan akan sangat menentukan bagi tumbuhnya suatu pesantren. Pada umumnya berdiri suatu pesantren yang diawali seorang Guru atau Kiyai. Karena keinginan menuntut dan memperoleh ilmu dari Guru tersebut, maka masyarakat sekitar, bahkan dari luar daerah datang kepadanya untuk belajar. Mereka lalu membangun tempat tinggal yang sederhana di sekitar tempat tinggal guru tersebut. Semakin tinggi ilmu seorang guru tersebut, semakin banyak pula orang dari luar daerah yang datang untuk menuntut ilmu kepadanya dan berarti semakin besar pula pondok dan pesantrennya.

2) Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam

Dalam mekanisme kerjanya, sistem yang ditampilkan pondok pesantren mempunyai keunikan dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam pendidikan pada umumnya, yaitu:

- a. Memakai sistem tradisional yang mempunyai kebebasan penuh dibandingkan dengan sekolah modern, sehingga terjadi hubungan dua arah antara santri dan kiyai.
- b. Kehidupan di pesantren menampakkan semangat demokrasi karena mereka praktis bekerja sama mengatasi problem nonkurikuler mereka.
- c. Para santri tidak mengidap penyakit simbolis, yaitu perolehan gelar atau ijazah, karena sebagian besar pesantren tidak mengeluarkan ijazah.

- d. Sistem pondok pesanten mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri dan keberanian hidup.
- e. Alumni pondok pesantren tidak ingin menduduki jabatan pemerintahan, sehingga mereka hampir tidak dapat dikuasai oleh pemerintah (Hasbullah, 1995: 68).

3) Sistem Pendidikan dan Pengajaran Pesantren

Sejarah perkembangan pondok pesantren memiliki model-model pengajaran yang bersifat nonklasikal, yaitu model sistem pendidikan dengan menggunakan metode pengajaran *sorogan* dan *wetonan* atau *bendungan* (Menurut Istilah dari Jawa Barat). Sorogan, disebut juga sebagai cara mengajar perkepala yaitu setiap santri mendapat kesempatan tersendiri untuk memperoleh pembelajaran secara langsung dari Kiyai. Dengan cara sorogan ini, pelajaran diberikan oleh pembantu Kiyai yang disebut “*Badal*”. Mula-mula Badal tersebut membacakan matan kitab yang tertulis dalam bahasa arab, kemudian menerjemahkan kata demi kata ke dalam bahasa daerah, dan menerangkan maksudnya, setelah itu santri disuruh membaca dan mengulangi pelajaran tersebut satu persatu, sehingga setiap santri menguasinya. Para santri duduk di sekitar Kiyai dengan membentuk lingkaran, dengan cara bendungan ini Kiyai mangajarkan kitab tertentu pada sekelompok santri.

Metode ini sering disebut dengan metode *bendungan* atau *halaqah*. Dimana baik Kiyai maupun santri dalam halaqah tersebut memegang kitab masing-masing. Kiyai membacakan teks kitab, kemudian menerjemahkannya kata demi kata, dan menerangkan maksudnya. Santri menyimak kitabnya masing-

masing dan mendengarkan terjemahan dan penjelasan kiyai. Kemudian santri mengulang dan mempelajari kembali secara sendiri-sendiri.

4) Madrasah Modern

Kata "*madrasah*" dalam bahasa Arab adalah bentuk kata "keterangan tempat" dari akar kata "*darasa*". Secara harfiah "madrasah" diartikan sebagai "tempat belajar para pelajar", atau "tempat untuk memberikan pelajaran". Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata "madrasah" memiliki arti "sekolah" kendati pada mulanya kata "sekolah" itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing, yaitu *school* atau sekolah. Sungguhpun secara teknis, yakni dalam proses belajar-mengajarnya secara formal, madrasah tidak berbeda dengan sekolah, namun di Indonesia madrasah tidak lantas dipahami sebagai sekolah, melainkan diberi konotasi yang lebih spesifik lagi, yakni "Sekolah Agama", tempat di mana anak-anak didik memperoleh pembelajaran tentang seluk-beluk agama dan keagamaan Islam (Muhammad Tholhah hasan, 1986: 70).

5) Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Islam

Mulai didirikan dan berkembang di dunia Islam sekitar abad ke 5 H/abad ke 10-11 M. Ketika penduduk Naisabur mendirikan lembaga pendidikan Islam model madrasah tersebut pertama kalinya. Akan tetapi tersiarnya justru melalui menteri dari kerajaan Bani Saljuk yang bernama "Nizham Al-Mulk" yang mendirikan madrasah "Nizhamiyah" tahun 65 M yang oleh Gibb dan Kramers disebutkan, bahwa setelah madrasah Nizham Al-Mulk ini didirikan madrasah terbesar

oleh Shalahuddin Al-Ayyubi. Pada awal perkembangan pendidikan Islam, telah terdapat 2 jenis lembaga pendidikan dan pengajaran, yaitu:

Kuttab, yang mengajarkan kecakapan menulis dan membaca Al-Qur'an serta dasar-dasar agama Islam kepada anak-anak, dan merupakan pendidikan tingkat dasar.

Masjid, dalam bentuk halaqah, yang memberikan pendidikan dan pengajaran tentang berbagai macam ilmu pengetahuan pada masa itu, dan merupakan tingkat pendidikan lebih lanjut (Muhammad Tholhah hasan, 1986: 72).

Dalam rangka menampung kegiatan halaqah yang semakin banyak, sejalan dengan meningkatnya jumlah pelajar dan bidang ilmu pengetahuan yang diajarkan, maka dibangun ruang-ruang khusus untuk kegiatan halaqah-halaqah tersebut di sekitar masjid. Kemudian pada perkembangan selanjutnya adalah dibangunnya ruang khusus untuk para guru dan pelajar, sebagai tempat tinggal dan tempat kegiatan belajar mengajar setiap hari secara teratur, yang disebut *zawiyah* atau *ribath*.

6) Sistem Pendidikan dan Pengajaran di Madrasah

Sistem pendidikan dan pengajaran yang digunakan pada madrasah merupakan perpaduan antara sistem pondok pesantren dengan sistem yang berlaku pada sekolah-sekolah modern. Proses perpaduan tersebut berlangsung secara berangsur-angsur, mulai dari mengikuti sistem klasikal, sistem pengajian kitab, diganti dengan bidang-bidang pelajaran tertentu, walaupun masih menggunakan kitab-kitab yang lama. Dalam perkembangannya, kurikulum pada madrasah

dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan kemajuan zaman (Sulthon, 2006: 88).

7) Sekolah Umum, Madrasah dan Pondok Pesantren

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.

2. Pesantren

Sebagaimana telah diuraikan di atas Pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe dan akhiran an, berarti tempat tinggal santri. Pendapat lain, menyatakan Pesantren berasal dari kata santri yaitu seseorang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian pesantren mempunyai arti, tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam. Ada juga yang mengartikan Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bersifat “*tradisional*” untuk mendalami ilmu tentang agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian.

3. Madrasah

Seperti yang diketahui bahwa “*madrasah*” dalam bahasa Arab adalah bentuk kata “keterangan tempat” (*zharaf makan*) dari akar kata “*darasa*”. Secara harfiah “madrasah” diartikan sebagai “tempat belajar para pelajar”, atau “tempat untuk

memberikan pelajaran”. Madrasah merupakan *isim makan* dari kata *darasa* yang berarti tempat duduk untuk belajar. Istilah madrasah ini sekarang telah menyatu dengan istilah sekolah atau perguruan (terutama perguruan Islam). Karenanya istilah madrasah tidak hanya diartikan sekolah dalam arti sempit tetapi juga bisa dimaknai rumah, istana, kuttab, perpustakaan, surau, masjid, dan lain-lain. Bahkan juga seorang ibu bisa dikatakan sebagai madrasah pemula.

4. Sekolah

Kata sekolah berasal dari bahasa latin: *skhole, scola, scolae* atau *skhola* yang memiliki arti waktu luang atau waktu senggang, dimana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi dalam kegiatan scola anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajaran di atas.

E. Perbedaan Pesantren, Madrasah dan Sekolah

BIDANG	PESANTREN	MADRASAH	SEKOLAH
Pendiri	Kiyai	Masyarakat	Pemerintah
Sejarah	Masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke 13 M	Penjembatan antara Pesantren dengan Sekolah, didirikan pada masa penjajahan Jepang tahun 1945	Didirikan oleh bangsa Belanda tahun 1870
Tujuan	Menguasai al-Qur'an dan Hadis	Keilmuan Islami	keilmuan
Kurikulum	Tidak memakai kurikulum	Memakai kurikulum	Memakai kurikulum
Materi	Kitab-kitab kuning, al-Qur'an, Al-Hadis dan Bahasa Arab	SKI, Aqidah, B. Arab, Fiqh, Al-Qur'an, dan Al-Hadis serta pelajaran umum	Pelajaran umum, pelajaran agama hanya 2 jam dalam seminggu
Metode	Weton dan Sorongan	Metode Mengajar	Metode Belajar
Evaluasi	Dengan Lisan	Lisan dan Tulisan	Lisan dan Tulisan

Kelebihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat diadopsi oleh anak-anak, remaja dan dewasa. 2. Penanaman pengawasan akhlak. 3. Hubungan emosional yang baik antara keluarga pesantren. 4. Terbentuknya rasa empati dan keikhlasan, kejujuran yang tinggi. 5. Lulusan mampu membaca kitab kuning/klasik dan berbahasa Arab 6. Biaya pendidikan terjangkau dan murah. 7. Menjadi solusi pendidikan rakyat miskin. 8. Penta'ziman terhadap kiyai yang tinggi. 9. Pemupukan Life skill siswa baik dengan bercocok tanam maupun keterampilan lainnya. 10. Dana pendidikan dari Kiyai atau Santri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa mendapatkan ilmu agama sekaligus ilmu umum. 2. Dapat menjembatani Pesantren dengan sekolah. 3. Pendidikan umum yang hilang ke-Islamananya. 4. Dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan umum. 5. Mendapat ijazah setara dengan sekolah umum. 6. Pendidikan Islam yang mengadopsi kurikulum dari Dinas Pendidikan. 7. Dibawa wewenang kementerian agama. 8. Dana pendidikan dari masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkualitasnya pendidikan umum. 2. Mampu bersaing dengan tuntutan percepatan keilmuan global. 3. Pendidikannya terkesan bersifat kognitif. 4. Pencitraan yang bagus dikalangan masyarakat. 5. Infut pada sekolah cenderung berkualitas. 6. Pengajar umum yang berkualitas. 7. Dibawa wewenang kementerian Pendidikan. 8. Dana pendidikan dari Pemerintah dan siswa.
-----------	--	---	---

Kekurangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status ijazah yang tidak diakui bahkan tidak mendapat ijazah. 2. Pendidikan yang tidak ada kurikulum sehingga pendidikan yang harus diajarkan ... 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya mata pelajaran yang diemban sehingga membuat peserta didik tidak fokus yang berdampak pada hasil ujian nasionanl... 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya materi pelajaran keagamaan. 2. Penanaman akhlak yang kurang. 3. Banyaknya tauran-tauran yang dilakukan.
------------	---	--	---

F. Data Perkembangan Madrasah Di Indonesia

Berdasarkan data emis dapodik Direktorat Jenderal pendidikan Islam maka diperoleh informasi perkembangan madrasah sebagai berikut:

REKAPITULASI DATA POKOK PENDIDIKAN ISLAM
Madrasah | 2019/2020 Genap

Madrasah	Lembaga	Peserta Didik	Pendidik	Tenaga Kependidikan	Rombel
Raudlatul Athfal	29.598	1.286.342	123.988	36.217	77.133
Madrasah Ibtidaiyah	25.579	3.973.748	261.253	7.710	195.442
Madrasah Tsanawiyah	18.082	3.201.689	240.722	35.940	126.618
Madrasah Aliyah	8.871	1.497.001	83.431	14.784	61.007

Sumber: <http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/>

Tabel Rekapitulasi Data Madrasah
Semester Genap 2019/2020

Jenjang	Lembaga	Siswa		Guru		Tendik		R.Kelas
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
RA	29.598	649.438	636.904	6.681	117.307	1.888	34.329	77.133
MIS	23.868	1.801.945	1.634.137	104.961	156.292	11.747	25.825	173.954
MIN	1.711	274.951	262.715	12.950	26.398	4.184	3.526	21.488
MTsS	16.558	1.286.791	1.157.925	121.634	119.088	15.894	20.046	100.822
MTsN	1.524	356.456	400.517	24.763	35.399	9.257	6.578	25.796
MAS	8.064	479.989	552.392	61.782	53.899	8.147	9.682	45.210
MAN	807	176.879	287.741	17.550	21.649	6.637	4.217	15.797
Total	82.130	5.026.449	4.932.331	350.321	530.032	57.754	104.203	460.200

Update : 11-07-2020 07:54:47

Sumber: <http://emispendis.kemeng.go.id/dashboard/>

Berdasarkan data rekapitulasi di atas diperoleh gambaran bagaimana dinamika perkembangan madrasah di Indonesia, baik yang negeri maupun swasta. Pada tahun 2019/2020 terdapat 82.130 lembaga pendidikan islam. Madrasah Ibtidaiyyah berjumlah 25.579. Madrasah Tsanawiyah berjumlah 18.082. sedangkan Madrasah Aliyah berjumlah 8.871. hal ini menunjukkan bahwa Madrasah Aliyah menempati jumlah terkecil dari seluruh madrasah yang ada di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu peningkatan jumlah lembaga pendidikan madrasah aliyah.

BAB VIII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



A. Pengertian Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peraturan Pemerintah (PP) BAB XII, Tahun 2005 Pasal 139, Pasal 1 dinyatakan bahwa pendidik mencakup guru, dosen, konselor, pamong belajar, pamong widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, pelatih, dan sebutan lain dari profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab VI, pasal 28 dinyatakan bahwa Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi, kompetensi: pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial (Sulistriyorini.2006:21).

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 39 ayat 2. Sedangkan menurut

Ahmad Tafsir yang dikemukakan oleh Sulistiyorini di dalam bukunya, Pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotorik.

Tenaga pendidik adalah guru pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, DLB/SMALB SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga khusus dan pelatihan. Guru adalah seorang profesional dan bukan hanya sekedar sebagai seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang tidak mempedulikan aspek ekonomis dari profesinya itu. (Tilaar.2008:177). Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, dan atau melatih peserta didik.

Tenaga atau personalia pendidik adalah orang yang terlibat dalam tugas-tugas pendidikan, yaitu para guru/dosen sebagai pemegang peran utama, manajer/administrator, para upervisor, dan para pegawai. Para personalia pendidikan perlu dibina agar bekerja sama secara lebih baik dengan masyarakat. (Heryati dan Muhsin.2014:59).

Pendidik dan Tenaga Kependidikan menurut pasal 140 Ayat 1 (PP, Bab XII/2005) menyatakan bahwa tenaga kependidikan mencakup pimpinan satuan pendidikan, penilik satuan pendidikan nonformal, pengawas satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan pendidikan, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, dan sebutan lain untuk petugas sejenis yang bekerja pada satuan pendidikan. (Hasbulloh,2006:45).

Tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga-tenaga (personil) yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan (memahami falsafah dan ilmu pendidikan), dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan (mikro atau makro) atau penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Hasbulloh, yang dimaksud personel adalah orang-orang yang melaksanakan sesuatu tugas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam konteks lembaga pendidikan atau sekolah dibatasi dengan sebutan pegawai.

Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penatalaksanaan, kesejahteraan dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun dalam kondisi yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang harus dilaksanakan pimpinan, adalah menarik, mengembangkan, menggaji, dan memotivasi personil

guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karier tenaga kependidikan, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. (Mulyasa.2012:78)

Manajemen tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penatalaksanaan, kesejahteraan dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah (Mustari. 2014: 213).

Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah kegiatan mengelola personal pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai tugas dan fungsinya agar berjalan dengan efektif. (Rugaiyah. 2010: 99).

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) atau pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan (Tim Dosen Administrasi Pendidikan. 2010: 231) dipandang sebagai fungsi atau subsistem diskrit yang diharapkan mampu menyelesaikan tugas-tugas khusus. Misal: Staffing yang efektif diarahkan untuk *put the right person in the right place at the right time*. System kompensasi diharapkan mampu memotivasi performansi dan retensi pegawai. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) (Tim Dosen Administrasi Pendidikan. 2010: 231) merupakan serangkaian system yang terintegrasi dan bertujuan untuk meningkatkan performansi SDM. Misal: staffing, kompensasi, dan pelatihan dimaksudkan untuk menyediakan dukungan yang sinergis bagi organisasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam mencapai tujuan stratejik, dengan menekan biaya atau melahirkan inovasi (<https://www.researchgate.net>).

Berdasarkan pendapat para pakar tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas pengaturan tenaga pendidik dan kependidikan yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan/pengembangan dan pemberhentian.

B. Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 40, dinyatakan bahwa hak dan kewajiban pendidik adalah sebagai berikut:

1. Pendidik adalah tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. Penghasilan dan Jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
 - e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:
 - a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan logis;
 - b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Selanjutnya pada pasal 43, hak lain yang akan diperoleh pendidik adalah promosi dan sertifikasi, yakni:

- 1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan;
- 2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi;
- 3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

C. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Menurut Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Mengingat peran yang diembannya, pendidik berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Ia mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya (Jauharotul Muniroh, 2017).

Pendidik mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang sempit. Dalam arti luas, seorang pendidik adalah semua orang yang berkewajiban membina peserta didik. Dalam arti sempit, pendidik adalah orang yang dengan sengaja dipersiapkan menjadi guru atau dosen. Guru dan dosen adalah jabatan profesional, sebab mereka mendapatkan tujangan profesional.

Sebagai seorang profesional, pendidik memiliki ciri-ciri seperti yang dikembangkan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (1991).

1. Memiliki fungsi dan signifikansi sosial.
2. Memiliki keahlian dan keterampilan tingkat tertentu.
3. Memperoleh keahlian dan keterampilan melalui metode ilmiah.

4. Memiliki disiplin ilmu.
5. Memiliki latar pendidikan perguruan tinggi.
6. Memiliki etika profesi yang dikontrol organisasi profesi.
7. Bebas memutuskan sendiri dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pekerjaannya.
8. Mempunyai nilai sosial di masyarakat.
9. Berhak mendapatkan imbalan yang layak.

Untuk memperkuat keprofesionalitasnya, seorang pendidik menurut Pidarta; (1) memiliki sikap suka belajar, (2) mengetahui cara belajar, (3) memiliki rasa percaya diri, (4) mencintai prestasi tinggi, (5) memiliki etos kerja produktif dan kreatif, serta (6) puas terhadap kesuksesan yang dicapai dan berusaha meningkatkannya.

D. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik

Berdasarkan pengalaman, dapat dipahami bagaimana meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik, mulai dari kegiatan rutin sampai pelatihan dan pendidikan lanjut. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik sangat berkaitan erat dengan empat kriteria kinerja, yaitu karakteristik tenaga pendidik, proses-proses peningkatan profesionalisme, hasil dan kombinasi diantara ketiganya.

Kualitas kerja perlu bagi tenaga pendidik, kemampuan komunikasi, inisiatif, dan motivasi kerja, termasuk hal yang perlu diperhatikan. Seorang tenaga pendidik harus memahami tugas dan tanggung jawabnya, memiliki kemampuan mengajar sesuai dengan bidangnya, mempunyai semangat tinggi, serta memiliki inisiatif dan kemauan yang tinggi, sehingga ia memiliki energi yang optimal dalam menjalankan tugas profesionalismenya.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khusus BAB I pasal 1 ayat (5) sebagaimana telah diuraikan di atas menyebutkan bahwa: Tenaga Kependidikan itu adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan”, dan ayat (6) “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

E. Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39 ayat (1) selanjutnya menjelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan itu adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa: Pendidikan merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan, dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penilaian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi.(Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Guru dan Dosen BAB I Pasal 1) Pandangan tersebut jelas mengisyaratkan kepada kita bahwa untuk mencapai suatu tujuan salah satunya adalah dengan meningkatkan sumberdaya manusia yang produktif dan berkualitas. Untuk dapat menghasilkan

output yang berkualitas maka suatu lembaga pendidikan dapat menempuh prosedur awal yaitu melalui perencanaan SDM yang matang pada saat perekrutan. Dengan demikian, sistem pendidikan di sekolah tersebut menjadi lebih baik dan akan mencapai suatu keberhasilan. Selain pada tahap perekrutan, tahap pengembangan karier guru pun sangat penting untuk diperhatikan. Karena pada tahap pengembangan karier guru akan berdampak pada kinerja guru.

Selaras dengan hasil dari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kemendikbud tahun 2015 mengenai kinerja guru ialah: Ketercapaian sasaran strategis meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan didukung melalui ketercapaian lima indikator kinerja, yaitu:

- 1) Presentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional.
- 2) Jumlah PTK PAUD professional.
- 3) Jumlah PTK Dikmas professional.
- 4) Presentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai SPM.
- 5) Presentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai SNP.

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan:

4) Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Presentase profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan capaian kinerjanya telah melampaui target yang ditetapkan. Meskipun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Pada tahun 2015, persentase guru, tenaga pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional ditargetkan mencapai 45% dan pada tahun tersebut jumlah guru, tenaga pendidik lainnya dan tenaga kependidikan yang profesional telah mencapai angka 84.02%.

Dengan persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 187%. Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. (Lakip Kemendikbud.2015:69). Oleh sebab itu, agar dapat mencapai pelaksanaan yang optimal maka sudah seyogyanya setiap lembaga pendidikan memanfaatkan SDM sebagai pemegang peran utama aktivitas pendidikan dengan melewati berbagai perencanaan tersebut dengan baik. Karena dengan segala perencanaan yang sudah sesuai dengan prosedur, diharapkan dapat menjadikan sekolah tersebut meraih keberhasilan yang akan menjadikan sekolah dengan titel terbaik yang nantinya dapat bersaing dengan dunia global.



BAB IX

PESERTA DIDIK

A. Prolog

Pendidik dan Peserta didik dalam pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan akan berfungsi baik jika terwujudnya pendidik dan peserta didik yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Keberhasilan peserta didik tidak akan terlepas dari perjuangan, bimbingan dan tuntunan dari para pendidik dan begitu juga sebaliknya, para pendidik akan dikatakan berhasil jika mampu membimbing, membina dan mengajarkan peserta didik dengan baik dan professional. Maka dari itu, pendidikan akan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai tercermin dari kerjasama yang baik antara pendidik dan peserta didik.

B. Pengertian Peserta Didik

Secara etimologi peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan dan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase

perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran (<https://www.anekamakalah.com>).

Sebagai individu yang tengah mengalami fase perkembangan, tentu peserta didik tersebut masih banyak memerlukan bantuan, bimbingan dan arahan untuk menuju kesempurnaan. Hal ini dapat dicontohkan ketika seorang peserta didik berada pada usia balita yang selalu banyak mendapat bantuan dari orang tua ataupun saudara yang lebih tua. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peserta didik merupakan barang mentah (*raw material*) yang harus diolah dan dibentuk sehingga menjadi suatu produk pendidikan (Syaiful Bahri, 2010).

Berdasarkan hal tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa setiap peserta didik memiliki eksistensi atau kehadiran dalam sebuah lingkungan, seperti halnya sekolah, keluarga, pesantren bahkan dalam lingkungan masyarakat. Dalam proses ini peserta didik akan banyak sekali menerima bantuan yang mungkin tidak disadarinya, sebagai contoh seorang peserta didik mendapatkan buku pelajaran tertentu yang ia beli dari sebuah toko buku. Dapat dibayangkan betapa banyak hal yang telah dilakukan orang lain dalam proses pembuatan dan pendistribusian buku tersebut, mulai dari pengetikan, penyetakan, hingga penjualan (Syaiful Bahri, 2010).

Peserta didik sebagai *raw material* dalam proses transformasinya dan internalisasi menempati posisi yang sangat penting untuk dilihat signifikasinya dalam menemukan keberhasilan sebuah proses. Berbeda dengan komponen lain dalam sistem pendidikan, komponen peserta didik dalam sebuah proses sangat bervariasi, ada yang sudah jadi, setengah

jadi, bahkan masih ada yang sangat mentah. Kondisi ini memunculkan banyak persoalan dalam menentukan proses pendidikan.

C. Pengertian Peserta Didik Menurut Beberapa Ahli

Makna peserta didik sering juga disebut sebagai Siswa atau yang biasa disebut dengan peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan, karena tanpa adanya peserta didik tidak akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Peserta didik merupakan komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar. Didalam proses belajar mengajar, peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Menurut Sudarwan Danim, “Peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal”. Peserta didik bisa belajar tanpa guru. Sebaliknya guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu, kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik.

Lebih lanjut Sudarwan Danim menambahkan bahwa terdapat hal-hal esensial mengenai hakikat peserta didik, yaitu:

1. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi potensi dasar kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotorik.
2. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi perkembangan dan pertumbuhan, meski memiliki pola yang relatif sama.
3. Peserta didik memiliki imajinasi, persepsi, dan dunianya sendiri, bukan sekedar miniatur orang dewasa.
4. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi kebutuhan yang harus dipenuhi, baik jasmani maupun rohani, meski dalam hal-hal tertentu banyak kesamaan.
5. Peserta didik merupakan manusia bertanggung jawab bagi proses belajar pribadi dan menjadi pembelajar sejati, sesuai dengan wawasan pendidikan sepanjang hayat.
6. Peserta didik memiliki adaptabilitas didalam kelompok sekaligus mengembangkan dimensi individualitasnya sebagai insan yang unik.
7. Peserta didik memerlukan pembinaan dan pengembangan secara individual dan kelompok serta mengharapkan perlakuan yang manusiawi dari orang dewasa termasuk gurunya.
8. Peserta didik merupakan insan yang visioner dan proaktif dalam menghadap lingkungannya.
9. Peserta didik sejatinya berperilaku baik dan lingkunganlah yang paling dominan untuk membuatnya lebih baik lagi atau menjadi lebih buruk.

10. Peserta didik merupakan makhluk Tuhan yang memiliki aneka keunggulan, namun tidak akan mungkin bisa berbuat atau dipaksa melakukan sesuatu melebihi kapasitasnya.

Di samping itu Oemar Hamalik (2004: 99) menjelaskan bahwa “Peserta didik merupakan salah satu komponen dalam pengajaran, disamping faktor guru, tujuan, dan metode pengajaran”. Sedangkan Samsul Nizar (2002: 47) menjelaskan bahwa “Peserta didik merupakan orang yang dikembangkan”.

Di lain pihak Abu Ahmadi (1991: 251) juga menjelaskan tentang pengertian peserta didik yaitu “Peserta didik adalah orang yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat dan sebagai suatu pribadi atau individu”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah seseorang yang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pendidikan dan pembelajaran pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik bertindak sebagai pelaku pencari, penerima dan penyimpan dari proses pembelajaran, dan untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan seorang pendidik guru.

D. Karakteristik Peserta Didik

Setiap peserta didik memiliki ciri dan sifat atau karakteristik yang diperoleh dari lingkungannya. Agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal guru perlu memahami karakteristik

peserta didik. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik yang dimiliki sejak lahir baik menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Untuk mengetahui siapa peserta didik perlu dipahami bahwa sebagai manusia yang sedang berkembang menuju kearah kedewasaan memiliki beberapa karakteristik.

Menurut Tirta Raharja 2000 (Uyoh Sadullah 2010) mengemukakan empat karakteristik yang dimaksud:

- Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan makhluk yang unik.
- Individu yang sedang berkembang, anak mengalami perubahan dalam dirinya secara wajar.
- Individu yang membutuhkan bimbingan individual.
- Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri dalam perkembangannya peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang kearah kedewasaan.

Dalam mengungkapkan ciri-ciri anak didik Edi Suardi (1984) mengemukakan tiga ciri anak didik:

1. Kelemahan dan ketidakberdayaan

Anak ketika dilahirkan dalam keadaan lemah yang tidak berdaya untuk dapat bergerak harus melalui berbagai tahapan. Kelemahan yang dimiliki anak adalah kelemahan rohaniah dan jasmaniah misalnya tidak kuat gangguan cuaca, juga rohaniahnya tidak mampu membedakan keadaan yang berbahaya ataupun yang menyenangkan. Kelemahan dan ketidakberdayaan anak makin lama makin hilang karena berkat bantuan dan bimbingan pendidik atau yang disebut dengan pendidikan. Pendidikan

akan berhenti manakala kelemahan dan ketidak berdayaan sudah berubah menjadi kekuatan dan keberdayaan, yaitu suatu keadaan yang dimiliki oleh orang dewasa. Pendidikan justru ada karena adanya ciri kelemahan dan ketidakberdayaan tersebut.

2. Anak Didik adalah Makhluk yang Ingin Berkembang

Keinginan berkembang menggantikan ketidakmampuan pada saat anak lahir merupakan karunia yang besar untuk membawa mereka ke tingkat kehidupan jasmaniah dan rohaniah yang lebih tinggi dari makhluk lainnya. Keinginan berkembang mendorong anak untuk giat, itulah yang menyebabkan adanya kemungkinan atau pergaulan yang disebut pendidikan. Tanpa keinginan berkembang pada anak, akan menjadikan tidak ada kemauan, tidak mempunyai vitalitas, tidak giat bahkan barangkali menjadi malas dan acuh tak acuh.

3. Anak Didik yang Ingin Menjadi Diri Sendiri

Seperti pernah dikemukakan bahwa anak didik itu ingin menjadi diri sendiri. Hal tersebut penting baginya karena untuk dapat bergaul dalam masyarakat. Seseorang harus merupakan diri sendiri, orang seorang atau pribadi. Tanpa itu manusia akan menjadi manusia penurut, dan manusia yang tidak punya pribadi. Pendidikan yang bersifat otoriter bahkan mematikan pribadi anak yang sedang tumbuh.

Secara garis besar karakteristik peserta didik dibentuk oleh dua faktor yaitu Faktor bawaan merupakan faktor yang diwariskan dari kedua orang tua individu yang menentukan karakteristik fisik dan terkadang intelegensi. Faktor lingkungan merupakan faktor yang menentukan karakteristik spiritual,

mental, psikis, dan juga terkadang fisik dan inteligensi. Faktor lingkungan dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Lingkungan Keluarga

Pada lingkungan keluarga seperti motivasi dari kedua orang tua agar menjadi orang yang sukses kedepannya dan tidak boleh kalah dengan kesuksesan orang tuanya, kesuksesan teman orang tuanya, kesuksesan anak teman orang tuanya, ingin merubah nasib keluarga yang melarat, motivasi sebagai kakak yang merupakan contoh bagi adik-adiknya, motivasi sebagai adik yang tidak boleh kalah dengan kesuksesan kakaknya.

2) Lingkungan Sekolah

Dari lingkungan sekolah seperti motivasi ingin menjadi juara kelas, motivasi ingin kaya karena melihat orang tua temannya yang kaya, ataupun motivasi dari gurunya.

3) Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat misalnya motivasi dari tetangganya yang sukses, motivasi karena keluarganya selalu diremehkan masyarakat, ataupun motivasi karena masyarakatnya diremehkan masyarakat lain.

Setelah mengetahui faktor-faktor tersebut guru dapat memahami bahwa peserta didiknya digolongkan sebagai individu yang unik dan pilah karena peserta didik pada hakikatnya terdiri dari individu-individu yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Terdapatnya perbedaan individual dalam diri masing-masing peserta didik membuat guru harus pandai-pandai menempatkan porsi keadilan dengan tepat pada setiap

peserta didikny. Misalnya saja dalam pelajaran fisika, tentunya tidak semua siswa berminat dalam pelajaran fisika, mungkin ada siswa yang berminat pada musik, lantas guru tidak harus memaksanya untuk dapat menyukai fisika apa lagi memaksakan agar paham fisika lebih mendalam dengan memberikan soal dan tugas yang banyak dan sulit ditambah lagi sanksinya yang berat bila tidak dapat mengerjakan soal tugas tersebut. Hal inilah yang nantinya menciptakan potensi buruk pada diri peserta didik sebagai hasil ketidakpuasannya terhadap lingkungan yang diterima.

Pada prinsipnya perkembangan psikis peserta didik selalu ke arah yang lebih baik seiring dengan tingkat materi pelajaran yang diberikan juga semakin tinggi sehingga membuat peserta didik terbiasa berpikir secara realitis dan sistimatis. Tapi guru hendaknya mendukung dan membantunya mengembangkan potensi tersebut agar lebih optimal. Peserta didik yang demikian tidak perlu diajarkan fisika sampai mendalam karena itu hanya akan membuatnya menjadi jenuh pada setiap pertemuan dan sudah menjadi kompetensi guru untuk dapat menyadari hal ini, tapi bisa juga divariasikan konsep-konsep fisika yang berhubungan dengan bidang yang diminatinya, seandainya peserta didik tersebut tidak mengerti paling tidak pasti ia akan menikmati proses pembelajaran di kelasnya. Selain dengan cara itu, guru juga bisa melakukan pendekatan-pendekatan dalam proses pembelajaran terhadap peserta didiknya dengan terlebih dahulu membaca situasi. Misalnya saja dengan memberikan kesempatan kepada siswa yang pintar untuk mengajarkan kepada temannya yang kurang mengerti. Seperti itulah guru yang profesional.

E. Peran Guru dalam Mengembangkan Potensi Peserta Didik

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat (2) menyebutkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan dalam pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Agar pelayanan pendidikan yang selama ini diberikan kepada peserta didik mencapai sasaran yang optimal, maka pembelajaran harus diselaraskan dengan potensi peserta didik. Oleh karena itu guru perlu melakukan pelacakan potensi peserta didik.

Pemahaman tentang berbagai potensi peserta didik mutlak harus dimiliki oleh setiap pendidik. Hal itu sejalan dengan tujuh prinsip penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yaitu:

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya,
2. Bergam dan terpadu,

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan,
5. Menyeluruh dan berkeselamatan,
6. Belajar sepanjang hayat, dan
7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Agar dapat mengenali potensi peserta didik, caravayang paling mudah dan sederhana adalah dengan mengajukan pertanyaan. “Apakah yang paling senang kamu lakukan dan orang lain menilai hasilnya sangat bagus dan luar biasa?”. Sebagian peserta didik mungkin menjawab suka mengerjakan Matematika. Itu artinya dia memiliki kecerdasan logika. Sebagian siswa mungkin merasa senang apabila menulis atau belajar bahasa asing. Artinya dia memiliki kecerdasan linguistik. Sebagian lagi mungkin senang bermain musik, dan sebagainya.

Dalam pembelajaran guru sebagai pendidik berinteraksi dengan peserta didik yang mempunyai potensi beragam. Untuk itu pembelajaran hendaknya lebih diarahkan kepada proses belajar kreatif dengan menggunakan proses berpikir *divergen* (proses berpikir ke macam-macam arah dan menghasilkan banyak alternatif penyelesaian) maupun proses berpikir *konvergen* (proses berpikir mencari jawaban tunggal yang paling tepat). Dalam konteks ini guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator daripada pengarah yang menentukan segala-galanya bagi peserta didik. Sebagai fasilitator guru lebih banyak mendorong peserta didik (*motivator*) untuk mengembangkan inisiatif dalam menjajagi tugas-tugas baru. Guru harus lebih

terbuka menerima gagasan-gagasan peserta didik dan lebih berusaha menghilangkan ketakutan dan kecemasan peserta didik yang menghambat pemikiran dan pemecahan masalah secara kreatif.

Bagaimana hal ini dapat diwujudkan pada suasana pembelajaran yang dapat dinikmati oleh peserta didik? Jawabnya adalah pembelajaran menggunakan pendekatan kompetensi antara lain dalam proses pembelajaran guru:

1. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bermain dan berkreaitivitas,
2. Memberi suasana aman dan bebas secara psikologis,
3. Disiplin yang tidak kaku, peserta didik boleh mempunyai gagasan sendiri dan dapat berpartisipasi secara aktif,
4. Memberi kebebasan berpikir kreatif dan partisipasi secara aktif.

Semua ini memungkinkan peserta didik mengembangkan seluruh potensi kecerdasannya secara optimal. Suasana kegiatan belajar-mengajar yang menarik, interaktif, merangsang kedua belahan otak peserta didik secara seimbang, memperhatikan keunikan tiap mindividu, serta melibatkan partisipasi aktif setiap peserta didik akan membuat seluruh potensi peserta didik berkembang secara optimal. Selanjutnya tugas guru adalah mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan yang maksimal.

Ternyata, banyak sekali potensi yang dimiliki peserta didik. Tugas pendidik adalah bagaimana agar potensi-potensi tersebut

dapat berkembang dengan maksimal, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pengembangan potensi siswa melalui kegiatan intra kurikuler dapat terwujud melalui proses belajar yang melibatkan peserta didik secara aktif (*active learning*). Dengan demikian siswa terus mengasah kecerdasan logika saat merumuskan ide-ide atau pendapat, kecerdasan bahasa saat menyampaikan secara lisan ide atau pendapat tersebut, kecerdasan keuletan saat harus beradu argumen dengan teman, kecerdasan intrapersonal saat harus bersikap toleran kepada yang lain dan seterusnya.

F. Proses Pendidikan

Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran. Sebabnya ialah karena peserta didiklah yang membutuhkan pengajaran dan bukan guru, guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah orang/individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Sementara itu mengenai peserta didik berdasarkan peraturan Menteri Agama RI Bab IV pasal 16 menyatakan bahwa:

- 1) Peserta didik kelas 7 (tujuh) MTs wajib: a. lulus dan memiliki ijazah MI/sekolah dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/program paket A atau bentuk lain yang sederajat; b. memiliki surat keterangan hasil ujian nasional

(SKHUN) MI/SD/SDLB/program paket A atau bentuk lain yang sederajat; dan c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

- 2) MTs wajib menerima warga Negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sesuai dengan jumlah daya tampungnya.
- 3) MTs wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus (Hasbullah, 2010: 12-14).

Kemudian ditambahkan dalam pasal 17 yang menyatakan bahwa:

- 1) Penerimaan peserta didik pada MTs dilakukan secara adil, objektif, transparan, dan akuntabel.
- 2) MTs dapat menerima peserta didik pindahan dari sekolah menengah pertama (SMP)/ program paket B atau bentuk lain yang sederajat.



BAB X

SARANA PRASARANA MADRASAH

A. Memahami Sarana Prasarana

Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut, Pemerintah telah mengamanatkan penyusunan delapan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimum tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya **sarana** dan **prasarana** yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana.

Standar sarana dan prasarana ini disusun untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Standar sarana dan prasarana ini mencakup:

- 1) Kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.
- 2) Kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah (<https://manajemenpendidikan.net>).

B. Pengertian Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan dua hal yang saling menunjang antara yang satu dengan yang lainnya. Namun bukan berarti jika tidak ada salah satu, maka salah satunya lagi tidak berfungsi sama sekali. Secara harfiah keduanya sering didefinisikan sebagai satu hal yang sama alias satu kesatuan. Ternyata jika Pengertian Sarana dan Prasarana dibedah lebih dalam, keduanya tidak serta merta sama. Jadi untuk mengetahui pengertian sarana dan prasarana sebagaimana berikut ini.

Nanik Darsini dalam bukunya **Pengelolaan Sarana Prasarana Rekreasi disebutkan**; Prasarana Segala sesuatu yang merupakan utama terselenggaranya suatu proses. Sarana: Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan (Nanik Darsini, 2001). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) disebutkan; *Prasarana*: Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). *Sarana*: Segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang sapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan (Kamus Besar BI, 2002: 893). *Hamalik (1980: 23) mengatakan*; *Sarana dan prasarana* adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang untuk menyebar ide, sehingga ide tersebut bias sampai pada penerima.

C. Fungsi Sarana dan Prasarana

Fungsi sarana dan prasarana dapat berbeda sesuai lingkup dan penggunaannya, misalkan sarana dan prasarana pendidikan berbeda dengan transportasi, wisata dan sebagainya, namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Fungsi utama sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki tujuan:

1. Menciptakan kenyamanan.
2. Menciptakan kepuasan.
3. Mempercepat proses kerja.
4. Memudahkan proses kerja.
5. Meningkatkan produktivitas.
6. Hasil lebih berkualitas.

D. Cara Pemeliharaan Sekaligus Penyimpanan Sarana dan Prasarana

Adapun cara pemeliharaan sekaligus penyimpanan sarana dan prasarana yang diantaranya yaitu:

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Begitu pentingnya memelihara sarana prasarana, adapun manfaat dari pemeliharaan sarana dan prasarana diantaranya:

1. Supaya awet sehingga jarang terjadi kerusakan.
2. Supaya tidak mudah basi atau kadaluarsa.
3. Dan supaya tidak mudah susut.

Pemeliharaan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti:

- a. Pemeliharaan yang berdasarkan jangka waktu tertentu misalnya membersihkan dan melakukan pengecekan peralatan seminggu sekali.
- b. Pemeliharaan yang dilakukan setiap hari, misalnya membersihkan lantai, meja atau barang lainnya.
- c. Pemeliharaan berdasarkan jenis barangnya, misal barang bergerak dan barang tidak bergerak, pastinya akan berbeda cara pemeliharaannya.

2. Penyimpanan Sarana dan Prasarana

Tujuan dari penyimpanan sarana dan prasarana diantaranya:

- a. Supaya tidak mudah hilang karena lupa menyimpan.

- b. Supaya barang tersimpan secara rapi dan mudah ditemukan saat akan digunakan kembali.
- c. Dan tentunya supaya barang tidak mudah rusak.

Cara untuk menyimpannya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti:

- 1) Barang disimpan berdasarkan jenisnya “seperti berdasarkan beratnya, merknya, jangka waktu penyimpanannya dan jenis bahannya”.
- 2) Simpan barang dalam keadaan bersih.
- 3) Simpan di tempat yang cukup udara dan ruangan yang memadai.
- 4) Barang yang penting atau berharga tinggi sebaiknya simpan ditempat yang dapat terkunci.
- 5) Barang yang sering digunakan sebaiknya simpan ditempat yang gampang di ambil.
- 6) Hindari barang tertentu dari sinar matahari.

E. Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana

Berikut ini terdapat beberapa ruang lingkup sarana dan prasarana, terdiri atas:

1. Peralatan/Perlengkapan Kantor (*Office Supplies*)

Peralatan/perlengkapan adalah alat atau bahan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor, sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan selesai lebih cepat, lebih tepat dan lebih baik. Peralatan/perlengkapan kantor dibedakan menjadi dua, yaitu; Peralatan/perlengkapan kantor dilihat dari bentuknya:

2. Peralatan/Perlengkapan Kantor Berbentuk Lembaran
Peralatan/perlengkapan kantor yang berbentuk lembaran/helaian, yaitu kertas HVS, kertas folio bergaris, kertas karbon, kertas stensil, formulir, kertas berkop, plastik transparan, kertas karton, kertas buffalo, amplop dan map.
3. Peralatan/Perlengkapan Kantor Berbentuk Nonlembaran
Peralatan/perlengkapan kantor yang berbentuk nonlembaran (bukan berupa kertas lembaran), yaitu pulpen, pensil, spidol, penghapus, penggaris, rautan, gunting, pemotong kertas (*cutter*), pembuka surat (letter opener), pelubang kertas dan lain-lain.
4. Peralatan/Perlengkapan Kantor Berbentuk Buku
Peralatan/perlengkapan kantor yang berbentuk buku, antara lain:
 - a. Buku catatan (block note), yaitu buku untuk menulis catatan harian sekretaris.
 - b. Buku pedoman organisasi, yaitu buku panduan tentang informasi yang berkaitan dengan organisasi, mulai sejarah, struktur, produk dan jasa, hingga prosedur kerja.
 - c. Buku tamu, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat tamu yang datang ke perusahaan.
 - d. Buku agenda surat, yaitu buku yang mencatat keluar masuknya surat sehari-hari.

Peralatan/perlengkapan kantor dilihat dari penggunaannya:

1. Barang habis pakai

Barang habis pakai adalah barang/benda kantor yang penggunaannya hanya satu/beberapa kali pakai atau tidak tahan lama. Contoh : kertas, tinta, karbon, klip, pensil dan pulpen.

2. Barang tidak habis pakai

Barang yang tidak habis pakai adalah barang/benda kantor yang penggunaannya tahan lama. Contoh : stapler, perforator, cutter, dan gunting.

a. Mesin-Mesin Kantor (*Office Machine*)

Mesin-mesin kantor (*office machine*) adalah alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan magnetik. Contoh: komputer, laptop, LCD, mesin tik manual dan elektrik, mesin fotocopy, dll.

b. Mesin Komunikasi Kantor

Mesin komunikasi kantor adalah sarana kantor yang digunakan untuk melakukan komunikasi, baik di lingkungan organisasi sendiri maupun ke luar organisasi. Contoh : telepon, interkom, faksimile dan telepon wireless.

c. Perabot Kantor (*Office Furniture*)

Perabot kantor adalah benda-benda kantor yang terbuat dari kayu atau besi untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan kantor. Contoh : meja, kursi, sofa (meja dan kursi untuk tamu), rak buku, lemari, papan tulis dll.

d. Interior Kantor (*Office Arrangement*)

Interior kantor adalah benda-benda kantor yang digunakan untuk menambah suasana jadi menyenangkan sehingga memberi semangat dan kenyamanan dalam menyelesaikan pekerjaan. Contoh : gambar presiden dan wakil presiden, gambar lambang negara, bendera, struktur organisasi, lukisan, patung, vas bunga, tanaman hidup maupun buatan, jam dinding dll.

f. Tata Ruang Kantor (*Office Lay Out*)

Tata ruang kantor adalah pengaturan ruangan kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor sesuai dengan luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia sehingga memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada karyawan dan pekerja.

Contoh sarana dan prasarana, berikut ini beberapa contoh sarana dan prasarana, seperti yang terdapat di sekolah dan di kantor yaitu:

1. Sarana Prasarana Sekolah

Adapun beberapa sarana dan prasarana yang dapat membantu proses belajar mengajar di sekolah, diantaranya yaitu:

- a. Ruang kelas, berguna untuk proses belajar dan mengajar.
- b. Berguna untuk menyimpan dan membaca buku-buku materi mata pelajaran.
- c. Fasilitas olah raga, berguna untuk berolah raga bagi para siswa dan guru, contohnya seperti bola voli, bola sepak, bola basket dan lapangan tempat berolahraga.

- d. Ruang praktek, berguna untuk siswa melakukan praktek mata pelajaran, misalnya laboratorium kimia maupun fisika dan ruang praktek komputer.
 - e. Berguna sebagai tempat beribadah bagi para siswa dan guru yang muslim.
2. Sarana Prasarana Perkantoran

Adapun beberapa sarana dan prasarana yang digunakan untuk membantu proses pekerjaan di kantor diantaranya yaitu:

- a. Peralatan mesin, merupakan peralatan yang membantu proses menyelesaikan pekerjaan dikantor misalnya alat tersebut digunakan untuk mencatat, merekam dan mengolah data-data. Contohnya komputer, mesin foto copy, printer, scanner, proyektor, mesin ketik, dan lain-lain.
- b. Perabotan kantor, peralatan yang membantu dalam pelaksanaan proses pekerjaan di kantor, contohnya meja, kursi dan papan tulis.

Peralatan atau perlengkapan lainnya merupakan bahan atau perlengkapan lain yang dapat menghasilkan sesuatu dari proses pekerjaan yang dilakukan, contohnya kertas dan buku untuk mencatat data-data.

BAB XI

SOSIAL BUDAYA MADRASAH



A. Pengertian Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial ialah interaksi diantara masyarakat dengan lingkungan, ataupun lingkungan yang juga terdiri dari makhluk sosial atau manusia. Lingkungan sosial inilah yang kemudian membentuk suatu sistem pergaulan yang memiliki peranan besar di dalam membentuk sebuah kepribadian seseorang, dan kemudian terjadilah sebuah interaksi diantara orang atau juga masyarakat dengan lingkungannya.

Lingkungan sosial dari seseorang pertama kali dibentuk di dalam sebuah lingkungan keluarga, dan kemudian lingkungan keluarga yang menjadi media pertama yang memiliki pengaruh terhadap perilaku seseorang dan yang paling utama yaitu anak-anak. Karena di dalam lingkungan keluarga setiap anggota dari keluarga terutama anak-anak diberikan berbagai macam pendidikan supaya mampu menjadi seorang anak yang mandiri.

Selain dapat mengarahkan anak menjadi mandiri, anak juga dapat mengambil suatu keputusan untuk dirinya sendiri supaya bisa mengembangkan kemampuan dirinya seperti mental, sosial, emosional ataupun fisik yang dipunyainya. Sehingga

anak tersebut bisa mengembangkan suatu kehidupan yang sehat serta produktif (Bitar, <https://www.gurupendidikan.co.id>).

Dan untuk menciptakan suasana yang ada didalam lingkungan keluarga, harus kita ciptakan suasana yang kondusif atau saling terbuka didalam setiap suatu permasalahan yang ada, sehingga akan muncul rasa saling menyayangi dan juga mempercayai diantara satu sama lainnya. Oleh sebab itulah lingkungan keluarga merupakan hal yang berpengaruh besar didalam mendapatkan bekal untuk dapat melakukan sosialisasi di didalam sebuah lingkungan sosial yang sangat luas. Dan tidak hanya dapat dilakukan didalam suasana rumah saja, melainkan juga bisa untuk dipakai sebagai bekal didalam lingkungan sosial ataupun didalam hidup bermasyarakat.

B. Faktor-Faktor Lingkungan Sosial

Faktor-faktor lingkungan sosial diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelompokan Sosial

Pengelompokan sosial yaitu berbagai macam orang-orang yang dimana mereka membentuk persekutuan sosial yang dilandasi oleh adanya suatu hubungan kekerabatan seperti keluarga marga dan lainnya.

2. Penataan Sosial

Penataan sosial yang dimana hal ini sangat penting untuk bisa mengatur suatu ketertiban dalam kehidupan dimasyarakat. Penataan itu berupa aturan-aturan yang dipakai sebagai pedoman untk kerja sama dan pergaulan bagi setiap anggota yang mana setiap orang harus mempunyai kedudukan yang

jelas sehingga akan lebih jelas untuk mengetahui suatu kepentingan satu dengan yang lainnya.

C. Jenis-jenis Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Sosial Primer

Lingkungan sosial primer yaitu salah satu jenis lingkungan sosial yang mana terdapat sebuah hubungan yang erat diantara anggota satu dengan anggota lainnya, anggota satu yang saling mengenal baik dengan anggota yang lainnya.

2. Lingkungan Sosial Skunder

Yaitu salah satu jenis lingkungan sosial yang memiliki hubungan diantara anggota satu dengan anggota lainnya memiliki jarak atau kurang akrab.

Contoh Lingkungan Sosial, ada banyak sekali contoh-contoh dari lingkungan sosial seperti lingkungan sosial disekolah yang mana didalamnya terjadi interaksi sosial diantara komponen-komponen pendukung dengan status yang berbeda-beda. Sebagai contoh yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan lainnya. Setiap dari komponen tersebut akan menjalankan tugasnya masing-masing. Selain itu contoh lingkungan sosial juga terdapat didalam lingkungan masyarakat. Interaksi sosial didalam lingkungan masyarakat mempunyai keanekaragaman yang sesuai dengan status dan juga perennya masing-masing. Hal ini dapat dilihat pada interaksi antara satu warga dengan warga yang lain seperti adanya suatu kerja sama, bahu membahu persaingan dan juga gotong royong.

D. Memahami Sosial Budaya Madrasah

Sebagai lembaga pendidikan yang sudah lama berkembang di Indonesia, madrasah selain telah berhasil membina dan mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia, juga ikut berperan dalam menanamkan rasa kebangsaan ke dalam jiwa rakyat Indonesia. Disamping itu madrasah juga sangat berperan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Soedijarto dalam bukunya: *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional* menyatakan: “Sesungguhnya secara formal sekolah-sekolah telah memenuhi syarat seperti yang dimaksudkan oleh Cohen yaitu adanya tenaga khusus (guru), gedung permanen, perlengkapan belajar, metode pembelajaran, perangkat kurikulum, dan tujuan-tujuan pendidikan yang harus dicapai. Namun mengapa lembaga pendidikan sekolah yang secara formal telah memenuhi syarat, dalam kenyataan belum mampu melaksanakan fungsinya seperti yang terjadi di AS, Inggris dan Jerman” (Sodijarto: 2008:96).

Namun demikian, performa madrasah sampai pada saat ini masih sangat rendah. Beberapa permasalahan telah berhasil diidentifikasi menjadi penyebabnya baik pada tingkat pengelolaan maupun kebijakan. Masalah kurikulum madrasah yang masih belum fokus dan proses pendidikan yang belum mendukung pada visi dan misi madrasah, merupakan contoh isu ditingkat pengelolaan, sedangkan kebijakan pengembangan madrasah yang masih bersifat tambal sulam serta belum adanya cetak biru pengembangan madrasah merupakan contoh isu ditingkat kebijakan.

Berbicara madrasah maka tidak bisa lepas dari sekolah atau madrasah sebagai tempat untuk melaksanakan interaksi proses belajar mengajar yang mempunyai beberapa fungsi, madrasah sebagai fungsi sosial, Dewey (1964: 22) mengemukakan: *”Three of the more important functions of this special environment are: Simplifying and ordering the factor of the disposition it is wished to develop; creating a wider and better balanced environment than that by which the young would be likely, if to themselves, to be influenced.”*

Sekolah sebagai alat tranmisi, merupakan suatu lingkungan khusus yang memiliki tiga fungsi yaitu:

- a. Menyederhanakan dan menertibkan faktor-faktor bawaan yang dibutuhkan untuk berkembang.
- b. Memurnikan dan mengidealkan kebiasaan masyarakat yang ada.
- c. Menciptakan suatu lingkungan yang lebih luas, dan lebih baik dari pada yang diciptakan anak tersebut dan menjadi milik mereka untuk dikembangkan.

Madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan juga merupakan tempat untuk menempa dan membentuk karakter dan akhlak peserta didik dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional. Sedangkan Katarina Tomasevski dalam bukunya Pendidikan yang terabaikan mengemukakan bahwa: ”Hak atas pendidikan melibatkan empat permainan kunci: pemerintah sebagai penyedia dan/atau pembiaya sekolah publik, si anak sebagai pemegang hak atas pendidikan dan pemegang tugas untuk mengikuti ketentuan-ketentuan wajib belajar, orang tua si anak

yang merupakan pendidik pertama, dan pendidik profesional yaitu para guru.” (Katarina Tomasevski, 2003: 55).

Sejumlah permasalahan madrasah di atas secara fakta sejarah dan pengalaman yang sangat panjang dalam menyelesaikan masalah-masalah aktual di lingkungan madrasah sampai dengan saat ini, merupakan modal dasar untuk merumuskan desain kebijakan pengembangan madrasah baik berjangka pendek, menengah, maupun berjangka panjang (Departemen Agama RI, 2004: 3).

Selanjutnya belajar dari pengalaman, telah banyak gagasan inovatif untuk mengembangkan pendidikan yang disertai dengan implementasi dan biaya yang tidak sedikit, namun tidak cukup terlihat dampak keberhasilannya. Kegagalan inovasi itu, sesungguhnya bersumber dari ketiadaan kerangka yang kuat berjangka panjang, aspiratif, demokratis, partisipatif dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dari kondisi yang ada selama ini.

Tuntutan terhadap desain madrasah dalam konteks pengembangan madrasah, dengan segenap potensi yang dimiliki dan tantangan yang dihadapinya, dewasa ini dirasakan amat mendesak. Desain yang dimaksud merupakan garis-garis besar prinsip dan kebijakan pengembangan madrasah, sehingga disebut dengan desain pengembangan madrasah yang selanjutnya dijabarkan dalam berbagai program dan pengaturannya untuk dijadikan landasan dalam berfikir dan bertindak (<https://nurwidintoro.wordpress.com>).

Seiring dengan era globalisasi maka pendidikan di Indonesia saat ini perlu menyesuaikan diri dengan dua perkembangan

tuntutan masyarakat yang sangat mendasar. *Pertama* tuntutan perubahan tatanan masyarakat di era reformasi ini yakni demokratisasi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. *Kedua* tuntutan perkembangan global yakni perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, sehingga masyarakat dan bangsa Indonesia mampu berperan dan bersaing dalam interaksi dengan masyarakat dan bangsa-bangsa lain dalam tatanan dunia yang semakin menyempit.” (Departemen Agama RI, 2005: 1).

Desian pengembangan madrasah adalah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu madrasah agar kualitas madrasah semakin meningkat sehingga madrasah dapat diterima oleh segala lapisan masyarakat dan lulusan dari madrasah mampu beradaptasi dan bersosialisasi dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa di Negara kita tercinta ini, dalam hal ini ada beberapa strategi yang dapat dilaksanakan untuk pengembangan madrasah:

1. Strategi Peningkatan Layanan Pendidikan di Madrasah

Inhktiar untuk senantiasa mengembangkan madrasah pada situasi apapun termasuk pada situasi krisis ekonomi sampai saat ini yang sampai sekarang masih dirasakan akibatnya strategi yang ditempuh lebih difokuskan pada upaya mencegah peserta didik agar tidak putus sekolah, mempertahankan mutu pendidikan agar tidak semakin menurun, adapun langkah-langkah tersebut adalah: 1). Angka putus sekolah di madrasah dipertahankan seperti sebelum krisis dan akhirnya dapat diperkecil. 2). Peserta didik yang kurang beruntung seperti yang tinggal di daerah terpencil tetap dapat memperoleh layanan pendidikan minimal

tingkat pendidikan dasar. 3). siswa yang telah terlanjur putus sekolah didorong kembali untuk kembali dan atau memperoleh layanan pendidikan yang sederajat dengan cara yang lain misalnya di madrasah terbuka. 4). Proses belajar mengajar di madrasah tetap berlangsung meskipun dana terbatas.

2. Strategi Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan di Madrasah

Meskipun strategi ini terfokus pada program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas 9 tahun) jenis dan jenjang pendidikan lainnya pun tercakup. Indikator-indikator keberhasilannya adalah: 1). Mayoritas penduduk berpendidikan minimal MTs (SMP) dan partisipasi pendidikan meningkat, yang ditunjukkan dengan APK pada semua jenjang dan jenis madrasah. 2). Meningkatnya budaya belajar yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka melek huruf. 3). Proporsi jumlah penduduk yang kurang beruntung yang mendapat kesempatan pendidikan semakin meningkat.

3. Strategi Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan di Madrasah

Kebijakan program Mapenda untuk meningkatkan mutu relevansi madrasah, meliputi 4 (empat) aspek yaitu: kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, sarana pendidikan serta kepemimpinan madrasah.

4. Strategi Pengembangan Manajemen Pendidikan Madrasah

Strategi ini berkenaan dengan upaya mengembangkan sistem manajemen madrasah sehingga secara kelembagaan madrasah akan memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut:

1). Berkembangnya prakarsa dan kemampuan-kemampuan kreatif dalam mengelola pendidikan, tetapi tetap berada dalam bingkai visi, misi, serta tujuan kelembagaan madrasah. 2). Berkembangnya organisasi pendidikan di madrasah yang lebih berorientasi profesionalisme, dari pada hierarchi. 3). Layanan pendidikan yang semakin cepat terbuka, adil dan merata.

5. Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Madrasah

Strategi ini menekankan pada pemberdayaan kelembagaan madrasah sebagai pusat pembelajaran pendidikan dan pembudayaannya. Indikator keberhasilannya adalah: 1). Tersedianya madrasah yang semakin bervariasi, yang diikuti oleh visi dan misi serta tujuan pendidikan madrasah dengan dukungan organisasi yang efektif dan efisien. 2). Mutu dan sarana-prasarana madrasah yang semakin meningkat dan iklim pembelajaran yang semakin kondusif bagi peserta didik. 3). tingkat kemandirian madrasah semakin tinggi.

E. Desain Pengembangan Madrasah

Prinsip-prinsip pengembangan madrasah seperti yang dijelaskan di atas dapat diaktualisasikan dengan menghadirkan tiga desain besar pendidikan madrasah (Departemen Agama RI.2004: 53) yaitu:

1. Madrasah Unggulan

Madrasah unggulan dimaksudkan sebagai center for excelence dan akan dikembangkan satu buah untuk tiap provinsi. Madrasah unggulan diproyeksikan sebagai wadah penampungan putra-putra terbaik masing-masing daerah untuk didik secara maksimal tanpa harus pergi ke daerah lain.

2. Madrasah Model

Madrasah Model dimaksudkan sebagai *center for excellence* yang dikembangkan lebih dari satu buah untuk tiap provinsi dan diproyeksikan sebagai wadah penampung putra-putra terbaik masing-masing daerah untuk didik secara maksimal tanpa harus pergi ke daerah lain. Karena menjadi center for excellence anak-anak terbaik maka kesempatan belajar kedua jenis madrasah ini harus melalui proses seleksi yang ketat dan dengan berbagai ketentuan lainnya, madrasah model juga diperkuat oleh Majelis Madrasah yang memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah model

3. Madrasah Reguler atau Kejuruan

Madrasah reguler atau kejuruan adalah madrasah yang fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan pendidikan kepada setiap masyarakat tanpa terkecuali. Madrasah ini dibangun beberapa buah untuk tiap kabupaten sesuai kebutuhan dengan dana dari pemerintah daerah sehingga setiap kecamatan terdapat minimal satu madrasah reguler/kejuruan. Sebagaimana jenis madrasah lainnya, madrasah reguler/kejuruan juga diperkuat oleh Majelis Madrasah yang secara aktif membantu pengembangan madrasah.

F. Performa Madrasah yang Ideal

Madrasah diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam pembentukan intelektual, emosional dan spritual anak. Madrasah seharusnya menjadi wadah pemupukan kecerdasan setiap siswa, dan di atas segalanya menjamin agar setiap siswa

mendapat kesempatan belajar yang sama dan layak. Berkenaan dengan hal tersebut maka tiga karakter dasar madrasah yang perlu dikembangkan secara holistik agar dapat menciptakan performa madrasah yang mendekati kriteria-kriteria idealisme pendidikan modern (Departemen Agama RI, 2004: 63), tiga karakter tersebut yaitu:

1. Memiliki kultur yang kuat

Kultur merupakan jiwa madrasah yang memberi makna bagi setiap kegiatan kependidikan madrasah dan menjadi jembatan antara aktifitas dan hasil yang dicapai. Kultur adalah sebuah keadaan yang mengantarkan siswa madrasah melebihi batas-batas kekurangan manusiawi menuju tingkat kreatifitas seni dan intelek yang tinggi. Karena itu kultur madrasah, dalam hal ini kultur belajar haruslah dibangun sejak awal agar semua elemen madrasah memiliki komitmen untuk kemajuan madrasah.

2. Kepemimpinan Kolaboratif dan Belajar Kolektif

Kepemimpinan dalam madrasah harus didefinisikan sebagai sebuah proses belajar bersama (*collective learning*) yang saling menguntungkan yang memungkinkan seluruh unsur masyarakat madrasah turut ambil bagian dalam membangun kesepakatan yang mengakomodir berbagai kepentingan (kolektif dan kolaboratif). Kolaborasi yang dimaksud bukan hanya sekedar berarti setiap orang mampu menyelesaikan pekerjaannya, tapi yang terpenting adalah semuanya dilakukan dalam suasana kebersamaan dan saling mendukung. Kolaborasi menjadi syarat jika kita ingin agar madrasah menjadi *learning organization* karena kolaborasi berhubungan erat dengan norma dan kesempatan bagi terjadinya proses belajar yang terus menerus.

3. Membiasakan siswa menghadapi perubahan/ketidak pastian

Hidup adalah perubahan, secara alami perubahan tidak bisa diprediksi, agar bisa memahami dan berbuat dalam kondisi yang tidak bisa diprediksi tersebut sebuah upaya pendidikan yang terus menerus, seumur hidup menjadi sebuah kemestian. Jika tujuan pendidikan formal adalah untuk memupuk intelegensi manusia, maka madrasah hendaknya membuka diri terhadap ketidakpastian atau ambiguity. Sebuah lembaga pendidikan yang secara aktif merespons suasana ambiguity dan ketidakpastian adalah penting untuk kelangsungan sebuah masyarakat yang belajar (*community of learners*).

Berdasarkan uraian tersebut, maka keberhasilan dalam penerapan inovasi harus melalui tahapan-tahapan dan strategi yang baik disesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial masyarakat setempat. Demikian pula halnya dengan perubahan sekolah, kepala sekolah, guru, staf, siswa, dan masyarakat adalah merupakan faktor dominan yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan inovasi yang dapat membawa perubahan sekolah kearah perkembangan dan peningkatan kualitas, seperti fasilitas, proses belajar-mengajar, maupun dalam proses penciptaan suasana lingkungan yang kondusif, damai, harmonis, dan menyenangkan, penuh rasa kekeluargaan (<https://nurwidintoro.wordpress.com>).



DAFTAR PUSTAKA

- A. Malik Fajar (1999). *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan.
- Abd. Mudjib, Muhaemin. (1993). *Paradigma Pendidikan Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*. Bandung: Trigenda Karya.
- Abdul Majid & Chaerul Rochman. (2014). *Pendekatan Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Abdurrahman Mas'Ud. (2004). *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*. Peng. Mark R. Woodward & Lik Arifin Noor. Yogyakarta: LKiS.
- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati (2001). *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. II. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asrohah Harun. (2001). *Sejarah Pendidikan Islam Cet. II*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Aswir-, Wiriyanto. (2013). W.a: resume buku 'perbandingan sistem politik' (Dr. Mohtar Mas'oeed dan Colin MacAndrews)." *WA* (blog), 7 Januari 2013. <https://aswirjunior.blogspot.com/2013/01/resume-buku-perbandingan-sistem-politik.html>.

- Aneka Ragam Makalah. (2020). *Pengertian Pendidik dan Peserta Didik*. Diakses 20 Juni 2020. <https://www.anekamakalah.com/2014/03/pengertian-pendidik-dan-peserta-didik.html>.
- Bambang Marhiyanto. (1999). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Bitar. (2020). “Lingkungan Sosial : Pengertian, Faktor, Dan Jenis Beserta Contohnya Lengkap.” GuruPendidikan.Com, 5 Februari 2020. <https://www.gurupendidikan.co.id/lingkungan-sosial-pengertian-faktor-dan-jenis-beserta-contohnya-lengkap/>.
- Daulay, Haidar Putra. (2001). *Historis dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, Yogyakarta : Tiara Kencana.
- Departemen Agama. (2005). *Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan*, (t.tp., Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005.
- Dirjen Pendis. (2019). Unduhan KAMENAG RI. Bag, DIRJEN PENDIS Tanggal 20 Februari 2019.
- Dirjen Pendis. (2013). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Djumhur, I dan Danasuparta. (1974). *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. VII. Bandung: PT Bina Ilmu.
- Edi Yusrianto. (2008). *Lintasan Pendidikan Islam*. Pekanbaru: Intania Grafika.

- Fahrurrozi. (2012). Manajemen keuangan madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam* 27, no. 2 (2012): 223–38. <https://doi.org/10.15575/jpi.v27i2.508>.
- <https://www.gurupendidikan.co.id/lingkungan-sosial-pengertian-faktor-dan-jenis-beserta-contohnya-lengkap/>. Diakses februari 2020.
- Haidar Putra Daulay. (2004). *Pendidikan Islam :Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Haidar Putra Daulay. (2007). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamalik Oemar. (1990). *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem* . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamid, Abdulloh dan Putu Sudira. (2019). *Penanaman Nilai-nilai Karakter Siswa SMK Salafiyah Program Keahlian Tekni Komputer dan Jaringan (TKJ) Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah*. email: doelhamid07@gmail.com, file didownload tanggal 21 Februari 2019.
- Hanafy, Muh. Sain. (2009). Paradigma Baru Pendidikan Islam dalam Upaya Menjawab Tantangan Global. *Lentera Pendidikan*, Vol. 12 No.2 (Desember, 2009).
- Harjanto. (2005). *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasbullah. (2001). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia : lintasan sejarah pertumbuhan dan perkembangan*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

- Hasbullah. (1995). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Cet. III*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasbullah. (2010). *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- [http://fauzanma-fitku.in/Jakarta.Blogspot.Com/2009/04/Sejarah Pendidikan Islam.html](http://fauzanma-fitku.in/Jakarta.Blogspot.Com/2009/04/SejarahPendidikanIslam.html). Diakses Rabu, 18 Februari 2019.
- <http://edukasi.kompasiana.com/2013/05/12/kuttaab-lembaga-pendidikan-islam-klasik-401099.html> diakses Rabu, 20 Februari. 2019
- <http://muhammadalisunan.blogspot.com/2013/05/12/lembaga-pendidikan-klasik.html> Diakses rabu, 20 Februari 2019.
- Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Indonesia. (2005). Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Kunandar. (2007). *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Press.
- Maksum. (1999). *Madrasah : sejarah dan perkembangannya* ,(Jakarta :Logos Wacana Ilmu.
- Manajemen Pendidikan Indonesia. “standar sarana dan prasarana sekolah/madrasah pendidikan umum.” *Manajemen Pendidikan.Net* (blog), 21 Oktober 2017.

<https://manajemenpendidikan.net/8-standar-nasional-pendidikan/standar-sarana-dan-prasarana/standar-sarana-dan-prasarana-sekolahmadrasah-pendidikan-umum/>.

- Muniroh, Jauharotul, dan Muhyadi Muhyadi. (2017). Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah aliyah negeri kota yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 5, no. 2 (2017): undefined-undefined. <https://doi.org/10.21831/amp.v5i2.8050>.
- Muhammad Tholhah hasan. (1986). *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*. Jakarta: Bangun Prakarya.
- Muhaimin. (2007). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan perguruan tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulkan, Munir. (2007). *Pesa dan Kisah Kiai Ahmad Dahlan Dalam Hikmah Mmuhammadiyah*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.
- Mulyasa. (2007). *Manajemen Berbasis Madrasah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nashruddin, Wakhid. (2015). Teaching English as A Foreign Language at Ma-drasah Ibtidaiyyah: Facts and Challenges. *Jurnal Dinamika Ilmu*, Vol. 15 No 1, 2015.
- Nanik Darsini. (2001). *Pengelolaan Sarana Prasarana Rekreasi*. Jakarta: Rosda Karya.
- Nurdin. (2005). *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Quantum Teaching.
- Nurwidianoro. (2010). Peran madrasah dalam pendidikan.” *Nurwidianoro* (blog), 21 Agustus 2010. <https://nurwidintoro.wordpress.com/2010/08/21/peran-madrasah-dalam-pendidikan/>.

- Rusman. (2009). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Press.
- ResearchGate. "(PDF) Pengelolaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan." Diakses 20 Juni 2020. https://www.researchgate.net/publication/326775111_Pengelolaan_Pendidik_dan_Tenaga_Kependidikan.
- Rodadunia. (2019). *Pengertian Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan*. Rodadunia.Com (blog), 3 Maret 2019. <https://www.rodadunia.com/pendidik-adalah/>.
- Saepudin, "Fungsi Hukum Menurut Prof. Syahrhan Basah," *welcome | saepudin online* (blog), 3 Juli 2010, <https://saepudinonline.wordpress.com/2010/07/03/fungsi-hukum-menurut-prof-syahrhan-basah/>.
- Shaleh, Abdul Rachma. (2000). *Pendidikan Agama dan Keagamaan*. Cet. I. Jakarta: PT Gema Windu Nanca Perkasa.
- Statistik Pendidikan RI 2004-2005 http://www.depdiknas.go.id/statistik/thn04-05/TK_0405.html. Rabu, 20 Februari 2019.
- Statistik sekolah dasar 2004-2005 http://www.depdiknas.go.id/statistik/thn04-05/SD_0405.html. Rabu, 20 Februari 2019
- Sulistiyorini. (2009). *Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Sulthon, M. Khusnuridlo, M. (2006). *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif Global*, Yogyakarta: laksBang PRESSindo.
- Surat edaran KAMENAG RI. No no SE/DJ.I/PP.00.6/1/2015 TENTANG, *Kurikulum Madrasah Tertanggal*, Rabu, 20 Januari 2019

Surat edaran KAMENAG RI. No no SE/DJ.I/PP.00.6/1/2015
TENTANG, *Kurikulum Madrasah* Tertanggal, 2 Januari
2015

Suryosubroto. (2010). *Manajemen Pendidikan di Sekolah*.
Jakarta: Rieneka Cipta.

Vincent P Costa. (2000). *Panduan Pelatihan untuk
Mengembangkan Madrasah*. Jakarta: Depdiknas.

W.J.S. Poerwa Darminta. (1996). *Kamus umum Bahasa
Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. Cet. I. Surabaya: Pusat
Studi Agama, Politik dan Masyarakat, 2003).

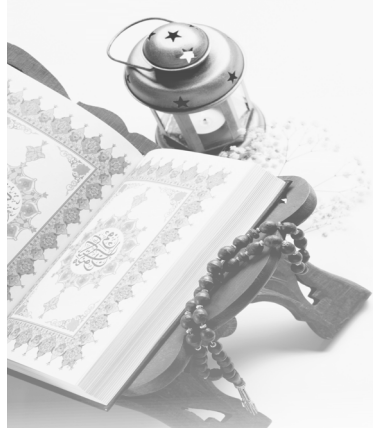
Wiriyanto Aswir-. (2013). W.a: resume buku ‘perbandingan
sistem politik’ (Dr. Mohtar Mas’oed dan Colin
MacAndrews),” *W.A* (blog), 7 Januari 2013, [https://
aswirjunior.blogspot.com/2013/01/resume-buku-
perbandingan-sistem-politik.html](https://aswirjunior.blogspot.com/2013/01/resume-buku-perbandingan-sistem-politik.html).

Wikipedia. *Kanuragan* dalam istilah kuno (bahasa Jawa) adalah
ilmu yang berfungsi untuk bela diri secara supranatural.
Ilmu ini mencakup kemampuan bertahan (kebal) terhadap
serangan dan kemampuan untuk menyerang dengan
kekuatan yang luar biasa. (<http://id.m.wikipedia.org>> wiki.

Zakiah Daradjat. (2004). *Metodik Khusus Pengajaran Agama
Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara.

Zamakhshari Dhofier. (2001). *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LKIS.

Zuhairini. (2008). *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. 9. Jakarta:
Bumi Aksara.



Indeks

A

- Adab 17
- Adabiyah 30
- Agama Islam 2, 8, 14, 25, 26, 27, 31, 34, 36, 37, 88, 94, 95, 97, 104, 109, 110
- Akhlak 7, 48, 92, 93, 100, 105, 113, 114, 154
- Aliyah 27, 35, 37, 41, 90, 97, 99, 103, 115, 142
- Al-Muntadiyat 89
- Al-Qur'an 9, 10, 11, 66, 98, 109, 112

B

- Bandongan 65
- Budaya 10, 14, 15, 20, 30, 49, 52, 53, 60, 94, 157

C

- Cantrik 96
- Ceramah 22, 66

D

- Dar al-Hikmah 89

E

- Etika 49, 123

G

- Guru 5, 9, 10, 11, 23, 33, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 71, 72, 73, 81, 85, 97, 106, 109, 116, 117, 118, 121, 122, 124, 125, 126, 129, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 148, 149, 152, 153, 155, 157, 161

H

- Hafalan 66
- Halaqah 2, 7, 12, 13, 20, 22, 65, 89, 107, 109
- Hawani 89

I

- Ibtidaiyah 27, 31, 36, 37, 41, 89, 90, 91, 92, 99, 142
- Ijasah 21
- Ilmu Pengetahuan 3, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 27, 39,

40, 48, 51, 53, 54, 58, 88,
94, 96, 98, 109, 137
Indonesia 3, 7, 19, 25, 26, 27, 29,
30, 31, 32, 33, 39, 41, 49,
57, 60, 62, 75, 87, 90, 92,
93, 94, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 108, 110, 112,
114, 115, 122, 124, 141,
143, 153, 155, 156, 163,
164, 165, 168, 173

K

Kepribadian 13, 48, 50, 56, 57, 93,
100, 116, 127, 150
Khan 21
Kitab 19, 64, 65, 98, 107, 109,
112, 113
Kiyai 106, 108, 113
Kompetensi 50, 51, 52, 54, 56, 58,
60, 93, 116, 135, 138
Kurikulum 3, 8, 12, 22, 38, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 56,
58, 59, 61, 85, 95, 101, 102,
105, 109, 112, 113, 114,
136, 153, 157
Kuttab 2, 5, 8, 9, 10, 11, 20, 25,
27, 111

M

Madrasah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 52, 61, 67,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 94, 95, 98,
99, 101, 108, 109, 110, 111,

114, 115, 142, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 163, 165, 166
Manajemen 3, 68, 73, 74, 75, 76,
84, 90, 95, 157
Masjid 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 88, 109, 111
Mursyid 21
Mustawasithah 21
Musyawarah 15, 65

O

Orde Baru 35

P

Pelajar 21, 23, 31, 108, 109, 110
Pendidikan Islam 1, 2, 5, 8, 9, 13,
14, 19, 22, 24, 25, 26, 30,
32, 33, 38, 64, 87, 88, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 108, 109,
110, 114
Pesantren 19, 25, 26, 31, 32, 94,
95, 96, 98, 104, 105, 106,
107, 109, 110, 113, 128

Q

Quraisy 1

R

Ribath 7, 21, 25, 89, 109

S

Santri 26, 32, 95, 105, 106, 107,
108, 110

Sekolah 4, 7, 24, 25, 26, 28, 29,
30, 32, 34, 35, 37, 38, 39,
41, 43, 44, 47, 50, 55, 57,
59, 67, 68, 69, 71, 72, 73,
79, 89, 90, 94, 98, 100, 101,
104, 105, 106, 108, 109,
111, 113, 117, 118, 119,
125, 126, 128, 134, 139,
140, 142, 148, 152, 153,
154, 156, 157, 161, 165, 167
Sistem Pendidikan Nasional 32,
34, 35, 90, 92, 93, 94, 96
Sopan Santun 45
Sorogan 64, 107
Sufi 21
Surau 5, 19, 98, 111

T

Tawalib 31
Timur Tengah 26, 30
Tsanawiyah 27, 31, 36, 37, 41, 90,
93, 94, 95, 99, 142

W

Warraqin 89
Wetonan 65, 107

BIODATA PENULIS



Lukman Asha, lahir 29 September 1959 di Desa Bandung Marga Kec. Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, **Pendidikan**; MIN Bandung Marga 1974, PGAN 4 tahun 1978, PGAN Curup 1981, Sarjana Muda Fak. Dakwah IAIN RF 1984, S1 Fak. Ushuluddin IAIN RF 1988, S2 Manajemen Pendidikan Islam Fak. Tarbiyah IAIN RF 2006, S3 Manajemen Pendidikan UNJ 2013.

Pekerjaan; Guru SD 5 Curup, Wakil Kepala MTs. Nurul Curup, Guru SMAN 3 Curup, Guru SMAN 4 Curup, Asisten Dosen Fak. Ushuluudin IAIN RF di Curup, Sekretaris Perpustakaan, Kasubag. Umum, , Kasubag. AK., Kabag. Adm., Direktur Utama Radio Pesona FM, Kepala PIPK, Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Curup, WR III, Kepala SPI dan Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

Organisasi; Ketua Racana dan Pembina Pramuka, Komandan dan Pembina Resimen Mahasiswa, HMI, Pemuda Muhammadiyah, Ketua Mapancas, Wakil Ketua AMPI, Wakil

Ketua KNPI, KAHMI, ICMI, MUI, FKUB, IPHI, Pendiri ESQ Bengkulu, Ketua Forum Kabag PTKIN Indonesia, Ketua Bidang Kader IARMI Bengkulu.

Karya Ilmiah; Buku *Pendidikan Pramuka*, Buku *Bunga Rampai Pengantar Penelitian*, Buku *Daras Studi Madrasah*, Buku *Terjemahan Alquran Bahasa Rejang*, Buku *Kecil Pedoman Penyelenggaraan Jenazah*. Dan Buku *Manajemen Pendidikan Madrasah* yang sedang berada di tangan pembaca yang budiman.

MANAJEMEN PENDIDIKAN MADRASAH

Perkembangan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam tidak lepas dari kontribusi sejarah perkembangan dan dinamika pendidikan madrasah dari zaman Rasulullah hingga zaman modern seperti sekarang ini. Manajemen pendidikan madrasah saat ini dapat dilihat pada kemajuan berbagai komponennya, seperti; infra struktur madrasah yang semakin elegan, fasilitas dan media pembelajaran yang berbasis IT, tenaga pendidik yang profesional, dan sumber belajar yang relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan terkini, bahkan lahirnya beberapa madrasah unggulan yang diperhitungkan secara nasional.

Madrasah memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Saat ini pendidikan madrasah masih dianggap pendidikan “kelas dua”. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan madrasah masih menghadapi sejumlah masalah besar mulai seperti persoalan pengelolaan dan rendahnya mutu pendidikan madrasah. Buku ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang manajemen pendidikan madrasah, dimana akan dilihat bagaimana dinamika dan studi perbandingan madrasah dari masa ke masa.

Pembahasan dalam buku ini meliputi studi perbandingan madrasah. Kemudian perkembangan lembaga pendidikan Islam terutama di masa awal berkembangnya Islam yang turut memberikan sumbangsih peradaban dunia. Selanjutnya dibahas pula tentang madrasah di Indonesia yang membahas tentang sejarah dan perkembangannya.

Kurikulum dan metode pengajaran madrasah merupakan pembahasan selanjutnya. Lebih lanjut dibahas pula manajemen administrasi madrasah dan system keuangan madrasah, serta perbandingan madrasah. Tenaga pendidikan dan kependidikan madrasah, serta peserta didik merupakan pembahasan selanjutnya. Sarana prasarana madrasah. Dan yang terakhir dibahas tentang social budaya madrasah.